

# KONFRONTASI BERSENJATA MEREBut IRIAN BARAT





# KONFRONTASI BERSENJATA MEREBut IRIAN BARAT

---

Ferry Valdano Akbar



# **KONFRONTASI BERSENJATA MEREBut IRIAN BARAT**

Ferry Valdano Akbar

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Right Reserved*

Penulis: Ferry Valdano Akbar  
Kata Pengantar: Bayu Dardias Kurniadi  
Editor: Rachmad Gustomy  
Sampul dan Tata Letak: Oryza Irwanto

Research Centre for Politics and Government  
Jurusan Politik dan Pemerintahan  
Universitas Gadjah Mada

Jl. Socio Yusticia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
[www.jpp.fisipol.ugm.ac.id](http://www.jpp.fisipol.ugm.ac.id)  
email: [polgov.ugm@gmail.com](mailto:polgov.ugm@gmail.com)  
Telp: +62 274 563365 ext.212

146 + xxii halaman  
140 x 210 mm

ISBN 978-602-96762-5-9

# ISI BUKU

---

Isi Buku .....	v
Daftar Tabel dan Gambar .....	vii
Kata Pengantar: Merebut Irian Barat: Perjuangan dan Tantangan kedaulatan .....	ix
Referensi .....	xvii
Dari Penulis .....	xix

## Bagian Satu:

### PERLUKAH KEKUATAN MILITER

YANG BESAR DAN TANGGUH? .....	1
Arti Strategis Kekuatan Militer Negara .....	7
Pembangunan Kekuatan Militer Negara .....	19
Sistematika Penulisan .....	35

## Bagian Dua :

### DARI DIPLOMASI KE KONFRONTASI

BERSENJATA .....	37
Perjuangan Mengembalikan Irian Barat .....	37
Konfrontasi Bersenjata Sebagai Pilihan Akhir .....	45

Bagian Tiga :

MEMBANGUN PERSENJATAAN UNTUK KONFRONTASI MILITER .....	55
Signifikansi Momentum Perang Dingin .....	55
Memanfaatkan Amerika Serikat .....	57
Beralih kepada Uni Sovyet .....	74

Bagian Empat:

ANCAMAN PERANG SEBAGAI JAWABAN .....	91
Pembangunan Kekuatan Militer Sebagai Kekuatan Politik Negara .....	91
Arti Strategis Hadirnya Kekuatan Militer Dalam Usaha Merebut Kembali Irian Barat .....	100
Kekuatan Muncul Dari Ujung laras Senapan .....	103
Kekuatan Militer Sebagai Instrumen Mewujudkan Kepentingan Nasional .....	110

Bagian Lima :

PENUTUP .....	115
Pentingnya Kekuatan Militer Dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional .....	115
Memanfaatkan Situasi Politik Internasional Untuk Membangun Kekuatan Militer .....	117
Renungan Akhir .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	127

## DAFTAR TABEL & GAMBAR

---

Gambar 1.1 : Diagram Konsep Perwujudan Negara menurut Buzan .....	13
Gambar 1.2 : Alur National Security Policy .....	25
Gambar 3.1 : Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy .....	57
Gambar 3.2 : Pertemuan Presiden Soekarno dengan PM Nikita .....	76
Tabel 3.3 Kekuatan TNI-Angkatan Laut dalam konfrontasi merebut Irian Barat .....	82
Gambar 3.4 : Kapal Selam ALRI buatan Uni Sovyet "Whiskey Class" .....	83
Gambar 3.5 : KRI Irian (Jenis Kapal Penjelajah Berat) .....	84
Tabel 3.6 : Kekuatan TNI-Angkatan Udara dalam konfrontasi merebut Irian Barat .....	86
Gambar 3.7 : Mig 19 AURI (Pesawat Tempur Supersonic) .....	86
Gambar 3.8 : Mig 21 AURI (Pesawat Pemburu Supersonic) .....	87
Gambar 3.9: Kiri (Armada Pembom Tu-16 dan Awaknya), Kanan (Pembom Tu-16 yang kini sudah dimusiumkan) .....	88



# KATA PENGANTAR MEREbut IRIAN BARAT: PERJUANGAN DANTANTANGAN KEDAULATAN

---

Bayu Dardias, MA, M.Pub.Pol  
bdardias@ugm.ac.id

Papua sampai saat ini masih sering bergolak, bahkan setelah lima puluh tahun menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tuntutan untuk menjadi negara sendiri yang terlepas dari Indonesia tidak pernah benar-benar padam. Dalam berbagai forum akademik, bahkan training birokrat, wacana untuk terus menggulirkan isu M (Merdeka) selalu muncul. Tuntutan ini bervariasi mulai dari lontaran yang emosional dan seringkali traumatik, sampai pada tuntutan yang lebih rasional. Selain tuntutan M, muncul berbagai tuntutan untuk menciptakan kesejahteraan di Papua.

Di lain pihak, harus kita sadari bahwa Papua yang telah terbagi menjadi dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua tetap menjadi daerah paling terbelakang di Indonesia. Padahal Provinsi Papua berada di urutan keenam dan Papua Barat urutan ke tiga dalam kontribusi per kapita terhadap pemerintah pusat dari sumber daya

alam (World Bank 2006). Dilihat dari pencapaian delapan target MDGs, Provinsi Papua dan Papua Barat tetap berada di peringkat-peringkat akhir (Bappenas 2010). Alam Papua yang luas dan bervariasi dengan jumlah penduduk yang hanya 2% dari penduduk Indonesia (BPS 2010) menyulitkan akses terhadap pembangunan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan sebaran penduduk di gunung-gunung yang sulit diakses, percepatan pembangunan Papua yang sudah dicanangkan sekian lama tidak pernah dapat direalisasi dengan mudah.

Kondisi geografis ditambah dengan sebaran penduduk di lokasi dengan akses buruk menyebabkan tingginya tingkat disparitas harga antara Papua dan daerah lain di Indonesia sangat berbeda. Di Kabupaten Puncak misalnya, satu-satunya transportasi yang dapat diandalkan adalah pesawat terbang, sebagai sarana angkut untuk berbagai kebutuhan. Sehingga harga-harga melonjak luar biasa. Kisah antropolog yang meneliti di Papua misalnya, harga satu sak semen 40 kg di Jawa yang sekitar 45 ribu rupiah melonjak menjadi 1,4 juta rupiah di Papua (Hudayana 2011).

Di tengah berbagai tuntutan tersebut, buku ini menunjukkan sebuah fakta penting yang patut dipertimbangkan siapapun yang peduli terhadap kemajuan di Papua. Fakta bahwa Papua Barat waktu itu, tidak direbut dengan mudah dan mengorbankan banyak sumber daya. Sumber daya tersebut adalah proses panjang dari upaya menjadikan Papua Barat sebagai bagian syah Republik Indonesia setelah sebelumnya secara administratif dikuasai Belanda. Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamkan 1945 dan diakui oleh bekas

penjajah Belanda tahun 1949 masih menyisakan persoalan karena Papua Barat adalah satu-satunya wilayah dimana yang secara administratif dikuasai sebagai jajahan Belanda tetapi tidak menjadi bagian dari Indonesia yang baru Merdeka.

Indonesia memiliki langkah legitimasi kuat karena merupakan penerus dari Belanda yang sebelumnya menjajah Papua Barat (Kingsburry 2003: 17). Indonesia meneruskan asas *uti possidetis juris* dimana batas wilayah Negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum Negara tersebut merdeka (Bhakti 2009). Belanda enggan menyerahkan Papua Barat salah satu sebabnya karena hanya setahun setelah kedaulatan Indonesia diakui dalam bentuk negara yang serikat (Republik Indonesia Serikat), Indonesia kemudian merubah bentuk negaranya kembali menjadi kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer pada 17 Agustus 1950.

Salah satu bukti paling kuat dari kenyataan bahwa Papua Barat adalah wilayah administasi penting penjajah Belanda dapat dilihat dari kasus Boven Digoel. Papua Barat pernah menjadi bagian dari sejarah penting pergerakan kemerdekaan Indonesia ketika tempat pembuangan Hatta dan beberapa tokoh nasional lainnya ketika melakukan strategi non kooperatif. Hatta dibuang di Boven Digoel pada Januari 1935, dua tahun setelah sebelumnya Sukarno dibuang di Ende. Sekembalinya dari Boven Digoel, Sokarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka melakukan upaya untuk mempercepat kemerdekaan.

Untuk merebut Papua Barat Pemerintah dan rakyat Indonesia melakukan perang di dua arena yaitu internasional dan nasional dengan kombinasi dua taktik yaitu militer dan non-militer. Dalam arena internasional non-militer, Indonesia melakukan berbagai langkah diplomasi untuk membawa PBB hadir sebagai penengah konflik perebutan Papua Barat. Pelibatan PBB dalam proses negoisasi non-militer internasioanl dipandang sebagai langkah taktis untuk memastikan proses sah sesuai hukum internasional atas bergabungnya Papua Barat ke Indonesia. Inilah langkah penting saat itu yang dampaknya dapat dilihat saat ini. Sekarang, ini Papua Barat adalah bagian integral dari Indonesia sesuai hukum internasional setelah PBB membentuk UNTEA dan melakukan Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Pepera ini dilakukan 20 tahun sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengatur penyerahan Papua Barat kepada Indonesia. PBB melalui Resolusi No. 2504 secara sah mengakui Papua Barat (yang sekarang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) merupakan bagian dari Indonesia.

Langkah internasional dalam bidang militer dilakukan dengan mendatangkan peralatan tempur canggih dari dua negara berseteru yang ingin memperkuat pengaruhnya di Asia yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Amerikat berupaya agar Indonesia tidak menjadi negara komunis di Asia, Rusia (dan China) punya kepentingan sebaliknya. Sukarno sangat cerdas membaca peluang ini dengan mendekati keduanya untuk kepentingan militer Indonesia. Serangkaian lobi dilakukan terhadap pemimpin negara yang memiliki peralatan tempur canggih yaitu Amerika dan Rusia agar Indonesia dapat membeli

peralatan tempur, walaupun dengan cara berhutang. Anggaran negara yang masih terbatas waktu itu ditujukan untuk memperkuat armada tempur Indonesia terutama Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk menimbulkan gertakan kepada Belanda bahwa Indonesia siap menempuh langkah perang untuk mendapatkan Papua Barat. Prioritas untuk mengalokasikan anggaran kepada upaya penguatan militer tentu memberikan dampak sangat serius terhadap upaya pemenuhan kesejahteraan. Inilah ongkos yang secara langsung dirasakan rakyat Indonesia waktu itu.

Di dalam negeri, Indonesia melakukan dua upaya baik militer militer maupun non-militer untuk mendapatkan Papua. Upaya militer dilakukan dengan mengerahkan tentara dan sukarelawan untuk menduduki Papua, yang didukung dengan peralatan tempur canggih, hasil dari upaya lobi militer internasional. Di bidang non-militer, Soekarno mampu menghipnotis rasa patriotisme rakyat Indonesia dengan (salah satunya) merubah nama Papua menjadi IRIAN, singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Nama baru ini dilengkapi dengan JAYA yang menunjukkan tujuan akhir dari seluruh proses panjang militer dan non-militer. Peranan Soekarno dalam merumuskan langkah strategi yang mampu menunjukkan *dignity* negara baru Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai negara yang disegani di seluruh dunia, tidak hanya diantara negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia.

Satu hal yang menarik dari sejarah perebutan Papua adalah penggunaan kekuatan militer canggih sebagai *deterrence factor* yang mampu menekan Belanda untuk berdialog di meja perundingan. Pada proses perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia sebelum

kasus Papua Barat, masih mengandalkan perjuangan gerilya yang mengandalkan sumber daya seadanya. Simbolisasi heroik perjuangan Indonesia waktu itu ditandai dengan Bambu Runcing, yang mampu mengalahkan senapan mesin dan mesiu. Simbolisasi Bambu Runcing tersebar di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Muntilan, 25 km utara Yogyakarta. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia masih merupakan kekuatan baru dan banyak mengandalkan senjata dari pemberian/rampasan Jepang dan Belanda. Nah, pada proses perebutan Papua Barat, Indonesia mengandalkan senjata tercanggih saat itu yang dibeli dari Amerika dan Rusia. Indonesia memiliki pesawat tempur, kapal, kapal selam dan pesawat pembom yang mampu mengusir kapal induk Belanda, Karel Doorman keluar dari wilayah perairan Papua. Pilihan mengalihkan Karel Doorman adalah sebuah keterpaksaan karena pasti akan kalah seandainya terjadi perang dengan armada perang Indonesia, terutama melalui pertempuran udara dimana Indonesia memiliki pesawat tempur canggih dan pembom yang belum dimiliki Belanda.

Seluruh proses sejarah dan perjuangan terutama berkaitan dengan perang militer dan non-militer yang dilakukan untuk menyatukan Papua Barat dalam wilayah Republik Indonesia adalah tujuan utama dari buku ini yang setidaknya memiliki tiga keunggulan. *Pertama*, buku ini mampu mengingatkan kembali tentang proses dan sejarah bergabungnya Irian Jaya ke Indonesia. Sejarah dan proses tersebut melibatkan serangkaian usaha militer dan non-militer yang memaksa persatuan Indonesia diuji pada titik tertinggi dalam proses 20 tahun lebih sejak KMB. Inilah proses paling panjang dalam perang diplomasi dan non

diplomasi di Indonesia. *Kedua*, Indonesia pernah memiliki kekuatan militer yang sangat disegani di Asia. Kondisi yang sama tidak pernah lagi terjadi lagi. *Ketiga*, gaya penulis yang lugas tetapi tidak menghilangkan detail mampu mengajak pembaca ke suasana lima puluh tahun lalu dimana proses panjang tersebut terjadi.

Berkaitan dengan kekuatan militer Indonesia, buku ini dapat dilihat sebagai sebuah nostalgia sejarah, nostalgia kekuatan dan nostalgia kedaulatan. Sejak peristiwa Papua Barat yang diteruskan oleh Pemerintah Suharto pada awal kepemimpinannya, Indonesia tidak pernah lagi mengucurkan anggaran yang besar untuk kekuatan militer. Anggaran difokuskan untuk program pembangunan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, oleh militer, periode tahun 1950 dan 1960-an tersebut selalu dibayangkan sebagai momen terindah dalam parade militer Indonesia. Dimana, sebagai sebuah bangsa, militer Indonesia dapat mendongakkan kepala dihadapan bangsa lain.

Perubahan fokus ini, yang semakin parah setelah reformasi membuat kekuatan militer Indonesia semakin dipandang sebelah mata. Militer, terutama Angkatan Darat yang menjadi tulang punggung kekuatan politik orde baru semakin tidak mendapatkan tempat ditengah seruan supremasi sipil. Kekuatan militer Indonesia tidak cukup menunjukkan kekuatan sebagaimana ditunjukkan tahun 1960an ketika menghadapi Fretilin tahun 1975 (Tan 2004). Pada tahun 1998, kekuatan militer Indonesia berada di bawah kekuatan militer Singapura yang pada tahun 1965 diceraikan Malaysia (LISS 1998) dan juga negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi statistik kekuatan

militer Indonesia seringkali tidak akurat menunjukkan realitas kekuatan yang berada jauh di bawahnya. Banyak pesawat yang hanya difungsikan sebagai suku cadang dalam sistem kanibalisme. Hal ini terutama diperparah oleh embargo suku cadang yang dilakukan Amerika, dimana Indonesia bergantung untuk kekuatan militer selama sekian lama. Berkali-kali, faktor penggertak tidak lagi bekerja ketika sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia terjadi. KRI seperti enggan mengejar kapal perang Malaysia. Dikejarpun bisa jadi percuma karena yang dikejar justru semakin jauh.

Oleh karena itu, ketika anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan ada 70 tentara Amerika Serikat aktif yang bekerja di PT Freeport di Papua (Winarno 2011), reaksi masyarakat tidak lagi menggemparkan. Reaksi yang biasa saja juga muncul ketika PT Freeport ternyata menyetorkan uang centeng kepada Polisi secara periodik sejak 2001 yang jumlahnya sekitar US\$ 79,1 juta, sebagaimana diungkap ICW. Ini adalah hasil dari lemahnya kekuatan militer Indonesia saat ini. Militer Indonesia tidak lagi dianggap mampu menggertak dan karena lemahnya dukungan anggaran untuk kesejahteraan, militer sekarang dilihat lebih mengabdikan kepada perusahaan. Kedaulatan negara yang susah payah dibangun, tidak lagi ditegakkan.

Sekali lagi, buku ini ingin mengingatkan, dulu Indonesia pernah jaya, ketika merebut IRIAN BARAT.

## Referensi

- Bappenas 2010, Laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia 2010, Bappenas, Jakarta.
- Bhakti Agus 2009, Menjawab tantangan Papua dalam bingkai NKRI (Bagian I), diakses dari <http://www.tandef.net/menjawab-tantangan-papua-dalam-bingkai-nkri-bagian-i> pada 28 November 2011.
- Hudayana, Bambang 2011, "Pemberdayaan masyarakat Papua Barat berbasis kampung dalam agenda percepatan pembangunan", Makalah dalam diskusi "Kebijakan percepatan pembangunan berbasis komunitas adat, sosial-politik dan kultural masyarakat Papua", Fakultas Hukum UGM 17 November 2011.
- Kingsburi Damien 2003, *Power politics and the Indonesian military*, Routhledge Curzon, London.
- London Institute of Strategic Studies 1998, *The military balance 1998-1999*, London.
- Mietzner Marcus 2009, *Military politics, Islam and the State in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*, ISEAS, Singapore.
- Tan Andrew 2004, *Force modernisation trends in Southeast Asia*, Working Paper number 52, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, Singapore.

Winarno Heri 2011, 70 tentara AS disebut bekerja di PT Freeport, diunduh dari <http://www.detiknews.com/read/2011/11/25/185013/1775960/10/70-tentara-as-disebut-bekerja-di-pt-freeport> pada tanggal 30 November 2011.

World Bank 2006, Spending for Development, World Bank.



## DARI PENULIS

---

Kenapa harus menulis tentang perlunya kekuatan militer bagi sebuah negara? Mungkin itu yang akan ditanyakan kebanyakan orang tentang isi buku ini. Apalagi banyak makna tersirat yang terdapat di dalam buku ini menunjukkan penulis sangat antusias dan mengagungkan segala hal yang berkaitan tentang kebesaran dan kegagahan pembangunan kekuatan militer.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman rakyat Indonesia selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru dimana kekuatan militer di Indonesia dijadikan sebuah kekuatan represif yang ditujukan untuk menekan atau mendominasi segala bidang kehidupan rakyat Indonesia membuat kebanyakan orang antipati berbicara tentang perlunya pembangunan atau penguatan kembali kekuatan militer.

Melalui buku ini penulis hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang diperlihatkan Soeharto sang penguasa orde baru dengan apa yang pernah ditunjukkan salah satu *founding father* bangsa ini yakni Presiden Soekarno adalah sebuah hal yang berbeda. Jika Soeharto membangun kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri maka Presiden Soekarno membangun kekuatan militer untuk menjaga keutuhan, kehormatan dan kedaulatan sebuah bangsa-negara. Contoh ini ditunjukkan dalam peristiwa pembebasan wilayah Papua Barat dari

upaya penjajahan kembali yang hendak dilakukan oleh Belanda.

Ketika proklamasi 17 Agustus dikumandangkan oleh sang dwi tunggal Soekarno-Hatta, sudah sangat jelas bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah wilayah yang selama ini menjadi wilayah jajahan Belanda. Setelah melalui negosiasi yang alot akhirnya melalui kesepakatan KMB tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Namun ternyata Belanda masih menginginkan salah satu wilayah Indonesia yakni daerah Papua bagian barat. Dikarenakan alasan ekonomis dan strategis terhadap penguasaan wilayah tersebut.

Hal itu tentu saja tidak disenangi oleh Presiden Soekarno saat itu yang melihat hal itu sebagai sebuah bentuk kolonialisme dan imperialisme terhadap sebuah negara yang berdaulat. Berulang kali sudah dilakukan perundingan dan usaha-usaha diplomasi untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah yang memang menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai semangat proklamasi 1945 yakni wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Belanda tetap berkeras menginginkan wilayah Papua bagian barat itu sebagai hak miliknya. Hal itulah yang mendorong Presiden Soekarno untuk menekan Belanda lebih keras lagi. Bahkan bila perlu melawannya dengan kekuatan bersenjata. Sebab Belanda ternyata juga meningkatkan kekuatannya di daerah itu sebagai persiapan untuk mempertahankan wilayah itu.

Melihat tidak adanya lagi manfaat yang bisa diambil dari usaha-usaha perundingan diplomasi terpaksa senjata yang berbicara. Presiden Soekarno benar-benar

mempersiapkan hal ini. Usaha peningkatan kemampuan perang militer Indonesia dimulai ke negara-negara barat. Namun usaha tersebut gagal sebab, negara-negara barat yang tergabung dalam pakta pertahanan bersama (NATO) ternyata lebih condong berpihak ke Belanda dengan tidak mau menjual senjata ke Indonesia. Hal kemudian yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah beralih ke Uni Sovyet. Memanfaatkan situasi politik internasional pada masa itu Presiden Soekarno berhasil mendapatkan cara untuk meningkatkan kemampuan militer tentara Indonesia tanpa harus tunduk dan patuh dengan negara-negara besar khususnya Blok Barat yang cenderung tidak mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Ketika mengamati persiapan perang yang dilakukan oleh Indonesia melalui pesawat mata-mata Amerika, pihak Barat akhirnya mengambil kesimpulan bagaimanapun jika sampai perang terjadi Belanda hanya akan mengalami kekalahan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya peralatan perang yang digelar oleh Indonesia sebagai bagian dari kampanye perebutan wilayah Papua Barat. Baik dari segi kekuatan militer darat, udara maupun lautnya.

Akhirnya Amerika sendirilah sebagai sekutu tradisional yang memaksa Belanda, untuk mau berunding dan rela melepaskan wilayah sengketa itu. Karena menurut penilaian Amerika, Belanda pasti-pasti akan hancur lebur menghadapi kekuatan militer Indonesia jika nekat mempertahankan wilayah itu.

Hingga akhirnya walau perang tidak pernah jadi benar-benar meletus dalam skala yang besar akhirnya bisa memaksa Belanda untuk mengurungkan niatnya. Tidak

perlu sampai menembakkan senjata. Aura yang dihadirkan senjata-senjata itu cukup membuat Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya di tanah Papua.

Pelajaran apa yang bisa diambil dalam peristiwa itu adalah bahwa sesungguhnya, setiap negara manapun mutlak membutuhkan sebuah kekuatan militer yang besar dan tangguh untuk menjaga kedaulatan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Tanpa adanya aura penggetar dari sebuah kekuatan militer, maka sebuah negara akan dianggap sebelah mata di dalam kancah perpolitikan internasional.

Hal itu bisa kita saksikan di era sekarang dimana sering kali kedaulatan Indonesia dilanggar bahkan oleh negara tetangganya yang mengaku serumpun. Karena negara tetangga itu tidak lagi melihat lagi aura penggetar dari kekuatan militer yang saat ini dimiliki Indonesia.

Untuk itulah melalui buku ini, penulis ingin membuka mata para pembaca bahwa membangun kekuatan militer yang besar dan tangguh mutlak diperlukan bagi sebuah negara. Seperti pesan yang disampaikan sebuah pepatah klasik “SI VI PACEM PARABELLUM” yang artinya “Barang siapa menginginkan perdamaian, maka wajib baginya untuk bersiap-siap berperang”. Hiduplah Kejayaan Indonesia Selama-lamanya.

Jakarta, 2011

Ferry Valdano Akbar

## BAGIAN SATU: PERLUKAH KEKUATAN MILITER YANG BESAR DAN TANGGUH?

---

Sampai hari ini perdebatan tentang perlukah Indonesia membangun dan memiliki kekuatan militer yang tangguh dan besar seperti yang pernah terjadi di era Soekarno<sup>1</sup> tampaknya masih belum selesai. Selain masalah klasik karena keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan pos-pos pengeluaran lain seperti kesehatan atau pendidikan, perasaan euphoria reformasi yang masih mewarnai masyarakat Indonesia dewasa ini. Apalagi pasca Orde Baru muncul anggapan bahwa pembangunan kekuatan militer yang tangguh bukanlah suatu prioritas utama. Bahkan arus pikiran utama di masyarakat cenderung mengatakan bahwa seharusnya pembangunan kekuatan militer Indonesia direduksi. Hal ini disebabkan pengalaman buruk masyarakat Indonesia selama 32 tahun di bawah rezim orde baru pimpinan Soeharto. Dimana pada masa itu penguasa memanfaatkan militer dan kekuatannya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekuatan militer itu dipakai untuk merepresi setiap pihak yang tidak sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Yang kemudian dipakai dalam menunjang politik konfrontasi untuk merebut kembali Irian Barat

keinginan penguasa. Bahkan selanjutnya militer menjadi kekuatan yang mendominasi seluruh kehidupan masyarakat baik di ranah sosial, ekonomi, maupun budaya.

Reformasi 1998 pasca keruntuhan rezim Soeharto sudah merubah semua sistem militeristik itu<sup>2</sup>, namun belum semua orang memahami bahwa sejatinya ada perbedaan mendasar antara membangun kekuatan militer untuk 'penyelenggaraan politik negara' dengan 'penyelenggaraan negara'. Mengapa demikian? Sebab membangun militer untuk 'penyelenggaraan negara', adalah pembangunan kekuatan militer yang memiliki arti sangat penting dan krusial khususnya sebagai sarana pertahanan untuk kedaulatan atau keselamatan Negara. Sedangkan pembangunan kekuatan militer dalam 'penyelenggaraan politik negara' di tujukan sebagai salah satu cara penguasa melanggengkan kekuasaan<sup>3</sup>.

Dari refleksi inilah saya melihat masih relevannya sebuah gagasan perlunya membangun kembali kekuatan militer Indonesia sampai dalam tahapan besar dan kuat. Salah satu peristiwa yang bisa menjadi pelajaran adalah peristiwa sejarah pembebasan Irian Barat dari pihak Belanda. Saat itu, pasca pengakuan kedaulatan KMB 1949 ternyata masih meninggalkan satu problem bagi Negara Indonesia, yakni pihak Belanda tetap bersikeras untuk menguasai wilayah Papua Barat<sup>4</sup>. Padahal sudah menjadi

---

<sup>2</sup> Salah satu amanat reformasi adalah mencabut dwifungsi ABRI, yang dianggap sebagai penyebab hegemoni militer masuk dan menguasai kehidupan sosial masyarakat.

<sup>3</sup> Baca Wahyono S.K. (2009), *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta : Penerbit Teraju. Hal 74.

<sup>4</sup> Pemakaian nama Irian Barat untuk mengganti penamaan wilayah Papua Barat dilakukan oleh Presiden Soekarno. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan arti politis tersendiri terkait usaha pembebasan wilayah ini dari tangan Belanda. Nama

keyakinan yang tersurat dalam semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 bahwa wilayah Indonesia terbentang dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua Barat). Saat itu usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan kembali haknya ternyata tidak pernah membuahkan hasil. Belanda dengan segala cara berusaha untuk tidak melepaskan wilayah itu, bahkan semakin memperkuat posisinya di wilayah itu. Upaya mempertahankan Papua Barat dilakukan dengan mengirimkan kekuatan militer dan penguatan posisi tawar di pentas internasional dengan meraih dukungan politik dari sekutu-sekutunya.

Meski usaha diplomasi terus dilakukan namun tetap mengalami kebuntuan. Akhirnya, peristiwa inilah yang memicu Presiden Soekarno saat itu untuk segera mengumandangkan politik konfrontasi bersenjata dengan Belanda. Setelah melihat Belanda tidak memberi pilihan selain menunjukkan sikap keras dari pemerintah Indonesia.

Sudah sewajarnya jika Negara yang tidak lagi melihat manfaat diplomasi dalam hubungannya dengan Negara lain umumnya mengubahnya dari hubungan damai menjadi persiapan pelaksanaan perang<sup>5</sup>. Hal itulah yang kemudian mendasari Presiden Soekarno saat itu untuk membangun kekuatan militer Indonesia secara

---

Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisiepo, almarhum, orang yang pertama mengumumkan nama ini pada konferensi di Malino-Ujung Pandang pada tahun 1945, antara lain berkata: "Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland". (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

<sup>5</sup> Sayidiman Suryohadiprojo (2005), *Si Vis Pacem Parabellum (Membangun Pertahanan Negara yang Efektif dan Modern)*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal 57

besar-besaran. Kekuatan militer inilah yang menjadi tumpuan utama Soekarno dalam usaha merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda, sebab jalan diplomasi tidak lagi menjanjikan.

Dalam pandangan dunia modern saat ini, boleh jadi langkah konfrontasi antar Negara seperti saat itu tidak lagi menjadi populer. Oleh karenanya saat ini berkembang pandangan bahwa pembangunan kekuatan militer yang besar dan tangguh adalah sesuatu yang tidak begitu penting dilakukan. Menurut penulis pernyataan atau pemikiran seperti ini jelas salah besar. Sebab setiap Negara, apalagi negara-negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia haruslah cermat serta pandai dalam mengelola dan menjaganya. Karena selain mendatangkan potensi-potensi keuntungan, tentu akan banyak Negara yang mencoba untuk mengusiknya. Mulai dari yang berkedok dan disamarkan dalam hubungan saling menguntungkan antar Negara ataupun juga yang terang-terangan hendak mengambil alih potensi sumber daya alam itu.

Contoh paling aktual pada masa sekarang yang memiliki kesamaan dengan sengketa Irian Barat dahulu adalah kasus tentang perebutan klaim wilayah Blok Ambalat yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Saat itu Malaysia sama seperti Belanda di masa dulu, yang secara agresif berusaha untuk memasukkan wilayah ambalat sebagai bagian dari teritorialnya. Padahal wilayah itu adalah bagian dari teritorial Indonesia. Mengapa hal itu terjadi, sebab baik Indonesia dan Malaysia sama-sama menyadari bahwa blok Ambalat ini menyimpan cadangan kekayaan alam yang luar biasa

banyaknya. Kedua Negara memiliki kepentingan yang sama pada wilayah itu.

Berulang kali pula sudah dilakukan acara perundingan diplomatik di antara kedua Negara, namun juga belum menunjukkan ketegasan siapa pemilik sah wilayah itu. Bahkan sering pihak Malaysia, dengan kekuatan militernya melakukan tindakan provokasi<sup>6</sup> Berulang kali militer Malaysia melakukan tindakan provokasi dengan memasuki wilayah perairan Indonesia. Peristiwa itu dapat diartikan sebagai penjajagan sejauh apa kekuatan militer Indonesia mampu menjaga pulau-pulau itu. Hal ini dapat juga berarti bahwa kekuatan militer Indonesia tidak lagi memiliki daya gentar sehingga tidak ada yang perlu ditakuti, hingga Negara tetangga pun berani berulah mengusik kedaulatan wilayah kita di daerah perbatasan dengan cara menerobos masuk ke wilayah perairan Indonesia di sekitar blok Ambalat. Situasi ini cukup jelas untuk menunjukkan bahwa Indonesia sekarang tidak lagi memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh untuk menjaga serta mempertahankan kedaulatan dari pihak luar yang merugikan. Lemahnya kekuatan militer Indonesia ini bahkan dipakai sebagai celah yang dimanfaatkan Malaysia untuk secara agresif berusaha mengambil alih blok ambalat tersebut.

Pengalaman Negara lain seperti Irak misalnya, sebuah negeri kaya Minyak yang memilih tidak mau tunduk kepada Amerika membuatnya menjadi korban

---

<sup>6</sup> Berulang kali militer Malaysia melakukan tindakan provokasi dengan memasuki wilayah perairan Indonesia. Peristiwa itu dapat diartikan sebagai penjajagan sejauh apa kekuatan militer Indonesia mampu menjaga pulau-pulau itu. Hal ini dapat juga berarti bahwa kekuatan militer Indonesia tidak lagi memiliki daya gentar sehingga tidak ada yang perlu ditakuti, hingga Negara tetangga pun berani berulah mengusik kedaulatan wilayah kita di daerah perbatasan.

strategi *pre-emptive strike* Amerika. Dengan dalih serangan Amerika itu untuk menghancurkan teroris. Padahal banyak analis internasional sudah mengatakan bahwa Amerika hanya mengamankan pasokan minyaknya dari sebuah Negara yang dipimpin rezim anti-Amerika.

Disatu sisi seruan PBB serta kecaman dunia internasional pun diabaikan oleh Amerika Serikat. Pelajaran penting yang bisa diambil dari dua kasus kontemporer yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa mengharap banyak akan keselamatan dan kedaulatan negaranya, bahkan dari PBB sekalipun. Satu-satunya jalan adalah dengan mengandalkan kekuatan militer sendiri untuk menghadapi segala kemungkinan. Termasuk dalam menghadapi agresor dari luar yang mengancam kedaulatan serta kepentingan nasional.

Oleh karena itu penulis melihat bahwa pentingnya belajar kembali dari kasus konfrontasi bersenjata merebut Irian Barat ini adalah agar bisa memahami betapa pentingnya sebuah Negara memiliki kekuatan militer yang tangguh. Kekuatan militer memiliki arti strategis terkait pemenuhan kepentingan nasional sebuah Negara. Kepentingan sebuah Negara akan selalu berhadapan dengan kepentingan yang diinginkan oleh Negara lain pula. Disinilah terjadi pertarungan atau kontestasi politik untuk mewujudkan kepentingan itu. Negara yang lemah akan menjadi mangsa dari kepentingan Negara yang kuat. Berhadapan dengan Negara lain di pentas politik global hanya dengan mengandalkan ketajaman pena dan kengototan suara tidak akan serta merta membuat kepentingan yang diusahakan oleh sebuah Negara akan tercapai. Kekuatan militer yang tangguh adalah kuncinya. Seperti yang juga pernah diungkapkan Pemimpin besar

China, Mao Zedong, bahwa “*kekuatan muncul dari ujung laras senapan*”.

Mungkin orang masih akan tetap sulit memahami kenapa semua daya dan tenaga dihabiskan hanya untuk pembangunan kekuatan militer Negara. Jawabannya hanya satu, kesemuanya ini demi kepentingan, harga diri, kedaulatan dan kehormatan sebuah bangsa yang mengaku besar dan berdaulat. Dari refleksi itulah uraian dalam buku ini akan memperjelas tentang; Bagaimanakah pembangunan kekuatan militer Indonesia dilakukan pada masa perjuangan merebut Irian Barat dan apa dampaknya di dalam perjuangan merebut Irian Barat saat itu.

## Arti Strategis Kekuatan Militer Negara

*“Always keep up a good and strong army. You won’t have better friend, and you can’t survive without it. Our neighbours want nothing more, than to bring about our ruin. I am aware of their intentions and you will come to know them as well. Always put your trust in a good army. And in hard cash, They are the thing which keep rules in peace and security” (Frederick William I)*<sup>7</sup>

Untuk memahai arti strategis dari kepemilikan kekuatan militer bagi sebuah Negara sebelumnya kita harus mengenal lebih dulu apakah militer itu, bagaimana sifat-sifatnya, apa kedudukannya di dalam kehidupan Negara serta apa relevansinya di dalam kehadiran sebuah Negara.

---

<sup>7</sup> Crishtoper Duffy (1988), *Frederick The Great : A Military Life* (Biografi Frederick William I). London: Routledge. Hal 8

Militer dalam sebuah Negara adalah sebuah organisasi yang khusus ditunjuk untuk mendapat hak memakai kekerasan bersenjata dan berbagai perangkat pendukungnya. Organisasi ini sering juga disebut dengan angkatan bersenjata<sup>8</sup>. Lebih lanjut lagi, militer/angkatan bersenjata adalah sebuah institusi nasional yang dengan kemampuannya dirancang untuk melancarkan agresi ke luar atau untuk perlindungan terhadap ancaman yang berasal dari luar. Singkatnya, ia dirancang untuk digunakan dalam peristiwa pertikaian internasional atau menggunakan ungkapan dari militer itu sendiri bahwa ia dirancang untuk “melawan musuh dari luar”<sup>9</sup>.

Tentang sifat yang melekat dalam angkatan bersenjata ini secara historis, prajurit/militer professional seharusnya tidak menaruh minat terhadap masalah-masalah dalam negeri, dan sebaliknya memusatkan kepada masalah-masalah eksternal Negara<sup>10</sup>. Militer professional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan kemandirian, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan ketertiban, hierarki dan pembagian tugas serta pengakuan atas *nation-state* sebagai bentuk tertinggi

---

<sup>8</sup> Polisi termasuk di dalam angkatan bersenjata ini, karena polisi juga memiliki hak untuk memakai kekerasan bersenjata. Namun polisi lebih bersifat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan dirancang untuk menghadapi serangan agresi bersenjata dari pihak luar Negara.

<sup>9</sup> Karl Liebkecht (2004), *Militerisme dan Anti Militerisme*. Yogyakarta : IRE Press Yogyakarta. Hal 18.

<sup>10</sup> Huntington, “The Commons Defense”, Richard Challener, “Admiral, General and American Foreign Policy”, Princeton University Press, New Jersey, 1973; Peter Karsten, “The Naval Aristocracy”, New York, MacMillan, 1972. Dikutip dalam Amos Perlmutter (1984), *Militer dan Politik*. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali. Hal.13

organisasi politik. Negara dikatakan kuat jika ada kekuatan militer yang kuat, tetapi kekuatan militer ini adalah bagian dari perangkat negara<sup>11</sup>.

Lebih jauh lagi fungsi militer profesional dalam sebuah Negara memiliki beberapa prinsip. Menurut Dr. Dietrich Genschel, prinsip-prinsip dimaksud beberapa diantaranya adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan.
2. Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis.
3. Militer mengikuti pedoman politik yang digariskan.
4. Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi
5. Militer bersifat netral dalam politik.
6. Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum.

Lalu mengapa sebuah Negara membutuhkan kehadiran kekuatan militer dan apa relevansinya? Jawaban yang paling masuk akal untuk menjawab pertanyaan dasar ini adalah karena pada hakikatnya kebutuhan utama negara di dalam interaksinya dengan negara lain adalah rasa aman. Ada 2 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Aktualisasi

---

<sup>11</sup> Tulisan Sutoro Eko. Dengan judul: "Meletakkan Militer Pada Posisi Yang Sebenarnya" Dapat dilihat pada [http://www.ireyogya.org/sutoro/reformasi\\_militer.pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/reformasi_militer.pdf)

<sup>12</sup> Tim Kontras (2005), *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia (Catatan KontraS Paska Perubahan Regim 1998)*. Jakarta: Penerbit KontraS. Hal. 20-22.

kehidupan bernegara sesungguhnya tidak lain adalah membangun keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) secara simultan. Dinamika internal dalam suatu negara maupun dinamika eksternal berupa hubungan bilateral maupun multilateral menuntut penyelenggaraan keamanan nasional dalam dan oleh suatu negara secara komprehensif<sup>13</sup>.

Keamanan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Dengan adanya keamanan dan rasa aman yang terjamin, manusia dapat meneruskan kehidupan untuk terus berusaha, berkembang dan berkarya sehingga mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkannya. Tanpa adanya rasa aman, sebuah negara tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraannya. Bahkan keberadaan negara itu akan terancam musnah. Kepada negara inilah individu-individu yang ada di dalamnya memberi legitimasi untuk menjaga ketertiban dan mengusahakan pertahanan agar aman dari serangan yang dilakukan pihak luar dari kelompoknya.

Dengan kata lain kebutuhan akan keamanan adalah sebuah *public goods* dan menjadi sebuah *raison d'etre* (alasan utama) pula dari kehadiran sebuah Negara. Fungsi akan perlindungan keamanan warga Negara inilah yang menjadi alasan klasik untuk menjustifikasi kehadiran sebuah institusi negara, yang mana angkatan bersenjata menjadi instrumen sehingga mendapat kewenangan. Hal ini selanjutnya akan menjadi landasan berfikir yang menjadi justifikasi adanya monopoli penggunaan kekerasan secara sah oleh Negara. Disini angkatan bersenjata atau militerlah institusi yang kemudian

---

<sup>13</sup> Naskah akademik RUU tentang Keamanan Nasional (17 Maret 2011)

mendapat hak untuk menjalankan fungsi tersebut<sup>14</sup>, untuk mewujudkan keamanan nasional. Jadi mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan sebuah elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan Negara atau di dalam kehadiran konsep Negara bangsa itu sendiri<sup>15</sup> yakni salah satunya mewujudkan keamanan nasional (selain kesejahteraan nasional).

Ada tiga ciri penting dari pengertian keamanan nasional itu sendiri. Yaitu: *pertama*, identifikasi “nasional” sebagai Negara; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah Negara; dan *ketiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Akhirnya Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap Negara adalah bagaimana membangun kekuatan militer untuk dapat menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeated*) suatu serangan dari luar<sup>16</sup>.

Sehingga pada akhirnya kekuatan militer negara bermuara untuk mencapai 3 tujuan fundamental, yaitu perlindungan teritorial, kedaulatan, keselamatan atau keamanan bangsa dan negara dari pihak luar<sup>17</sup>. Dalam

---

<sup>14</sup> Cornelis Lay (2005), “Menjaring Bayang-Bayang: Dilema Pengawasan Intelijen Dalam Masyarakat Demokratis”, dalam Andi Wijayanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung. Hal 217-218.

<sup>15</sup> T.Hari Prihartono, at al. (2006), *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta : Propatria Institute. Hal. 3

<sup>16</sup> Dikuti dari Tulisan Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF (*Think and Act for National Defense*). Judul : “Pertahanan Negara adalah cermin dari Martabat Bangsa dan Negara”, dilihat pada <http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara>, diakses tanggal 10 Juni 2010.

<sup>17</sup> Edi Prasetyono, “Strategi Pertahanan: Dimensi Militer dan Doktrin.” Disampaikan pada Workshop Strategic Defence Review, Departemen Pertahanan, 16-17 Desember 2002 Atau lihat pada : <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Strategi%20Pertahanan:%20Dimensi%20Militer%20dan%20Doktrin%20%20Edy%20Prasetyono.pdf>

konsep tradisional, secara sederhana menafsirkan keamanan sebagai suasana bebas dari segala bentuk anacamannya bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippman merangkum kecenderungan ini dengan sebuah pernyataan,

*“Suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital)...dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”<sup>18</sup>*

Keamanan nasional (*national security*) sendiri merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Istilah nasional mengandung makna yang luas, tidak hanya mencakup Negara sebagai subyek maupun obyek tunggal, tetapi juga entitas yang ada di alamnya<sup>19</sup>. Buzan menuliskan bahwa dalam kehadiran sebuah Negara adalah perwujudan dari 3 (tiga) hal, yakni *the Idea of the state* (gagasan tentang ide sebuah entitas negara), *the physical base of the state* (wilayah dan penduduk yang merepresentasikan eksistensi kehadiran negara secara fisik) dan *the institutional expression of the state* (organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam negara). Melalui perwujudan ini kemudian Negara dipandang sebagai objek utama pusat dalam keamanan. Negara merupakan sebuah unit politik kolektif yang

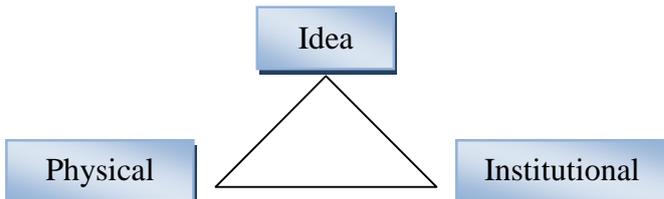
---

<sup>18</sup> Dr Bantoro Anggoro, seperti yang termuat dalam buku Muhammad Yamin & Sebastian Matengkar (2006), *Intelijen Indonesia (Towards Professional Intelligen)*. Jakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 21-22

<sup>19</sup> T.Hari Prihatono, et al. (2007), *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan kebijakan*. Jakarta : PROPATRIA Institute. Hal. 57.

menjadi pusat dari segala ancaman keamanan. Ancaman terhadap salah satu dari tiga hal ini adalah ancaman terhadap keamanan seluruh entitas yang ada di dalam Negara tersebut<sup>20</sup>.

Gambar 1.1 : Diagram Konsep Perwujudan Negara menurut Buzan



Sumber :Barry Buzan (1990), *People state and Fear*. Boulder,Colorado: Lynce Rienner Publisher. Hal 57-96

Ketika sebuah ancaman dari luar menyerang salah satu dari 3 hal yang merepresentasikan kehadiran Negara seperti yang diungkapkan Buzan di atas, maka disinilah diperlukan kekuatan militer untuk sarana pertahanan dalam menghalau atau menangkis ancaman keamanan yang ditujukan pada Negara itu. Buzan juga mengambil kesimpulan bahwa kemampuan sebuah Negara untuk menangkis segala macam ancaman yang ditujukan kepada berbagai bentuk perwujudan sebuah Negara (*Idea, physical* atau *institusional*) adalah perbedaan Negara kuat atau Negara lemah. Dalam Negara yang kuat keamanan nasional dilihat sebagai terminologi utama dimana komponen-komponen representasi kehadiran sebuah Negara dapat melindungi dari dari ancaman serta

---

<sup>20</sup> Lihat Barry Buzan (1990), *People state and Fear*. Boulder,Colorado: Lynce Rienner Publisher. Hal 57-96

intervensi yang berasal dari luar. Negara yang lemah adalah sebaliknya, yaitu ketidak mampuan menghadapi ancaman yang mengarah kepada representasi kehadiran sebuah Negara<sup>21</sup>.

Ancaman terhadap keamanan nasional suatu Negara menurut Richard Ullman, dapat juga dipahami atau didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian peristiwa yang dapat memberi ancaman: (1) secara langsung maupun tidak langsung untuk membahayakan kehidupan masyarakat di suatu Negara, dan (2) ancaman yang berupa membuat takut suatu Negara hingga membatasi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah suatu Negara atau berbagai entitas yang ada di Negara tersebut<sup>22</sup>. Ancaman terhadap suatu Negara biasanya hadir ketika terjadi benturan antar kepentingan yang melingkupi hubungan politik nasional sebuah Negara dengan Negara lain. Jadi politik nasional yang mengantarkan rakyat kepada tujuan atau cita-cita nasionalnya tidak akan selalu aman dari penentangan yang dilakukan Negara-negara lain. Baik itu politik nasional yang agresif ataupun politik nasional yang cinta damai.

Oleh karena tidaklah mungkin sebuah politik nasional dapat mengantarkan rakyatnya kepada sebuah tujuan nasional jika tidak ada “kekuatan” untuk menjaga keamanannya<sup>23</sup>. Secara umum pengertian keamanan nasional mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jaminan terselenggaranya kepentingan utama nasional (*national vital interest*) dan stabilitas nasional. Dimasa mendatang pun

---

<sup>21</sup> Ibid., Hal 100.

<sup>22</sup> Richard Ullman (1983), “*Redefining Security*”, dalam *International Security*, Vol.8, no 1, hal.133. Dikutip dalam T.Hari Prihatono, et al. Ibid., Hal 3

<sup>23</sup> A.H Nasution (1955), *Catatan-Catatan Sekitar Politik Militer Indonesia*. Jakarta: C.V Pembimbing. Hal 32.

kedua komponen itu akan tetap menjadi bagian dari keamanan nasional sebuah negara<sup>24</sup>. Akibat terburuk dari ketidak-mampuan mengusahakan keamanan nasional ini bagi sebuah Negara adalah hilangnya sebagian atau keseluruhan sebuah identitas Negara. Jadi perlunya kekuatan militer dalam sistem pertahanan nasional adalah masalah sangat mendasar yang langsung menyangkut *survival of the state* atau *survival of the nation* (*Keselamatan Negara*)<sup>25</sup>.

Menurut Frederick L. Schuman, *survival of the state* atau keselamatan negara adalah hukum dasar dari kehidupan Negara<sup>26</sup>. Pembuat kebijakan nasional harus menempatkan diri mereka di jalan terbaik yang dapat mereka wujudkan, mengukur rencana dan kekuatan Negara lain, menghitung konsekuensi dari pilihan alternatif, mendefinisikan kepentingan nasional melalui kompromi yang seperlunya, berdasarkan apa yang dikehendaki dan dimungkinkan<sup>27</sup>.

Selanjutnya menurut Charles Tilly Negara melakukan empat aktifitas terkait legitimasi atas pemakaian kekerasan (kekuatan militer) ini, yaitu<sup>28</sup> :

---

<sup>24</sup> Wahyono S.K. (2009), *Op.Cit.*, Hal 161.

<sup>25</sup> Tulisan Edi Prasetyono (2005), "Reinterpretasi Sistem Pertahanan Nasional Indonesia", Dalam buku Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies. Hal 80.

<sup>26</sup> Sejalan dengan pemikiran Sun Tzu (ahli filosofi perang dari China) yang mengatakan "*Seni perang (militer) sangat penting bagi Negara. Ini menyangkut masalah hidup dan mati, satu jalan (tao) menuju keselamatan atau kehancuran*"

<sup>27</sup> Frederick L Schuman (1958), *International Politics* (International Studen Edition: Sixth Edition). New York & Tokyo: McGraw-Hill Book Company, Inc & Kogakusha Co., Ltd. Hal. 281.

<sup>28</sup> Charles Tilly (1985), "*War Making and State Making as Organized Crime*," dalam Peter Evans, Dietrich Reuschmeyer and Theda Skocpol (ed), *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 181.

1. *War Making : Eliminating or neutralizing their own rivals outside the territories in which they have clear and continuous priority as wielders of force.*
2. *State Making : Eliminating or neutralizing their rivals inside those territories.*
3. *Protection : Eliminating or neutralizing the enemies of their clients.*
4. *Extraction : Acquiring the means of carrying out the first three activities, war making, state making, and protection*

Keempat aktifitas itu bermuara kepada persiapan Negara untuk melakukan perang. Berbagai macam kecenderungan persiapan perang secara sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan konsolidasi territorial, pemusatan, pembedaan dalam instrument pemerintahan dan monopoli dari pemakaian kekerasan, adalah semuanya itu proses fundamental dari pembentukan Negara. Perang menciptakan Negara dan Negara menciptakan perang (*War made the state and the state made war*)<sup>29</sup>.

Oleh karena semua alasan itu maka adalah sebuah hal yang alami bahkan seharusnya jika sebuah Negara berdiri ikut berdiri pula kekuatan militer yang mengikutinya. Negara dengan kemampuannya kemudian memakai kekuatan bersenjata (militer) itu untuk mengawasi perbatasan serta juga mengirimkan pesan pada negara-negara lain untuk menghormati kedaulatan wilayahnya. Legitimasi pemakaian kekerasan fisik ini

---

<sup>29</sup> Charles Tilly (1975), "Reflections on the History of European State-Making," dalam Charles Tilly (ed.), *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, N.J: Princeton University Press. Hal 42.

termasuk ke dalam segala hal yang berhubungan dengan ancaman yang mengarah pada Negara, tindakan-tindakan umum yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan potensial pada sebuah Negara. Legitimasi pemakaian kekerasan inilah yang dipusatkan pemakaiannya pada organisasi bersenjata milik Negara (angkatan perang). Pemakaian kekerasan bersenjata ini juga merupakan sebuah bentuk kepanjangan dari kesuksesan sebuah Negara dalam mengatasi rival atau lawan-lawannya keluar dari teritorial yang diklaimnya<sup>30</sup>.

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa ancaman terhadap kedaulatan, keselamatan dan keamanan suatu Negara biasanya terjadi akibat pertentangan politik yang berkaitan dengan kepentingan nasional dengan Negara yang lain. Hal ini lah yang kemudian tetap selalu akan bisa berkembang menjadi konflik bahkan dengan memakai kekuatan bersenjata atau perang. Kemajuan cara berpikir manusia maupun hukum internasional sama sekali tidak mampu mengurangi nafsu agresif dan menjaga agar pertentangan antarnegara tetap diatasi dengan cara damai atau diplomasi saja<sup>31</sup>.

Banyu Perwita, menegaskan bahwa kepentingan nasional (*national interest*) sesungguhnya hadir dalam hubungan saling mempengaruhi dalam tarik ulur lingkungan politik, ekonomi, sosial, dll dalam ruang domestik dan internasional. Kepentingan nasional menjadi titik pijak dalam merumuskan strategi nasional (*national*

---

<sup>30</sup> Lihat lebih lengkap tentang hubungan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah Negara terkait eksistensi kelahiran sebuah Negara pada Charles Tilly (1990), *Coercion, Capital and European States (AD 990-1992)*. Malden: Blackwell Publishing. Bab 1 (hal 1-38)

<sup>31</sup> Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.*, Hal. 2

*strategy*) yang kemudian diturunkan dalam sistem keamanan nasional (*national security system*). Selanjutnya di dalam sistem keamanan nasional tadi diarahkan untuk mencapai pemenuhan kepentingan nasional (keamanan maupun kesejahteraan) yang bertumpu pada tiga dimensi sekaligus alat utama negara (*state power exercised*) yakni *diplomacy policy*, *economic policy* (baik negative atau positif) dan *military/defense policy* yang dipadukan menjadi sebuah instrumen *national security policy*<sup>32</sup>.

Dimensi kebijakan militer atau pertahanan memainkan fungsi strategis di samping dimensi lain seperti diplomasi dan ekonomi. Sebab Pertikaian fisik atau konflik bersenjata antar Negara adalah suatu hal yang sering tidak dapat dihindarkan untuk terjadi di dalam sebuah perselisihan politik antar bangsa atau Negara. Pertikaian fisik antar Negara ini terjadi karena masing-masing Negara saling berpendirian teguh demi mewujudkan cita-cita atau kepentingan nasionalnya. Perselisihan karena benturan kepentingan nasional ini kemudian menjadi sebuah ancaman bagi masing-masing pihak yang berselisih. Jika berbagai macam perundingan, kompromi serta diplomasi tidak lagi menghasilkan jalan keluar ditambah keinginan kuat dari masing-masing pihak yang teguh dengan pendirian serta sikapnya, membuat mereka akhirnya memutuskan bahwa hanya dengan kekerasan atau penyelesaian dengan kekuatan militerlah yang bisa menjadi satu-satunya jalan untuk memecah kebuntuan serta mewujudkan kehendak atau kepentingan politik suatu negara.

---

<sup>32</sup> Dikutip dari Erwin Endaryanta (2008), "*POLA PERTAHANAN MARITIM INDONESIA*", Studi Implementasi Doktrin Militer TNI AL dalam kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia di Selat Malaka, thesis tidak dipublikasikan, magister studi pembangunan alur studi, Management Pertahanan, Cranfield - UK-ITB.

## Pembangunan Kekuatan Militer Negara

Bagaimana memahami kekuatan militer itu dibangun sarana pertahanan dan keamanan terhadap serangan dari pihak luar? disini yang patut ditekankan adalah bahwa pembangunan kekuatan militer (*force build-up*) sangatlah berbeda dengan pembangunan kekuatan militer sebagai basis kekuasaan penguasa (*power build-up*). Sasaran pembangunan kekuasaan adalah ketahanan nasional dalam arti luas, meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanannya. Sedangkan pembangunan kekuatan militer hanya berfokus pada pembangunan angkatan perang sebagai alat pertahanan, penangkal strategis dan penggetar (*deterrence*)<sup>33</sup>.

Jadi penting untuk dijelaskan sejak awal dalam teori pembangunan kekuatan militer ini yang akan ditulis, yaitu pembangunan kekuatan militer yang dimaksudkan untuk dirancang sebagai persiapan untuk menghadapi serangan dari pihak luar yang mengancam kedaulatan sebuah bangsa atau Negara. Bukan dalam pengertian pembangunan kekuatan militer yang ditujukan untuk memperkuat kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Dimana nantinya hal itu akan meningkatkan kekuatan posisi tawar sebuah Negara (*bargaining power*) terkait usaha pencapaian kepentingan nasionalnya ketika berhadapan dengan Negara lain yang berseberangan. *Bargaining power* yang dimaksudkan adalah bahwa dalam usaha mencapai kepentingan nasionalnya suatu Negara tidak hanya melakukan tindakan politik yang bersifat damai misal diplomasi, tapi juga dengan tekanan-tekanan yang bermanfaat untuk memaksa Negara lain<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Wahyono S.K. *Op. Cit.*, Hal.74

<sup>34</sup>Letjend TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.* Hal.11

Sedangkan pengertian *deterrence* secara esensial berarti kemampuan mencegah berbagai tipe ancaman yang mungkin dapat terjadi dari berbagai hal. Harapan pada kemampuan ini kemudian adalah jika terjadi sebuah konfrontasi/ancaman dengan pihak lain yang berseberangan maka kemampuan ini akan menghalangi atau mengubah haluan pihak yang berseberangan itu karena pengaruh rasa hormat atau segan kepadanya yang memiliki kemampuan itu<sup>35</sup>. Besar kecilnya kekuatan militer yang dihadirkan oleh sebuah Negara juga akan menjadi *deterrent effect* (pengaruh) terhadap berani tidaknya kekuatan asing masuk untuk mengusik atau mengancam kedaulatan wilayah sebuah Negara. Tentang pentingnya keberadaan kemampuan *deterrence* ini Frederick L. Schuman juga mengatakan<sup>36</sup> :

*“Wajar, jika Negara yang tidak mampu melaksanakan perang dengan efektif (tidak punya kemampuan tempur) tidak dapat mengharapkan negara-negara lain untuk memenuhi tuntutananya, memedulikan keinginan-keinginannya atau bahkan mengakui haknya untuk bertahan hidup”*

Sedangkan di dalam usaha pemenuhan kepentingan nasional kekuatan *deterrence* ini dimaksudkan sebagai penggunaan ancaman agar dapat memaksa lawan bertindak sesuai dengan yang diinginkan<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Gordon A. Craig, et.al (Edited by William W. Kaufman). 1956. *Military Policy and Nasionnal Security*. Princenton-New Jersey : Princenton University Press. Hal.17.

<sup>36</sup>Frederick L. Schuman 1958. *Op. Cit.* Hal 274.

<sup>37</sup> Keith Krause (1999), “Rationality and Deterrence in Theory and Practice” dalam Craig A. Snyder (ed), *Contemporary Security and Strategy*. London: MacMillan Press. Hal.121.

Jadi adalah sebuah hal yang wajar jika sebuah Negara menegakkan kepentingan nasionalnya terhadap Negara-negara lain dengan menggunakan kekuasaan (*power*) melalui kekuatan militernya. Baik dengan cara mempertahankan kekuasaan, atau meningkatkan kekuasaan bahkan hanya untuk sekedar mendemonstrasikan kekuasaan yang dimiliki Negara itu<sup>38</sup>. Seperti yang diungkapkan Von Clausewitz<sup>39</sup> dalam bukunya *Vom Kriege*, mengatakan bahwa perang pada akhirnya adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suatu Negara untuk memaksakan kehendak atau kepentingannya terhadap Negara lain<sup>40</sup>. Perang menurut Von Clausewitz juga adalah kelanjutan politik dengan cara lain, yakni dengan pemaksaan bersenjata.

Maka kita lihat bahwa perang atau ancaman penggunaan kekuatan militer oleh suatu Negara terhadap Negara lain bukan saja merupakan suatu tindakan politik. Namun sesungguhnya juga alat politik (dengan memakai kekuatan militer) yang merupakan sebuah kelanjutan dari pergaulan politik yang memakai cara lain<sup>41</sup>. Hal itu sangat mungkin terjadi jika jalan diplomasi yang ditempuh tidak berhasil mencapai kata sepakat seperti yang diinginkan oleh negara yang saling berseteru dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh karenanya para penguasa di masing-masing Negara tersebut akan selalu melihat

---

<sup>38</sup> Wahyono S.K., *Op.Cit.*, Hal.52

<sup>39</sup> *Clausewitz* (dalam Suryohadiprojo, 2005 : 14), adalah seorang perwira Prussia yang hidup di zaman Napoleon Bonaparte. Clausewitz dipandang sebagai peletak landasan ilmu perang modern.

<sup>40</sup> Carl Von Clausewitz (1976), *On War* (diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari Judul asli "*Vom Kriege*" oleh Michael Howard dan Peter Paret). Princeton University Press .

<sup>41</sup> Carl Von Clausewitz (1954), *Tentang Perang* (Penerjemah Mayor inf. R. Soesatyo). Jakarta : Bagian Penerbit Buku Ketentaraan "PEMBIMBING". Hal. 27.

perang sebagai cara sah untuk menyelesaikan perselisihan antar Negara<sup>42</sup>, dengan kata lain perang akan menjadi suatu kelanjutan politik dengan cara lain. Dari uraian ini jelas bahwa kemungkinan serangan yang dilakukan Negara lain terkait isu-isu kepentingan nasional akan sangat mungkin terjadi<sup>43</sup>.

Maka tidak ada jalan lain bagi sebuah Negara kecuali harus mempersiapkan kekuatan militernya. Kesiap-siagaan kekuatan militer sebuah negaralah yang akan mampu mendukung kebijakan politik serta kebijakan diplomasi suatu Negara dalam mewujudkan keamanan dan kepentingan nasionalnya serta menghalau setiap kemungkinan ancaman. Sejak awal Carr memperingatkan bahwa setiap Negara harus selalu siaga dan waspada menghadapi setiap ancaman, baik dari dalam ataupun dari luar, karena: *“War lurks in the background of international politics just a revolution lurks in the background of domestic politics”* (Perang mengintai di belakang politik Internasional sebagaimana revolusi mengintai di balik politik domestik)<sup>44</sup>. Dalam politik internasional

---

<sup>42</sup> Contoh paling akhir dapat kita pada invasi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap Negara Irak. Invasi terjadi karena pemerintah Irak memilih berseberangan dengan pemerintah Amerika dalam hal garis politik. Hingga akhirnya Amerika memilih untuk menjalankan seperti yang diutarakan oleh Von Clausewitz, yakni kelanjutan politik dengan cara lain yaitu dengan paksaan kekuatan bersenjata. Dan pada akhirnya Irak yang tidak siap secara militer kalah dan harus menerima pasukan pendudukan Amerika Serikat berkuasa secara politik di wilayah negaranya. Invasi ke Irak juga merupakan bukti nyata bahwa peran PBB dapat diabaikan begitu saja oleh negara kuat. Invasi ke Irak adalah contoh mutakhir betapa negara kuat tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk mengamankan kepentingannya, walaupun pada saat yang sama mereka juga menempuh langkah diplomasi

<sup>43</sup> Paul Hirst (2004), *War and Power in the 21<sup>st</sup> Century*. Jakarta: Murai Kencana. Hal. 92-93

<sup>44</sup> E.H. Carr, *The Twenty Years Crisis*, hal 109. Dikutip Oleh Wahyono S.K. *Op.Cit.*, Hal.52

digambarkan sebagai – yang paling utama – “politik kekuasaan (*power politic*)<sup>45</sup>”, yaitu suatu arena persaingan, konflik, dan perang antara Negara-negara dimana masalah-masalah dasar yang sama dalam mempertahankan kepentingan nasional dan dalam menjamin kelangsungan hidup Negara berulang-ulang sendiri terus menerus<sup>46</sup>.

Kekuatan militer sebuah Negara akan mempengaruhi juga kekuatan diplomasi yang dimiliki oleh Negara itu. Bahkan mungkin dengan kekuatan militer yang cukup sebuah Negara tidak perlu untuk berunding dan bisa memaksakan kehendaknya terhadap Negara lain. Pemaksaan kekerasan oleh suatu Negara bisa diarahkan untuk memukul mundur atau mengeluarkan, melakukan penetrasi sekaligus menduduki, merampas atau membasmi, melukai atau membatasi. Kesemuanya hanya bisa dicapai jika kekuatan militer sebuah Negara “cukup” mampu untuk melakukan, cukup didasarkan pada kemampuan atau kekuatan militer yang dimiliki oleh musuhnya. Cara inilah yang disebut *diplomacy of violence* (diplomasi berbasis kekerasan)<sup>47</sup>.

Diplomasi sendiri adalah suatu jalan untuk membuka sumber-sumber kekuatan nasional yang terpendam dan mengolah sepenuhnya agar dapat dipakai

---

<sup>45</sup> Seperti yang juga diungkapkan oleh Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* bahwa “It cannot be denied that through historic time, regardless of social, economic and political conditions states have met each other in contest for power” (tidak bisa diabaikan bahwa sepanjang sejarah terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik, Negara-negara akan saling bertemu untuk persaingan demi kekuasaan)

<sup>46</sup> Robert Jackson, & Georg Sorensen (2005), *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. Hal 88.

<sup>47</sup> Thomas C. Schelling (2008), “Arms and Influence”. Dalam Thomas G. Mahken & Joseph A. Maiolo (ed) *Strategic Studies*. New York : Routledge. Hal 86.

di dalam kenyataan-kenyataan politik suatu negara<sup>48</sup>. Dijelaskan lebih lanjut oleh Schuman, bahwa tugas dari diplomasi adalah menjaga agar bubuk mesiu tetap kering (tidak terjadi perang), memenangkan aliansi serta mempengaruhi orang lain. Bagaimana caranya agar sukses berdiplomasi yaitu dengan memelihara keberadaan kekuatan militer yang besar dan tangguh lebih daripada rival-rival yang dihadapi serta tidak lupa membangun aliansi dengan kekuatan lain melawan musuh potensialnya itu agar bisa menjaganya tetap terisolasi<sup>49</sup>.

Penggabungan antara keduanya, -diplomasi dan kekuatan militer-, adalah seni membawakan unsur-unsur kekuatan nasional yang berbagai macam, untuk ikut menanggung akibat di dalam situasi internasional yang menyangkut kepentingan nasional<sup>50</sup>. Antara kekuatan militer dan diplomasi adalah dua buah hal yang saling menunjang satu sama lain. Tanpa kapabilitas kekuatan militer yang cukup kuat untuk terjun dalam diplomasi maka hal itu hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak menguntungkan. Khususnya bagi Negara yang lemah dalam hal kekuatannya militernya, sebab Negara yang kuat akan cenderung mengintimidasi bahkan menekan Negara yang lebih lemah.

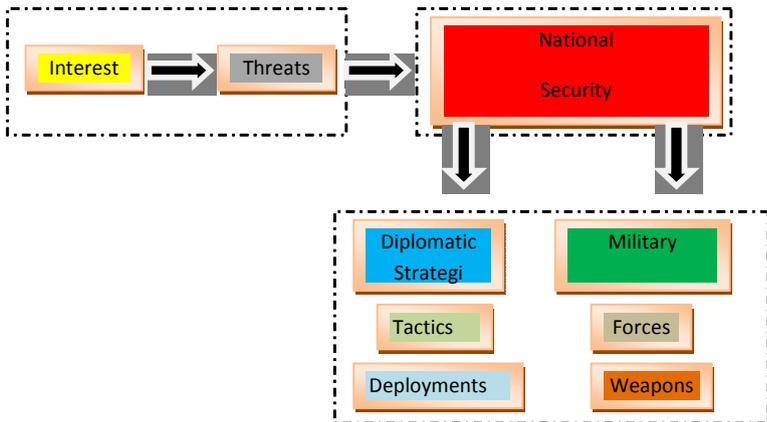
---

<sup>48</sup> K.J Holsti (1988), *Politik Internasional (Kerangka untuk analisis)* Jilid 2. Jakarta : Penerbit Erlangga. Hal. 127.

<sup>49</sup> Frederick L. Schuman, *Op. Cit.*, hal 279.

<sup>50</sup> M. Wibowo (2009), *Malaysia Membungkam Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Solomon. Hal 35.

Gambar 1.2 : Alur National Security Policy



Sumber : Tim Propartia Institute (2006) *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta : Propartia Institute. Hal. xlvi

Dalam pembangunan kekuatan militer ada 2 hal yang menjadi fokus kajian, yaitu pada *force* (kekuatan personil / *manpower*) dan *weapon* (kepemilikan persenjataan / *arsenal*). Buku ini akan lebih fokus kepada pembangunan kekuatan persenjataan atau pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Untuk memahami sebuah Negara dalam membangun kekuatan persenjataan militernya, ada tiga pertanyaan penting untuk menuntunnya, yaitu: *apa yang dipertahankan atau dicapai? bagaimana caranya? serta dengan apa mempertahankannya?*<sup>51</sup>. Tiga pertanyaan penuntun dasar inilah yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melihat bagaimana pembangunan kekuatan militer yang dilakukan Indonesia pada masa perjuangan merebut Irian Barat.

<sup>51</sup> Departemen Pertahanan RI (2007), *Buku Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Dephan RI. Hal 1-2

*Apa yang Hendak Dipertahankan atau Dicapai?*

Dalam masa perjuangan merebut kembali wilayah Irian Barat yang menjadi *interest* atau tujuan kepentingan nasional Indonesia adalah status kepemilikan atau klaim wilayah wilayah Irian Barat yang sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda saat KMB belum terselesaikan. Belanda dengan pasukan militernya masih berkuasa di wilayah Irian Barat dan tidak ingin pergi dari wilayah itu. Inilah yang kemudian dianggap sebagai *threats* atau ancaman yang menghalangi kepentingan nasional Indonesia.

Klaim sebuah Negara atas wilayah teritorialnya bisa berasal dari berbagai macam faktor yang dapat diidentifikasi, tapi kebanyakan klaim sebuah Negara atas batas teritorialnya berasal dari produk sejarah, budaya dan ekonomi. Untuk memahami sebuah konfrontasi antar Negara, perang biasanya terjadi kebanyakan dimulai dari masalah perbatasan ini. Klaim atas teritorial dan status lokasi wilayah mungkin tidak dapat diselesaikan secara damai tetapi malah menggunakan kekuatan bersenjata. Secara umum juga perselisihan mengenai wilayah ini didasarkan dari beberapa faktor, yakni : kepentingan kepemilikan geografi suatu wilayah, keuntungan tambahan yang akan diperoleh dan juga iklim politik dunia (perebutan pengaruh disebuah wilayah dan sekitarnya)<sup>52</sup>.

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, klaim wilayah atas entitas yang bernama Negara Kesatuan Republik

---

<sup>52</sup> Tulisan Ewan W. Anderson (1999), "Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places" dalam buku Colin S. Gray dan Geoffrey Sloan (ed) *Geopolitics* (Geography and Strategi). London: Frank Cass Publishers. Hal 132-135

Indonesia adalah dari Sabang hingga Merauke. Apa yang dilakukan Indonesia terkait klaim atas wilayahnya dari Sabang hingga Merauke adalah berdasarkan sejarah kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda selama 350 tahun pendudukannya di wilayah Indonesia itu, yakni dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Irian Barat). Maka selanjutnya tujuan awal dari berdirinya Indonesia adalah melindungi eksistensi kedaulatan wilayah negaranya dari ancaman pihak asing. Ini adalah *national interest* Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya. Yang kemudian menjadi bagian dari *National Security Policy* Indonesia pada saat itu.

Klaim sebuah Negara atas wilayah teritorialnya bisa berasal dari berbagai macam faktor yang dapat diidentifikasi, tapi kebanyakan klaim sebuah Negara atas batas teritorialnya berasal dari produk sejarah, budaya dan ekonomi. Untuk memahami sebuah konfrontasi antar Negara, perang biasanya dimulai dari masalah perbatasan. klaim atas teritorial dan status lokasi wilayah mungkin tidak dapat diselesaikan secara damai tetapi malah menggunakan kekuatan bersenjata. Secara umum juga perselisihan mengenai wilayah ini didasarkan dari beberapa faktor, yakni : kepentingan kepemilikan geografi suatu wilayah, keuntungan tambahan yang akan diperoleh dan juga iklim politik dunia (perebutan pengaruh disebuah wilayah dan sekitarnya)<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

*Bagaimana cara mempertahankan?*

Ketika jalur diplomasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil dan selalu berujung pada kegagalan maka jalur konfrontasi militerlah yang dipilih Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu diperlukan pembangunan kekuatan militer yang bisa dipakai sebagai upaya *ofensif* (menyerang) kedudukan Belanda di wilayah Irian Barat dan merebut kekuasaan Belanda atas wilayah itu. Melihat wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan wilayah Irian Barat itu sendiri terpisah oleh lautan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya, maka diperlukan sebuah persenjataan yang memungkinkan Indonesia untuk melakukan operasi militer lintas laut dan udara sebagai bagian dari strategi pemakaian kekuatan militernya dalam perjuangan merebut Irian Barat melalui konfrontasi militer ini (pengadaan alutsista untuk perang secara ofensif).

Saat itu, persenjataan milik TNI yang sudah ada sebelumnya tidak akan mungkin bisa dipakai untuk melaksanakan perang model ofensif seperti yang direncanakan untuk merebut Irian Barat melalui kekuatan militer. Sebab peralatan yang dimiliki TNI didasarkan pada Doktrin perang TNI saat itu yang menganut doktrin perang teritorial atau doktrin perang wilayah yang dipakai sejak tahun 1958 (Konsep Perang Wilayah 1958<sup>54</sup>) tidak memungkinkan untuk dipakai. Karena peralatan TNI

---

<sup>54</sup> Inti dari doktrin perang wilayah ini keikutsertaan rakyat bersama-sama tentara dalam menghadapi serangan dari pihak luar. Oleh karenanya doktrin perang ini disebut juga doktrin pertahanan rakyat semesta. Strategi atau konsep pertahanan rakyat semesta ini pada mulanya berasal dari pengalaman perjuangan rakyat Indonesia dalam perang kemerdekaan 1945-1949. Konsep pertahanan model ini banyak juga dipakai oleh Negara-negara pada masa awal kemerdekaan. Biasanya dilakukan oleh Negara-negara belum berkembang yang bercorak agraris dan

yang sudah ada pada saat itu hanya dipersiapkan untuk menghadapi serangan dari luar atau perang secara *defensive*<sup>55</sup>.

Implementasi doktrin ini dalam strategi kampanye militer untuk merebut kembali wilayah Irian Barat yang terletak disebelah timur Indonesia dan juga dikelilingi oleh lautan adalah sebuah hal yang mustahil khususnya bagi pihak yang berniat ofensif. Namun disini lain doktrin ini menjadi semacam senjata atau dukungan politik dari rakyat kepada Negara untuk memobilisasi seluruh komponen rakyat dalam usaha mensukseskan ofensif militer yang akan dilakukan. Hal ini jugalah yang menjelaskan mengapa pada tanggal 1 Desember 1963 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Saat itu Trikora menjadi momentum bagi Presiden Soekarno untuk menggabungkan kekuatan militer dan dukungan sipil kedalam satu gerakan nyata membebaskan Irian Barat melalui konfrontasi militer. Salah satu poin dalam Trikora adalah perintah untuk melakukan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Perjuangan merebut Irian Barat memakai kekuatan militer ini membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil sebab menyangkut kedaulatan serta keutuhan Negara Indonesia.

---

menghadapi lawan yang punya kemampuan dan teknologi militer lebih superior. Ketika pada masa mempertahankan kemerdekaan meski wilayah yang dikuasai pemerintah pusat sangat sempit dan wilayah yang lebih luas dikuasai oleh Belanda, ternyata di daerah-daerah para komandan militer lokal tetap bisa menunjukkan kalau tentara-tentara Indonesia di daerah masih kuat kedudukannya. Keberhasilan para komandan militer lokal untuk terus melakukan perlawanan ini disebabkan adanya dukungan dari rakyat yang ikut mensupport perjuangan bersenjata yang mereka lakukan. Artinya keberhasilan perjuangan bersenjata/militer ditentukan pula oleh dukungan politik dari pihak sipil. Tanpa dukungan nyata dari pihak sipil (politik atau ekonomis) perjuangan kekuatan militer ini tidak akan pernah bisa mencapai kemenangan.

<sup>55</sup> Saafroedin Bahar, dkk (1989), *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara*. Jakarta: Penerbit Intermedia. Hal. 195.

*Dengan apa?*

Pertanyaan ini akan menuntun untuk memahami lebih jauh strategi yang dilakukan Indonesia dalam memilih serta mendapatkan senjata yang akan dipakai dalam persiapan kampanye merebut Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer. Untuk mencapai kemenangan dalam kampanye militer merebut Irian Barat itu selanjutnya diperlukan persenjataan yang dapat mendukung operasi tempur darat melintasi laut dan udara. Selain itu persenjataan yang dipersiapkan Belanda untuk mempertahankan wilayah Irian Barat juga bertumpu pada superioritas di udara maupun dilaut, yaitu mengandalkan pesawat tempur dan kapal-kapal perang. Maka adalah sebuah keharusan bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya khususnya pada bidang matra laut dan udara sebagai pendukung pasukan tempur utama yang akan dikirim untuk merebut Irian Barat.

Untuk mewujudkan kesemuanya itu didasarkan pada pertimbangan 3 faktor, yaitu tentang *faktor perubahan internasional*, *faktor geostrategi*, dan *faktor gelar operasi militer* guna memenangkan perang<sup>56</sup>. Berdasarkan faktor *perubahan Internasional* pemilihan negara atau sekutu yang dapat membantu mengembangkan kekuatan militer juga akan mempengaruhi. Khususnya pada masa perjuangan merebut Irian Barat bisa dikatakan situasi politik dunia sedang terpecah ke dalam 2 kutub besar. Yakni blok barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin

---

<sup>56</sup> Edy Prasetyono : “Kekuatan Udara dan Pertahanan Nasional”. Dapat dilihat pada <http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Kekuatan%20Udara%20dan%20Pertahanan%20Nasional%20-%20Edy%20Prasetyono.pdf>

oleh Uni Sovyet. Lebih lanjut lagi terjadi perang dingin diantara 2 negara adidaya itu. Perang dingin adalah perang perebutan hegemoni yang dilakukan oleh 2 negara adidaya pemenang Perang Dunia ke-2 yakni Amerika Serikat yang berideologi liberal dan Uni Sovyet yang berideologi komunis. Kedua Negara adidaya ini saling berlomba meluaskan pahamnya untuk mencari pengikut serta menancapkan hegemoni mereka pada Negara-negara yang ada pada saat itu.

Dalam situasi perebutan kembali wilayah Irian Barat saat itu, kontestasi perang dingin ini sangat terasa. Hingga akhirnya dalam strategi membangun kekuatan militernya Indonesia memanfaatkan situasi perang dingin ini dalam hal pengadaan alutsista yang akan dipakai dalam persiapan konfrontasi bersenjata. Sebab, pemilik teknologi tercanggih peralatan militer dimonopoli oleh 2 negara adidaya tersebut yang sedang saling berseteru meluaskan hegemoninya. Indonesia memanfaatkan situasi ini dengan mencoba melakukan pendekatan kepada kedua Negara adidaya ini untuk mendapatkan bantuan persenjataan yang nantinya akan dipakai dalam kampanye militer merebut Irian Barat.

Sedangkan dalam faktor *geostrategi* itu sendiri dipengaruhi oleh keadaan geografi dan geopolitiknya. Jadi geografi, geopolitik, dan geostrategi merupakan tiga serangkai yang sulit dipisahkan. Geostrategi berusaha menjelaskan bagaimana opsi-opsi strategis untuk memanfaatkan faktor geografi dalam pertarungan geopolitik. Geopolitik menganggap bahwa topografi, demografi, kandungan sumberdaya, dan lokasi menentukan karakter politik Negara. Pemahaman terhadap geografi itu sendiri tentu tidak terbatas pada

konstruksi fisik dan peristiwa-peristiwa alam tetapi juga karakter sosial yang berada di dalamnya<sup>57</sup>. Pemahaman geografi sangat mempengaruhi strategi didunia politik khususnya politik yang memakai kekuatan militer sebagai basisnya<sup>58</sup>. Faktor geografi ini akan mempengaruhi khususnya dalam level pengerahan taktik dan juga operasional dari berbagai pergelaran operasi militer. Pemahaman akan geografi adalah komponen utama di dalam pelaksanaan perang agar dapat memenangkan perang<sup>59</sup>.

Terakhir strategi pertahanan juga harus memperhatikan bagaimana *merancang gelar operasi militer*, terutama perubahan sifat perang, sifat dan bentuk ancaman dalam dunia yang digerakkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi. Perang modern tidak lagi didominasi perang darat yang

---

<sup>57</sup> Tulisan Kusananto Anggoro (2005), "Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia.", Dalam buku Bantarto Bandoro (ed), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies. *Op.Cit.*, hal 62.

<sup>58</sup> Lihat strategi militer China, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. China menitik-beratkan strategi pembangunan militer nasionalnya pada kekuatan darat yang bertumpu pada tentara rakyat dan memanfaatkan luasnya wilayah. Strategi China adalah membiarkan musuh masuk ke dalam wilayah China. Kemudian setelah musuh masuk dengan barisan perbekalan yang amat panjang, celah inilah yang kemudian di pukul menggunakan kekuatan rakyat yang disiapkan sebagai pasukan-pasukan gerilya. Inti dari strategi China era Mao saat itu adalah dilandasi pemahaman wilayah China yang didasarkan daratan yang teramat luas dan rakyat yang besar jumlahnya. Keunggulan teknologi musuh hendak dilebur dalam kombinasi wilayah dan rakyat. Atau Jepang yang hendak menaklukkan wilayah Pasifik dalam perang dunia II yang berupa kepulauan, Jepang membangun kekuatannya bertumpu pada angkatan laut dan udaranya. Ini adalah contoh bagaimana pemahaman akan geografi bisa menjadi suatu basis strategi militer yang akan diterapkan.

<sup>59</sup> Tulisan Williamson Murray (1999), "*Some Thoughts on War and Geography*" dalam buku Colin S. Gray dan Geoffrey Sloan (ed) *Geopolitics* (Geography and Strategi). London: Frank Cass Publishers. Hal. 201.

dilakukan dengan konsep-konsep perlawanan bersenjata secara gerilya atau frontal, melainkan merupakan perang yang menekankan penghancuran infrastruktur vital atau *center of gravity*. Perkembangan ini tidak bisa di atasi dengan mengandalkan cara pikir konvensional yang hanya menekankan pada kemampuan kekuatan darat. Tetapi bertumpu pada kekuatan peralatan perang modern seperti pesawat tempur ataupun kapal-kapal perang<sup>60</sup>. Hal ini juga sangat sesuai dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam Konteks Indonesia yang merupakan Negara maritim dan berbentuk kepulauan, doktrin dan strategi politik pembangunan kekuatan militer harus diprioritaskan melalui matra laut dan udara. Pembangunan kekuatan militer yang berorientasi *land-based strategy* tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan kekuatan udara dan laut<sup>61</sup>. Apalagi bagi Negara yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang + 81.000 kilometer dan luas laut + 5,8 juta Km2 atau kira-kira tiga kali luas daratannya.

Dengan kondisi geografis yang sesuai dengan kultur maritim, sangat diperlukan *maritime grand strategy* yang sejalan dengan konsep pertahanan yang defensif aktif serta fakta yang terlihat bahwa area terluar yang harus dipertahankan adalah lautan. Penerapan strategi maritim adalah untuk mengaktualisasikan kekuatan maritim yang dapat menegakkan kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman. Diperlukan angkatan laut yang kuat untuk melaksanakan *control of the sea and force projection*

---

<sup>60</sup> Di dunia militer, proses memodernisasi kekuatan militer di kenal dengan nama RMA (*Revolution in Military Affairs*). RMA berasal dari perkembangan cara berpikir kalangan militer Amerika yang terjadi karena semakin pesatnya perkembangan teknologi.

<sup>61</sup> Edi Prasetyono, *Op.Cit.*,

yang harus didukung pula oleh kekuatan udara untuk melaksanakan *control of air*. Kekuatan pertahanan Indonesia terintegrasi dalam kekuatan strategi maritim yang ditopang oleh kekuatan udara dengan tanpa mengabaikan kekuatan darat. Perumusan strategi pertahanan ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdekatan dengan kekuatan-kekuatan kontinental membutuhkan kekuatan laut dan udara yang tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara<sup>62</sup>.

Karena hal tersebut, strategi pertahanan bagi Negara kepulauan seperti Indonesia berarti harus juga mempertahankan kedaulatan maritim dan sumber daya yang berada di dalamnya. Faktor strategis keluar mengharuskan Indonesia membuat keputusan politik di bidang pertahanan untuk mengembangkan kekuatan penangkal (*deterrence*)<sup>63</sup>. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan menunjukkan pergelaran persenjataan (*deployment*) atau akuisisi senjata-senjata yang modern dan berteknologi canggih (*weapon acquisition*) khususnya di angkatan laut dan udara<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Mayor Laut (P) Salim. *Op.Cit*

<sup>63</sup> Edi Prasetyono , “Reinterpretasi Sistem Pertahanan Nasional Indonesia”. *Op.Cit.*, Hal 84.

<sup>64</sup> Inilah yang menjelaskan kenapa pada periode konfrontasi militer dalam rangka merebut Irian Barat, Indonesia membangun kekuatan perangnya secara khusus membangun persenjataan bagi angkatan laut serta udaranya secara masif (*Force Structure* yang bertumpu pada kekuatan laut dan udara). Yakni dengan tujuan untuk mendukung operasi militer yang akan dilakukan di wilayah Irian Barat. Sebab dengan keadaan geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan dukungan persenjataan dari angkatan laut dan udara sangatlah dibutuhkan untuk merancang gelar operasi militer diwilayahnya sendiri. Tanpa adanya dukungan dari kekuatan laut dan udara ini, kekuatan penyerang darat akan mudah untuk dilumpuhkan.

## Sistematika Penulisan

Penulisan buku ini akan dijabarkan kedalam lima bab. *Bagian kedua* berisi tentang latar belakang sejarah sengketa wilayah Irian Barat usaha diplomasi yang dilakukan hingga pada akhirnya memilih untuk memakai kekuatan militer untuk menyelesaikannya. Bab ini dipakai sebagai titik awal dilakukannya pembangunan kekuatan militer Indonesia secara besar-besaran sebagai persiapan konfrontasi bersenjata merebut Irian Barat ketika jalur diplomasi tidak lagi membuahkan hasil. Pada *bagian ketiga* akan ditulis mengenai proses pembangunan kekuatan militer yang dilakukan sebagai persiapan konfrontasi bersenjata merebut Irian Barat. *Bagian empat* akan ditulis tentang analisis tentang implikasi yang dihasilkan dari pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran terkait keinginan Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat melalui jalur konfrontasi bersenjata. Dan terakhir *bagian lima* akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi dari penulis.



---

## BAGIAN DUA: DARI DIPLOMASI KE KONFRONTASI BERSENJATA

---

*“Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami maka Irian Barat hanya selebar daun kelor, akan tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya dipotong begitu saja tanpa membalas sedikitpun ? apakah orang tidak berteriak kesakitan, apabila dipotong ujung jarinya sekalipun hanya sedikit ?...(Soekarno)<sup>65</sup>*

### Perjuangan Mengembalikan Irian Barat.

Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda diakhiri dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejak saat itulah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia. Namun, perjanjian KMB tersebut ternyata belum menuntaskan semua permasalahan Indonesia dengan Belanda, sebab dalam salah satu poin perjanjian tersebut, masih menyisakan ketidak-jelasan tentang status wilayah Irian Barat. Dalam

---

<sup>65</sup> Cindy Adams (1966), *BUNG KARNO-Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (judul asli : *Sukarno, An Auto Biography as Told to Cindy Adam*), terj. Mayor Abdul Bar Salim. Jakarta : PT Gunung Agung. Hal. 423

Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia memang belum berhasil mencapai keputusan mengenai nasib Irian bagian barat. Walau demikian pada perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) itu, telah disebutkan bahwa masalah Irian akan segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak ditandatanganinya piagam KMB tersebut. Namun ternyata, bahkan hingga lebih dari 10 tahun sejak penandatanganan KMB, ternyata belum juga disepakati penyelesaian masalah Irian.

Dalam sidang KMB di Den Haag tahun 1949 terlihat jelas bahwa Belanda masih menginginkan kekuasaannya atas wilayah Irian Barat, sebab wilayah ini sangat penting bagi kepentingan nasionalnya. Sebagai Negara yang baru saja mengalami kehancuran pasca Perang Dunia ke-2, Belanda butuh banyak sarana untuk membangun kembali negaranya. Belanda butuh banyak modal dan salah satu caranya adalah berasal dari wilayah jajahannya. Kalau wilayah Irian Barat dapat dipertahankan, maka di tanah koloninya itu nanti bisa didirikan perkebunan, persawahan, dan industri guna meningkatkan ekonomi dan kemakmuran Belanda pasca kehancuran Perang Dunia ke-2. Beberapa pihak dari delegasi Belanda menyatakan bahwa wilayah ini adalah *the last pillar* yang harus dipertahankan. Perdebatan ini menjadi panas di perundingan KMB. Sebab, wakil Indonesia di Den Haag, yakni Bung Hatta juga menyampaikan bahwa wilayah Irian Barat harus turut merdeka dengan wilayah Indonesia lainnya<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Drs. Basuki Suwarno (1999), *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*. Jakarta: Pan Percetakan Upakara. Hal. 399-405.

Dengan berbagai argumen yang saling menyanggah dari masing-masing pihak, akhirnya dicapai sebuah kompromi untuk menunda pembicaraan mengenai wilayah ini selama satu tahun:

*...maka status quo Nieuw Guinea (Irian Barat/Irian Barat/Irian Jaya) tetap berlaku secara ditentukan bahwa satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Nederland...<sup>67</sup>*

Kabinet parlementer RIS yang memegang kekuasaan di Indonesia pada waktu itu ternyata belum juga berhasil menyelesaikan hingga masalah kejelasan status Irian Barat masih berlarut-larut. Namun pada bulan agustus 1952, Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara unilateral mengklaim dan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya.

Diawal sebenarnya Indonesia berniat menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur diplomasi. Ada 2 jenis diplomasi yang dipakai oleh Indonesia. Yakni secara bilateral antara Indonesia-Belanda. Pembicaraan secara bilateral senarnya sudah disepakati untuk dilaksanakan pasca dilakukannya perjanjian KMB. Dimana dikatakan dalam salah satu poin KMB bahwa masalah Irian akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Tapi ternyata hingga masa 10 tahun sejak diberlakukannya KMB masalah Irian ternyata juga belum selesai dan segala

---

<sup>67</sup> Sejarah Militer Kodam VII/Cendrawasih (1971), *Irian Barat Dari Masa ke Masa*. Jayapura. halaman 41-42. Dikutip oleh Atmadji Sumarkidjo. 2010. *Mission Accomplished*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Hal. 1

perundingan mencapai jalan buntu. Kemudian secara multilateral dengan melibatkan keikutsertaan negara lain melalui berbagai forum organisasi negara-negara semisal PBB sebagai mediator dalam menangani sengketa wilayah ini. Jalur diplomasi ini ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mendahulukan cara damai dalam menyelesaikan persengketaan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan perundingan. Jalan diplomasi ini sudah dimulai sejak Kabinet Natsir (1950) yang selanjutnya dijadikan program oleh setiap kabinet, *Kabinet Ali Sastroamijoyo I*, *Burhanuddin Harahap*, hingga *Ali Sastroamijoyo II*. Meskipun demikian program ini selalu mengalami kegagalan sebab Belanda masih ingin menguasai Irian Barat, bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda. Jalur diplomasi yang ditempuh ada dua cara.

Di dalam negeri Indonesia sendiri, Soekarno selaku kepala Negara<sup>68</sup>, terus menerus menyatakan bahwa revolusi belum selesai. Masih ada kekuatan Neo-Kolonialisme dan Neo-Imperialisme yang hendak membahayakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Soekarno terkait tidak adanya niatan dari pihak Belanda untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Padahal menurut Soekarno hak Indonesia atas kepemilikan wilayah Irian Barat adalah harga mati. Soekarno meminjam istilah yang pernah dipakai Belanda untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang letaknya berpencar-pencar tersebut. Slogan tersebut dicanangkan dalam sebuah kampanye

---

<sup>68</sup> Posisi Soekarno dalam Politik Indonesia saat itu hanya sebagai kepala Negara, simbol pemersatu tanpa kekuasaan menurut konstitusi RIS (KMB 1949). Sementara kekuasaan pemerintahan ada di tangan perdana menteri yang memimpin kabinet.

yang menjanjikan bahwa Indonesia suatu hari nanti akan terhampar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu secara historis pula wilayah Sabang yang terletak di ujung pulau Sumatera dan Merauke yang terletak di ujung tenggara wilayah Irian Barat adalah wilayah yang dahulu dikenal dengan Hindia Belanda yang menjadi Bagian Kerajaan Belanda. Maka jika Indonesia merdeka maka sudah sewajarnya wilayah Irian Barat juga masuk ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan dahulu wilayah itu pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit, dan yang terpenting wilayah tersebut pernah berada di bawah Kesultanan Tidore<sup>69</sup>.

Ketika memperingati hari kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1950, Presiden Soekarno kembali memberi pernyataan mengenai masalah Irian Barat yang masih belum terselesaikan ini pasca KMB 1949 :

*“Sudah lama Irian Barat belum juga kembali kepada kita, aspirasi nasional kita tidak akan pernah terpenuhi...<sup>70</sup>”.*

Bahkan wacana dipilihnya opsi politik konfrontasi bersenjata sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1950 oleh Presiden Soekarno, atau kurang lebih setahun sejak penandatanganan KMB, sebab terlihat gelagat Belanda yang tidak mau untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Dalam pidato berjudul “Dari Sabang Sampai Merauke” pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno sudah mulai memperingatkan, akan terjadi konflik besar apabila

---

<sup>69</sup> Robin Osborne (2001), *Kibaran Sampari* (Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat). Jakarta: Penerbit ELSAM. Hal. 44-45.

<sup>70</sup> Van der kroef, *The New Guinea Dispute*, hal 6. Dikutip oleh J.Sloedjati Djijawandono (1996), *Konfrontasi Revisited (Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno)*. Jakarta : CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Hal 40.

perundingan dalam mengenai masalah Irian Barat, dalam tahun ini tidak terjadi kesepakatan<sup>71</sup> .

Ketika mendapat kesempatan berpidato didepan rakyat Indonesia, Soekarno kembali menyinggung masalah Irian Barat. Dalam pidatonya Soekarno berulang-ulang menekankan bahwa praktek kolonialisme Belanda masih terjadi di Irian Barat yang ditunjukkan dengan kecenderungan pihak Belanda untuk tidak mau melepaskan wilayah itu meski telah dijanjikan melalui KMB.

*“Masalah Irian Barat adalah sebuah pertanyaan apakah itu adalah sebuah bentuk kolonialisme atau tidak, kolonialisme atau kemerdekaan. Namun yang pasti bagian dari tanah pertiwi Indonesia masih tetap di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Jika kepastian masalah ini, yang ditempuh melalui jalur diplomasi masih belum bisa tercapai di tahun ini, akan ada sebuah konflik besar untuk menentukan siapa yang memiliki otoritas pada pulau itu...Kita tidak akan berhenti berjuang, kita akan melanjutkan perjuangan, kita akan berjuang dengan segala kekuatan sampai Irian Barat kembali pada kepangkuan Ibu Pertiwi...”<sup>72</sup>*

Sekaligus dalam pidato itu Soekarno menyinggung pemerintah yang telah larut dalam konflik sesamanya (saling menjatuhkan dalam kabinet) sehingga lupa pada semangat persatuan yang menjadi motor penggerak

---

<sup>71</sup> Tulisan Peter Kasenda dengan Judul: “Soekarno, Diplomasi dan Konfrontasi” Lihat pada <http://www.scribd.com/doc/45659582/Irian-Barat-Diplomasi-Dan-Konfrontasi>

<sup>72</sup> Soekarno, Bendera Revolusi, 114-116. Dikutip oleh J.Soedjati Djwandono. *Op.Cit.*, Hal 40.

revolusi<sup>73</sup>. Presiden Soekarno menilai, demokrasi parlementer yang dianut Indonesia selama 12 tahun sebelumnya adalah penyebab utama liberalisme perkelahian bebas sehingga menghasilkan pertikaian antara daerah dan militer serta mengubah kebudayaan Indonesia menjadi kegilaan “*rock and roll*”<sup>74</sup>.

Meski demikian, pada masa kabinet Ali Sastroamidjoyo pertama, perjuangan melalui diplomasi masih tetap dilakukan. Indonesia berulang kali membawa masalah Irian Barat ini ke forum internasional seperti PBB. Tahun 1954 untuk pertama kalinya masalah Irian Barat di perbincangkan dalam sidang umum (*General Assembly*) PBB. Namun usaha tersebut gagal karena ketika dilakukan pemungutan suara, -meski Indonesia mendapat dukungan dari Negara-negara peserta konferensi Asia-Afrika-, tidak mencapai duapertiga suara. Bahkan sidang umum tahun-tahun berikutnya yakni tahun 1955, 1956, dan 1957 tetap saja menemui jalan buntu karena Indonesia gagal memenangkan opini dari majelis PBB<sup>75</sup>.

Sekitar tahun 1957 itu pula, Belanda mulai menawarkan konsep penentuan nasib sendiri terkait status Irian Barat. Belanda memiliki rencana terkait hal itu yakni hendak membentuk Negara boneka Papua Barat di bawah Negara Kerajaan Belanda. Belanda meniuapkan isu rasial bahwa penduduk asli Papua adalah terpisah dan berbeda dari Indonesia. Sehingga punya hak untuk menentukan nasib sendiri dimasa depan. Untuk memeperkuat posisinya

---

<sup>73</sup> Nazaruddin Syamsudin (1988), *Soekarno-Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rajawali. Hal. 98.

<sup>74</sup> F. Gardner (1999), *50 Tahun Hubungan Amerika Serikat Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal. 279

<sup>75</sup> Atmadji Sumarkidjo. *Op Cit.*, Hal. 2.

Belanda selalu merujuk pada artikel 1 Piagam PBB mengenai prinsip menentukan nasib sendiri<sup>76</sup>.

Hal itu tidak disetujui oleh Indonesia sebab bagi Indonesia wilayah Irian Barat adalah bagian dari teritorialnya sendiri. Klaim wilayah Indonesia merdeka proklamasi 1945 adalah berdasarkan fakta sejarah wilayahnya berasal dari wilayah pendudukan kolonial Belanda, yang disebut dengan Hindia Belanda. Sedangkan Irian sendiri juga termasuk dalam wilayah Hindia Belanda itu. Jika melakukan penentuan pendapat sendiri berarti sama saja dengan memecah-belah Indonesia. Sebab, daerah-daerah lain tentu akan punya alasan untuk menuntut hal yang serupa. Dr Subandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dihadapan komite Politik PBB pada tahun 1957 menjawab<sup>77</sup> :

*“Penentuan nasib sendiri, baru-baru ini telah diperkenalkan untuk diterapkan dalam masalah Irian Barat... Penerapan konsep penentuan nasib sendiri dari Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat ini berarti bahwa kami juga harus menerima konsep tersebut diterapkan di pulau-pulau atau wilayah-wilayah lain dan konsekuensinya adalah disintegrasi Negara Nasional Indonesia”*

---

<sup>76</sup> Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 73 tahun 2011. *Operasi Udara Trikora*. Hal 11.

<sup>77</sup> Robin Osborne, *Op. Cit.*, hal 45-46.

## Konfrontasi Bersenjata Sebagai Pilihan Akhir

Kekalahan di meja diplomasi PBB yang terakhir kalinya yakni pada tahun 1957 membuat Soekarno mulai mengizinkan aksi-aksi radikal dimulai, sesuai dengan pidatonya, sebelum usul mosi di PBB kalah. Ia memperingatkan kalau usul mosi itu gagal, akan diambil jalan yang “akan mengejutkan dunia.” Sejak saat itulah pemerintah Indonesia mulai bertindak keras terhadap kegigihan pemerintah Belanda dalam mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Tindakan keras tersebut di arahkan tidak hanya dalam politik tetapi juga menyentuh ranah ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi tindakan keras ini ditunjukkan dengan dilakukannya nasionalisasi semua perusahaan Belanda yang berada dan beroperasi di Indonesia. Terjadilah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing sejumlah 700 perusahaan dengan nilai lebih dari 1,5 milyar dolar. Demonstrasi sepanjang jalan, pemboikotan dan pemogokan serta penjungkirbalikan mobil-mobil milik Belanda, bahkan semua surat kabar berbahasa Belanda dilarang terbit<sup>78</sup>.

Sementara itu di dalam negeri Indonesia situasi politik juga berubah. Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi parlementer yang dijalankan di Indonesia ternyata tidak membawa kebaikan bagi Indonesia. Soekarno menilai pergantian kabinet yang sering terjadi berulang kali karena kabinet dengan sistem parlementer yang saling menjatuhkan<sup>79</sup> menjadikan penyelesaian berbagai masalah di Indonesia tidak bisa terselesaikan oleh

---

<sup>78</sup> Peter Kasenda. *Op.Cit.*

<sup>79</sup> Dengan mosi tidak percaya.

pemerintah. Soekarno menyebutnya sebagai penyakit<sup>80</sup>. Kritik ini Soekarno tujukan terkait permasalahan Irian Barat yang belum juga terselesaikan.

Pada tahun 1957 terjadi pula pemberontakan di daerah-daerah yang tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Presiden Soekarno menyatakan SOB (Negara dalam keadaan perang). Jendral A.H Nasution, kepala staf Angkatan Darat saat itu ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Pada tahun yang sama pula tanggal 2 Desember 1957, Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengambil alih semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia sebagai bagian atas "jalan yang mengejutkan dunia" seperti yang pernah diutarakan oleh Presiden Soekarno. Tindakan Peperpu itu kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 86/Tahun 1958 yang mengatur nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia<sup>81</sup> serta ganti-ruginya. Selain nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Presiden Soekarno juga melakukan pelarangan maskapai penerbangan Belanda KLM masuk atau melintas di seluruh wilayah Indonesia dan juga pemerintah memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia dari kota Rotterdam (Belanda) ke Kota Bremen (Jerman Barat). Konfrontasi dalam kehidupan sosial ditunjukkan dengan tindakan keras pelarangan pemutaran film berbahasa Belanda dan

---

<sup>80</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*. Jakarta: LP3ES. hlm. 63.

<sup>81</sup> Menurut A.H Nasution, perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi berjumlah kurang lebih 700 perusahaan dengan nilai asset mencapai 1,5 milyar dolar AS. Perusahaan-perusahaan yang diambil alih seperti Perusahaan Perkebunan, Netherlansche Handels Mattscapij (Kereta Api), Perusahaan Listrik, dan Perusahaan Perminyakan. Baca A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 5 : Kenangan Masa Orde Lama, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989.

pengusiran warga Belanda yang bertempat tinggal di Indonesia<sup>82</sup>.

Sementara itu di konstituante para anggota parlemen terus-menerus berdebat tentang UUD baru, pada pertengahan 1959 perdebatan itu bahkan sudah menjurus pada perpecahan. Angkatan darat mengajukan gagasan pada Presiden Soekarno untuk mengatasi keadaan politik dalam negeri dan kembali ke UUD 1945. Angkatan Darat menyatakan mendukung apapun langkah Presiden Soekarno untuk mengatasi konflik politik yang terjadi di dalam negeri Indonesia saat itu<sup>83</sup>. Langkah angkatan darat yang mendukung Presiden Soekarno disebabkan angkatan darat tidak setuju dengan sistem pemerintahan parlementer yang dianut Indonesia pasca pengakuan kedaulatan dalam KMB 1949. Sistem itu menurut mereka membuat perpecahan di kalangan rakyat Indonesia, yakni dengan banyak munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah. Selain itu militer khususnya angkatan darat yang lahir bersamaan rakyat dalam fase perang kemerdekaan kecewa karena tidak mendapatkan tempat untuk memainkan peran penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Padahal proses perpolitikan Indonesia saat itu sedang menuju perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Indonesia. Militer yang merasa berkewajiban moral untuk menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia kemudian mendukung Soekarno untuk memulihkan keadaan<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> Atmadji Sumarkidjo, *Loc.cit.* Hal. 2-3.

<sup>83</sup> Tim Penerbit Narasi (2006), *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia* (Tokoh : A.H Nasution). Jakarta : Penerbit NARASI. Hal 3-4.

<sup>84</sup> Tulisan Phill Williams (1994), "The Security Policy of Indonesia", dalam buku Douglas J. Murray & Paul R. Viotti (ed), *The Defense Policies of Nations (A Comparative Study 3<sup>rd</sup> edition)*. London: The Johns Hopkins Press Ltd. Hal 436-437.

Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit tersebut berisi tentang perubahan Konstitusi Indonesia yang semula memakai Konstitusi 1950 kembali memakai konstitusi 1945. Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) di bubarkan begitu juga dengan parlemennya, selanjutnya Indonesia kembali mejadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu juga Presiden Soekarno memperkenalkan Konsep Demokrasi Terpimpin dengan sistem pemerintahan Presidensiil. Demokrasi terpimpin pertama-tama adalah sebuah alat bagi Soekarno untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam situasi politik Indonesia yang saat itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Sehingga, untuk menggantikan sistem parlementer yang menyebabkan pertentangan di antara partai-partai, Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk mengganti sistem parlementer menjadi sistem Presidensiil dengan menempatkan dirinya sebagai pusat dari seluruh kekuasaan politik Indonesia. Presiden Soekarno berusaha mengumpulkan semua kekuatan politik Indonesia yang sebelumnya saling bersaing untuk bersama-sama bersatu dalam sebuah kesadaran untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Khususnya dalam hal ini adalah usaha merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno bisa memujudkan ide demokrasi terpimpinnya ini disebabkan oleh dukungan kuat dari militer (Angkatan Darat).

Meski demikian Soekarno sadar, bahwa dimasa depan akan terjadi suatu bahaya jika ia hanya bergantung pada militer sebagai penopang kekuasaannya. Oleh karena itu kemudian ia juga meminta dukungan dari kelompok sipil. Kelompok sipil yang paling vokal menyatakan diri

sebagai pengikut setia Soekarno adalah PKI. Saat itu PKI sendiri sebenarnya berkonflik dengan militer, khususnya angkatan darat<sup>85</sup>. Artinya, Angkatan Darat dan PKI sendiri terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan, namun pertentangan itu sendiri dapat untuk sementara disingkirkan dan kemudian diarahkan Soekarno untuk fokus dalam suatu tujuan nasional mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Tanah Air Indonesia<sup>86</sup>.

Pasca dekrit Presiden yakni pada tanggal 31 Desember 1959 dibentuk pula sebuah organisasi bernama Front Nasional. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 dan dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa bentukan Presiden Soekarno yang bertujuan menggerakkan dukungan dan kekuatan dari massa akar rumput. Teutama mobilisasi massa yang sangat diperlukan Soekarno untuk mendukung kebijakan politik konfrontasinya. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Tiga tugas utama front nasional adalah sebagai berikut: Menyelesaikan Revolusi Nasional, Melaksanakan Pembangunan, dan Mengembalikan Irian Barat<sup>87</sup>.

Kembalinya pusat kekuasaan politik dan pemerintahan ke tangan Soekarno membuat karakter kebijakan luar negeri Indonesia saat itu menjadi lebih

---

<sup>85</sup> Pimpinan angkatan darat sangat anti komunis serta menentang PKI. Khususnya terkait rencana pembentukan Angkatan Ke V. Yakni PKI meminta kaum buruh dan tani di Indonesia untuk dipersenjatai

<sup>86</sup> Harold Crouch (1999), *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. Hal. 44.

<sup>87</sup> J.A.C Mackie (1974), *Konfrontasi (The Indonesia-Malaysia Dispute)*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hal 80-81.

konfrontatif, agresif, keras dan militan yang secara kuat merefleksikan sentiment anti-kolonialisme dan anti-imperialisme<sup>88</sup> khususnya hal ditujukan dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Hal ini ditunjukkan dalam pidato Presiden Soekarno pada pidato peringatan HUT RI tahun 1960<sup>89</sup> :

*At last, a few years ago we changed the character of our struggle, from "sweetly persuading" the Dutch to return West Irian to us, to a policy of confrontation between all our national forces and the dutch on West Irian issue. That moment was the birth of the term "other means" in our West Irian policy...That was the moment of the "rediscovery of our struggle", wich was then followed altogether by the "Rediscovery of our Revolution"*

(Pada akhirnya, beberapa tahun lalu kita mengubah karakter perjuangan kita. Dari bujukan persuasi yang manis kepada Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada kita menjadi sebuah kebijakan konfrontasi yang melibatkan semua kekuatan nasional kita pada isu Irian Barat ini. Momen itulah yang menandai kelahiran masa baru pada kebijakan Irian Barat kita. Momen dimana juga menandai "penemuan kembali perjuangan kita" yang juga diikuti oleh "penemuan kembali revolusi kita")

Bagi Soekarno, 2 tujuan revolusi Indonesia, - Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan masyarakat adil serta makmur-

---

<sup>88</sup> J.Soedjati Djiwandono. *Op.Cit.*, Hal 37.

<sup>89</sup> Dikutip dalam J.Soedjati Djiwandono. *Op.Cit.*, Hal 41.

, tidak akan pernah tercapai sebelum musuh-musuh dari tujuan itu dihancurkan. Bagi Soekarno, musuh-musuh itu adalah imperialisme internasional, kolonialisme dan kapitalisme sebagai musuh-musuhnya<sup>90</sup>, masih bercokolnya Belanda di tanah Irian adalah menunjukkan hal tersebut. Pada kesempatan pidato 17 Agustus 1960 itu juga, Soekarno akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Hal ini merupakan langkah yang diambil sebagai tanggapan atas sikap pemerintah Belanda yang memperkuat armada lautnya yakni dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke wilayah perairan sekitar Irian Barat. Di samping itu pula, Belanda juga telah meningkatkan kekuatan angkatan udara dan angkatan daratnya di Irian Barat.

Sebulan berikutnya yakni pada tanggal 30 september 1960 dalam pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" di hadapan Sidang Umum PBB, Presiden Soekarno menyatakan tekadnya untuk merebut kembali Irian Barat walau harus menggunakan kekerasan senjata atau kekuatan militer. Retorika bahasa yang bersifat mengancam mulai didemonstrasikan oleh Soekarno<sup>91</sup>.

Dalam pidato di hadapan Sidang Umum PBB itu Presiden Soekarno mengutarakan pidato yang berisi beberapa hal seperti berikut<sup>92</sup> :

---

<sup>90</sup> Tim CSIS (1995), *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit CSIS. Hal. 1167.

<sup>91</sup> Nazaruddin Syamsudin. *Op.Cit.*, Hal 119

<sup>92</sup> Soekarno (2000), *Membangun Dunia Yang Baru* (Pidato Presiden RI di Muka Sidang Umum PBB ke XV tanggal 30 September 1960). Yogyakarta: Media Presindo.

*“Kami telah berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha mengadakan perundingan bilateral. Kami telah berusaha sungguh-sungguh dan bertahun-tahun. Kami telah berusaha dan tetap berusaha. Kami telah berusaha menggunakan alat-alat Perserikatan Bangsa-Bangsa...Kami meminta kepada sekretaris jenderal PBB untuk memasukkan persoalan ini kedalam agenda PBB ditahun 1954. Sengketa ini dibicarakan. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian diulangi kembali ditahun '55, '56, '57 ....pendeknya setiap tahun. Harap disampaikan kepada pemerintah tuan, bahwa kami tidak berniat hendak menaklukkan salah satu bagian dunia yang bukan kepunyaan kami. Saya bukan seorang ekspansionis. Akan tetapi sekarang saya terpaksa memulai politik kekerasan. Tidak ada jalan lain supaya Old Established Force tahu siapa Indonesia. Tidak lagi kami akan berdiskusi. Mulai dari saat ini kami menjawab dengan meriam...”*

Dalam pidato di depan Muka Sidang Umum PBB ke XV tanggal 30 September 1960 itu juga Presiden Soekarno sekaligus mengkritik ketidakmampuan PBB menangani masalah Irian Barat dan memperingatkan adanya imperialisme serta kolonialisme yang menyebabkan terancamnya perdamaian<sup>93</sup>:

*“ Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransipun mencapai batasnya. Semua itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lain, kecuali memperkeras sikap kami. Jika mereka gagal untuk secara tepat menilai arus sejarah, maka kita tidaklah dapat*

---

<sup>93</sup> *Ibid*

*dipersalahkan. Masalah Irian Barat merupakan pedang kolonial yang diancamkan terhadap jantung kami, akan tetapi di samping itu ia mengancam pula perdamaian dunia dan dalam hal ini menyangkut pula Perserikatan Bangsa-Bangsa..."*

Hingga masalah Irian Barat diajukan kembali pada sidang umum PBB pada tahun 1961 pun tidak menghasilkan kejelasan apapun. Diplomasi melalui PBB dianggap tidak pernah memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini. Hanya menghasilkan jalan buntu. Bagi Indonesia, wilayah Irian Barat adalah wilayahnya. Sedangkan bagi Belanda, tetap bersikukuh tidak mau melepaskan wilayah Irian sebagai bagian dari wilayahnya. Mengenai hal ini Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr.Subandrio juga menyatakan pada majelis Umum PBB sebagai berikut<sup>94</sup>:

*"The United Nations, unable, or more correctly not wanting, to lend its assistance in the solution of this problem, left my government with no other alternative than to find this solution in our way... My Government thus embarked on a policy of total confrontation vis-à-vis the Netherlands, not only politically but also economically and militarily..."*

(PBB tidak sanggup atau lebih tepatnya tidak ingin membantu menemukan solusi bagi masalah ini, meninggalkan pemerintah Indonesia tanpa alternatif daripada menemukan

---

<sup>94</sup> Subandrio (1963), *Indonesia on the March: A Collection of Addresses by Dr. Subandrio, Foreign Minister of the Republic of Indonesia, vol. II* . Jakarta: Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia. Hal.184-185. Dikutip oleh J.Soedjati Djijawandono. *Op.Cit.*, Hal. 2.

solusi di dalam jalan kami... Pemerintah Indonesia dengan demikian memulai untuk menerapkan kebijakan konfrontasi total berhadapan dengan Belanda, tidak hanya secara politik tapi juga secara ekonomi dan militer)

Sejak itulah berbagai persiapan untuk membangun kekuatan militer Indonesia dalam rangka menyambut seruan konfrontasi militer yang dikumandangkan Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia mulai dilakukan. Perang sudah didepan mata dan berbagai persiapan terus dikerjakan termasuk mengirim misi-misi diplomatik ke berbagai Negara produsen senjata untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dipakai untuk berperang mengusir kekuasaan Belanda dari tanah Irian Barat. Pilihan pemerintah dalam kebijakan pembangunan militer pada saat itu dihadapkan pada kebutuhan rencana perang dengan Belanda sebagai jawaban atas berlarut-larutnya perundingan mengenai status Irian Barat. Sementara persenjataan yang sudah ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan perang ofensif lintas laut dan udara melawan kedudukan Belanda di Irian Barat.

## BAGIANTIGA: MEMBANGUN PERSENJATAAN UNTUK KONFRONTASI MILITER

---

### Signifikansi Momentum Perang Dingin

Indonesia adalah sebuah Negara yang lahir pasca Perang Dunia ke-2. Namun diantara Negara pemenang Perang Dunia ke-2 tersebut, perang tetap berlanjut dalam bentuk yang lain yang dikenal dengan nama perang dingin. Perang dingin adalah sebuah pertarungan ideologi yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Uni Sovyet dengan ideologi komunisnya. Perang dingin ini kemudian memperebutkan pengaruh dan hegemoni di Negara-negara lain, baik Amerika maupun Sovyet saling bersaing mencari sekutu di berbagai belahan dunia.

Selain karena ideologi Amerika dan Sovyet yang saling bertentangan, Amerika memiliki ekonomi yang kuat dan memiliki senjata nuklir sedangkan Uni Sovyet mempunyai kekuatan militer yang besar. Karena tidak ada Negara yang memiliki kekuatan atau sumber daya yang menyamai ke dua Negara tersebut maka Negara-negara lain yang lebih kecil mencari perlindungan atau dilindungi tanpa keinginannya sendiri. Pada masa itu secara eksternal

kondisi politik dunia terdapat 2 kutub kekuasaan. Hal ini kemudian berdampak pada semakin pekanya AS dan Sovyet terhadap pergeseran perimbangan kekuatan<sup>95</sup>.

Sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, Indonesia juga menjadi lahan rebutan bagi penanaman pengaruh yang dilakukan oleh dua negara yang saling bermusuhan pasca berakhirnya Perang Dunia ke-2, yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Dua negara pemenang perang inilah yang kemudian saling berlomba mencari pengaruh dan meluaskan hegemoni keseluruh penjuru dunia. Melihat kemenangan rezim komunis di China dan tumbuhnya komunis di Korea, Amerika mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya paham komunis diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Amerika melihat Soekarno sebagai pemimpin Indonesia saat itu sudah masuk dalam pengaruh orang komunis dan anti Amerika.

Namun Soekarno dengan lihai memanfaatkan hal ini sebagai strategi untuk memperkuat kekuatan militernya, demi tujuannya untuk mengembalikan wilayah Irian Barat melalui adu senjata melawan Belanda. Dalam strategi ini, Soekarno memakai metode diplomasi paksaan untuk menimbulkan perasaan krisis internasional. Dalam proses selanjutnya, persaingan perhatian Uni Sovyet dan Amerika Serikat secara cerdik kemudian dilibatkan oleh Soekarno. Pada akhirnya, Amerikalah yang merasa wajib memperhatikan resiko politik jika harus menolak tuntutan kepentingan nasional Indonesia yang digagas oleh Soekarno<sup>96</sup>. Selanjutnya, Soekarno memanfaatkan kondisi

---

<sup>95</sup>Hadi Soebadio (2005), *Hubungan Indonesia Amerika Dasawarsa Ke II Tahun 1955-1965*. Tangerang: Pramita Press. Hal 40.

<sup>96</sup> Dr. Michael Leifer (1986), *Politik Luar Negeri Indonesia*. (judul asli : *Indonesia's Foreign Policy*), terj. Drs. A. Ramlan Surbakti, MA. Jakarta : PT Gramedia. Hal. 89

politik internasional saat itu sebagai basis dalam membangun kekuatan militer Indonesia. Dengan kelihaiannya dalam memanfaatkan pertikaian 2 kutub besar kekuatan dunia saat itu Soekarno melakukan pendekatan baik kepada pihak Amerika maupun Uni Sovyet dalam rangka memperkuat dan membangun kekuatan militer Indonesia.

## Memanfaatkan Amerika Serikat

*“Indonesia berpenduduk 100 juta orang dengan kekayaan sumber daya alam yang mungkin lebih besar daripada Negara Asia yang lain. Tidak masuk akal untuk mengucilkan sekelompok besar orang yang duduk di atas sumberdaya alam ini, kecuali memang ada alasan yang amat kuat”*  
(John F. Kennedy)<sup>97</sup>

Gambar 3.1 : Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy



Presiden Soekarno disambut oleh Presiden Kennedy dalam lawatannya ke Amerika<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Bradley R. Simpson (2009), *Economic With Guns (Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>98</sup> Lihat di <http://pontianak.tribunnews.com/foto/bank/images/SENYUMBUNG-KARNO.jpg>

Pada awalnya Indonesia berniat untuk melakukan pengadaan persenjataan sebagai persiapan menghadapi Belanda di Irian Barat dengan membeli peralatan militer dari Amerika Serikat. Pada tahun 1956 Soekarno mengadakan kunjungan ke Washington dan kemudian memesan persenjataan militer senilai 20 juta dollar. Tapi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung mendukung Belanda sebagai sekutu membuat kongres Amerika menahan untuk tidak menjualnya kepada Indonesia<sup>99</sup>. Amerika, meski menyatakan sebagai pihak yang netral dalam masalah Irian Barat, tidak dapat dipungkiri berada di pihak Belanda. Seperti yang dikatakan oleh duta besar Amerika untuk Indonesia H.P Jones saat itu<sup>100</sup> :

*“Belanda adalah sekutu NATO. Amerika memerlukan dukungannya dalam berbagai masalah penting dalam forum PBB. Amerika tidak punya ikatan erat dengan Indonesia. Sedangkan secara tradisi Amerika punya ikatan sejarah, kebudayaan, dan persahabatan dengan Belanda. Oleh karena itu Amerika lebih dekat dengan Belanda. Mengapa harus mengambil resiko dengan mundurnya Belanda dari NATO. Persahabatan dengan Belanda telah terjalin selama ini, sedangkan dengan Indonesia tidak ada kepastian”*

Pemerintah Amerika saat itu juga mencium maksud Soekarno yang hendak membeli peralatan militer dari Amerika dengan tujuan akan digunakan dalam persiapan konfrontasi menghadapi Belanda dalam sengketa wilayah

---

<sup>99</sup>Jules Archer (2006), *Kisah Para Diktator* (Judul Asli : The Dictators, Fascist, Communists, Despots and Tyrans-The Biographies of “The Great Dictator” of Modern World. 1967 ). Yogyakarta : Penerbit Narasi. Hal 225.

<sup>100</sup>Hadi Soebadio, *Op Cit.* Hal 132.

Irian Barat. Disisi lain, ketakutan Amerika akan semakin meluasnya paham komunis diberbagai wilayah penjuru dunia, mau tidak mau menjadikan upaya membendung paham komunis itu sebagai prioritas utama kebijakan keamanan luar negeri Presiden Amerika saat itu, Dwight Eisenhower. Di China sebagai contoh, gerilyawan komunis akhirnya berhasil merebut kekuasaan, menyingkirkan kaum nasionalis dan mendirikan Negara China Komunis.

Bagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, John F. Dulles<sup>101</sup>, situasi politik Indonesia sama seperti di China, sebelum negara China Komunis berhasil didirikan oleh Mao Zedong. Kaum komunis di Indonesia semakin kuat dan berpengaruh. Dalam pemilu 1955, PKI menempati urutan ke empat sebagai partai terbesar di Indonesia. Hal itu menambah kekhawatiran bagi Amerika Serikat, terlebih lagi Presiden Soekarno semakin dekat dengan pimpinan PKI seperti Aidit. Bagi Amerika, Soekarno yang cenderung berpihak pada komunis membuat mereka berpikir ulang untuk memberikan persetujuan terhadap permintaan pengadaan senjata untuk militer Indonesia. Selain itu, berdasarkan pendapat dari Dr. H.V Evert, Menteri Luar Negeri Australia yang juga merupakan sekutu dari Amerika dan Belanda mengatakan bahwa Australia menganggap kepulauan tersebut (Wilayah Papua) sebagai wilayah perisai pertahanannya. Oleh karena itu Australia tetap mengharapakan Belanda untuk berkuasa, daripada wilayah itu diserahkan pada sebuah rezim (pemerintahan Soekarno) yang tampaknya menunjukkan tanda-tanda memasukkan unsur komunis didalamnya<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> F. Gardner, *Op.Cit.*, Hal.265.

<sup>102</sup> Robin Osborne, *Op. Cit.*, hal 32.

Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan Eisenhower juga memberi pertimbangan bahwa betapa pentingnya Indonesia baik secara strategis lokasi, penduduk, dan sumber daya alamnya. Jika Indonesia sampai jatuh ke tangan Komunis, maka hal ini akan berimplikasi serius pada keamanan Amerika Serikat<sup>103</sup>. CIA (*Central Intelligence Agency*) yaitu dinas rahasia Amerika Serikat, juga mulai menyadari betapa berharganya Indonesia untuk kepentingan Amerika Serikat ke depan. Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 20 miliar barel sementara itu Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Soekarno yang tidak mau tunduk pada Amerika dan gerakan komunis di Negara itu sedang menuju kepada kebangkitannya<sup>104</sup>.

Untuk mencegah Indonesia semakin condong ke pihak Komunis, atas saran Duta Besar Amerika untuk Indonesia pada saat itu Hugh S. Cumming, Amerika Serikat mengundang Presiden Soekarno untuk bertandang ke Washington. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi Soekarno agar berpaling dari pihak komunis dan berpihak pada blok Amerika. Cumming beralasan kalau Washington merangkul Soekarno dengan erat, sikap Amerika terhadap masalah Irian Barat tidak perlu diubah. Dengan sedikit membesar-besarkan hubungan pribadinya dengan Soekarno, Cumming yakin tanpa harus mengubah kebijakan Amerika Serikat terhadap isu Irian Barat ia sanggup membujuk Soekarno untuk mendekati Amerika

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 229.

<sup>104</sup> Tim Weiner (2008), *Membongkar Kegagalan CIA*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 180.

Serikat dengan dukungan kuat Amerika, Soekarno akan menjauhi PKI<sup>105</sup>.

Ketika bertandang ke Amerika pada Mei 1956 itulah Soekarno tetap tidak lupa pada cita-citanya untuk segera mengembalikan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Pada setiap pidatonya di hadapan pejabat maupun publik Amerika ia terus-menerus menyinggung tentang Irian Barat. Soekarno menyampaikan harapannya agar Amerika memberi dukungan spiritual dan politis terkait sengketa wilayah Irian Barat. Namun, kunjungan kenegaraan pertama ke Amerika pada tahun Ini ternyata tidak membuahkan hasil yang menyenangkan bagi Soekarno. Bantuan Kredit yang didapat paling banyak hanya sebesar 15 Juta US Dolar. Soekarno juga kecewa karena permintaan Kepala Staf Angkatan Daratnya saat itu, - yakni Jenderal Nasution-, untuk membeli peralatan dan suku cadang senjata bagi pembangunan kekuatan militer Indonesia tidak dipenuhi. Menteri Luar Negeri AS, John F. Dulles, kemudian menyarankan Eisenhower untuk tidak mengabulkan permintaan pembelian senjata yang diajukan oleh Soekarno. Sebab menurut Dulles persetujuan pengiriman senjata Amerika Serikat ke Indonesia akan menjadi sangat provokatif bagi sekutunya, tentu Belanda khawatir jika senjata itu dipergunakan untuk menyerang kedudukan mereka di Irian Barat melalui jalur kekuatan militer<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Audrey R. Kahin & George McT. Kahin (1997), *SUBVERSI SEBAGAI POLITIK LUAR NEGERI-Menyungkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (Judul Asli : *Subversion as Foreign Policy-The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*), terj. Dr.R.Z. Leirissa. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti. Hal. 100.

<sup>106</sup> *Ibid*, Hal. 102

Ketidaksediaan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan persenjataan kepada Indonesia juga dampak tekanan yang dilakukan Belanda terhadap Amerika Serikat, untuk terus konsisten membantu Belanda mempertahankan wilayah Irian Barat. Melalui Menteri Luar Negeri-nya Dr Joseph Luns, Belanda meminta kepastian untuk tidak memberi senjata kepada Indonesia dan tetap mendukung Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Belanda. Seperti yang termuat dalam uraian diplomatik yang disampaikan Luns kepada Dulles tanggal 1 Oktober 1958, beberapa hal pokok yang disampaikan Luns kepada Dulles itu diantaranya<sup>107</sup>:

- Pembatasan Pengiriman Senjata kepada Indonesia.

Dalam rangka menjamin penentuan pendapat umum di Belanda, dirasakan kebutuhan untuk:

1. Persetujuan pada bagian pemerintah Amerika tidak mengirimkan persenjataan ke Indonesia, yang dapat digunakan untuk penyerangan terhadap Irian milik Belanda. Walaupun tidak selalu dalam hal khusus menarik suatu perbedaan antara senjata berat dan persenjataan lain. Suatu hal jelas bahwa dalam kemungkinan suatu penyerangan terhadap Irian milik Belanda, beberapa macam senjata dapat dimaksudkan sebagai senjata berbahaya
2. Suatu pernyataan oleh Perwakilan Amerika Serikat pada NATO. Persemakmuran Atlantik Utara, hal mana dapat mempengaruhi persenjataan oleh anggota persemakmuran lain kepada Indonesia,

---

<sup>107</sup> Dr. P.B.R de Geus (1984), *Masalah Irian Barat (Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Militer)*. Penerbit: Yayasan Jayawijaya. Hal. 261.

dan dalam setiap hal mencegah semua anggota persemakmuran Atlantik utara mengirim senjata berat ke Indonesia.

- Irian adalah Bagian Belanda

Kita menganggap penting bahwa cara baik dibangun untuk mencegah serangan Indonesia terhadap Irian milik Belanda. Pemerintah Belanda untuk itu ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai akibat bahwa penyerangan bersenjata melawan Irian tidak akan diterima oleh Amerika. Penjelasan itu mungkin mengikuti garis-garis berikut ini. Pemerintah Amerika sesuai dengan kebijaksanaan ditetapkan Amerika, adalah kuat dilawan kepada pemakaian apa saja dari kekuatan melawan integritas dari Irian milik Belanda. Andai saja Belanda terpaksa untuk menyerang bersenjata di bagian dunia ini, Pemerintah Amerika Serikat tidak akan gagal mempergunakan semua cara membungkam agresi.

Amerika tetap tidak bisa mengabaikan bahwa Belanda adalah sekutunya di NATO, sehingga membuat Amerika tutup mata terhadap permintaan Presiden Soekarno terkait pembelian senjata ataupun permintaan dukungan Amerika kepada Indonesia terkait masalah Irian Barat. Dalam sidang umum PBB, Amerika Serikat berkali-kali menggagalkan resolusi penyelesaian sehingga sengketa wilayah Irian Barat tidak pernah terselesaikan. Sebagaimana terlihat dari ucapan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika, Walter S. Robertson, saat itu<sup>108</sup> :

---

<sup>108</sup> Walter S. Robertson, transkrip wawancara yang direkam 23 dan 24 Juli 1965, The John Foster Dulles Oral History Project, Princeton University Library. Dikutip oleh F. Gardner, *Op.Cit.*, hal 235.

*“Kami sangat kuat berpendirian bahwa tentang persoalan ini, yang melibatkan sebuah sekutu yang terpercaya (Belanda) dan suatu Negara yang kami harapkan akan menjadi sekutu (Indonesia). Dan kedua-duanya bersikap psikopatis terhadap isu tersebut. Bahwa posisi kami yang terbaik adalah tetap bersikap netral”*

Meski terkesan netral, namun pilihan Amerika ini cenderung menguntungkan pihak Belanda, sebab karena tidak ada penyelesaian, secara *de facto* Belanda tetap berkuasa atas wilayah Irian Barat. Inilah membuat Presiden Soekarno kecewa terhadap Amerika Serikat.

Setelah kunjungannya ke Washinton Mei 1956 itu, Soekarno ternyata juga mengadakan lawatan ke China dan Sovyet. Bagi Amerika sikap Indonesia itu dianggap cenderung semakin dekat kepada negara-negara blok komunis. Akhirnya setelah gagal berusaha mempengaruhi Soekarno melalui cara halus agar berpihak pada blok Amerika lewat undangannya ke Washington. Presiden Eisenhower lewat CIA-nya memakai cara lain. Kali ini Amerika berusaha menggulingkan stabilitas pemerintahan di Indonesia dengan cara ikut mensponsori dan membantu pemberontak-pemberontak daerah di Indonesia yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah Pusat. Presiden Eisenhower mengatakan bahwa sulit mengajak Indonesia untuk ikut berpihak pada blok Amerika sebab figur Soekarno sangat kuat, dan ia terus menggulirkan ide tentang demokrasi terpimpin yang beraliran sosialisme. Oleh karena itu ia lebih senang melihat Indonesia pecah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil daripada nantinya jatuh di bawah dominasi komunis yang semakin

kuat<sup>109</sup>. Yang patut juga dicatat juga adalah ketidaksukaan Amerika pada saat dipimpin Eisenhower adalah pribadi Soekarno yang lama kelamaan semakin mesra dengan pihak komunis Indonesia. Oleh karena itu kemudian CIA menjalankan berbagai macam operasi terselubung baik untuk membunuh Presiden Soekarno ataupun untuk mencapai tujuan memecah belah Indonesia.

Tidak aneh jika pada November 1957 terjadi percobaan pembunuhan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno. Peristiwa itu terkenal dengan peristiwa Cikini. Sejumlah bukti kuat ditemukan bahwa ada keterlibatan pihak asing dalam peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno itu. Dalam sebuah kesempatan pidato didepan massanya, Soekarno secara tegas menuding keterlibatan Amerika melalui dinas intelejennya yakni CIA sebagai dalang. Sadar pihak Soekarno telah mencium peran CIA yang berupaya untuk membunuhnya, Amerika kemudian banting stir dengan membantu pemberontakan di daerah untuk menggulingkan Soekarno<sup>110</sup>.

Pemberontakan yang dibantu oleh Amerika adalah pemberontakan PRRI/Permesta. Pemberontakan ini berasal dari golongan perwira tentara yang berada di luar wilayah Jawa yang tidak puas terhadap kepemimpinan Soekarno. Gagasan Soekarno tentang konsep demokrasi

---

<sup>109</sup> F. Gardner, *Op.Cit.*, hal 266.

<sup>110</sup> Belakangan tuduhan Soekarno terbukti benar. Dalam satu sesi pertemuan Komite Intelijen Senat AS yang diketuai Senator Frank Church dengan Richard Bissel Jr (mantan wakil direktur CIA bidang perencanaan operasi) 22 tahun kemudian terungkap bahwa memang Soekarno saat itu sudah masuk dalam hit list direktur CIA kala itu, Allan Dulles. Kisah operasi terselubung CIA untuk menggulingkan Soekarno dilihat dalam Majalah Angkasa Edisi Koleksi XXIV. *Dirty War* (Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius). Edisi April 2005. Hal 44-48.

terpimpin ditolak oleh daerah-daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat ditambah semakin buruknya perekonomian Indonesia. Akibatnya pimpinan atau perwira tentara di beberapa daerah Sumatera serta Sulawesi melakukan pemberontakan dan menyatakan keadaan darurat perang bagi seluruh Indonesia. Puncaknya adalah ketika disiarkaninya deklarasi Piagam Perjuangan Rakyat Semesta oleh Letkol Ventje Soemoeal di Sulawesi Utara. Amerika Serikat terlibat atau mendukung usaha pemberontakan ini, yang nampak ketika para pemberontak berusaha mencari dukungan Amerika, dengan dalih mempunyai perasaan anti-komunis. Sementara itu pada saat yang bersamaan permintaan Indonesia untuk membeli senjata dari Amerika guna menumpas pemberontakan ditolak oleh kongres Amerika, meski telah mendapat rekomendasi dari duta besar Amerika di Indonesia<sup>111</sup>.

Memanfaatkan perwira-perwira angkatan darat di daerah-daerah (Sumatera, Sulawesi) yang kecewa terhadap pusat dan khawatir terhadap perkembangan PKI, pemerintah Amerika segera memberi bantuan logistik dan peralatan perang untuk membantu para perwira daerah tersebut untuk memberontak. Melalui pejabat konsulat Amerika di Medan, Dean Almy, bergerak cepat dengan memberikan bantuan tahap awal sebesar 50.000 US Dollar. Setelah itu realisasi melengkapi 8.000 tentara pemberontak dengan senjata juga dilakukan. Militer AS terus melakukan *dropping* bantuan senjata kepada pemberontak dengan memakai pesawat-pesawat angkut amfibi yang disewa CIA dalam rangka membawa senjata dan logistik yang

---

<sup>111</sup> Hadi Soebadio. *Op Cit.* Hal 69-71.

mempunyai tujuan mendarat di Danau Singkarak (Sumatra Barat) dan Danau Tondano (Sulawesi Utara). Diluar hal itu Amerika juga menyiapkan skenario lain yakni Amerika juga telah menggerakkan Armada Pasifiknya untuk merapat ke Indonesia. Dalam armada ini diikut sertakan satu divisi marinir Amerika yang juga disiagakan. Skenarionya adalah AS meminta para pemberontak jika terdesak diminta untuk meledakkan kilang minyak Caltex di Dumai, Riau. Dengan dalih mengamankan instalasi perusahaan minyak milik Amerika inilah militer Amerika yang disiagakan tadi dapat masuk dan mengintervensi (bahkan bisa terus merangsek ke Jakarta)<sup>112</sup>.

Setelah merasa kuat tentara pemberontak segera mengumumkan terbetuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958. Jakarta bereaksi dengan mengirimkan pasukan untuk menghabisi seluruh pemberontak. Perlawanan pemberontak akhirnya dikalahkan bahkan sebagian besar senjata bantuan Amerika secara utuh dan dalam jumlah besar berhasil disita oleh TNI. Tidak hanya sampai disitu, semua rencana yang dirancang Amerika mulai berantakan ketika Allan Pope, seorang pilot sewaan CIA yang berkewarganegaraan AS tertangkap setelah pesawatnya jatuh ditembak angkatan udara RI. Melalui mulut Allan Pope dan dokumen-dokument yang berhasil disita, semua informasi tentang rencana Amerika dan CIA terhadap Indonesia terkuak. Ternyata pemberontakan tidak bertindak sendiri tapi dibantu habis-habisan oleh Amerika Serikat yang punya maksud menggulingkan kekuasaan Presiden Sokarno dan memecah belah Indonesia.

---

<sup>112</sup> Majalah Angkasa. *Dirty War* (Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius). Hal 44 - 48.

Dengan tertangkapnya Allan Pope ini situasi jadi berbalik dan tidak menguntungkan bagi AS lagi untuk meneruskan dukungan terhadap para pemberontak. Tidak mau lebih jauh kehilangan muka, Amerika menawarkan kesepakatan-kesepakatan pada Soekarno sehingga Soekarno dengan lihai memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan manuver politiknya<sup>113</sup>. Dengan amunisi baru ini Soekarno terus menerus berpidato didepan rakyat Indonesia bahwa Indonesia dihadapkan pada agresi dari luar yang bertujuan menggagalkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan berseru kepada rakyatnya agar tidak bimbang di dalam menghadapi pemberontakan para petualang dan agresor asing<sup>114</sup>.

Terungkapnya fakta ini menjadikan situasi berbalik dan tidak menguntungkan bagi AS lagi untuk meneruskan dukungan terhadap para pemberontak. Allan Pope menjadi jaminan sehingga Soekarno punya daya tawar politik yang tinggi terhadap Amerika. Sementara rakyat di dalam negeri Indonesia terus menuntut untuk menghukum mati Allan Pope akibat ulahnya yang menewaskan banyak korban sipil. Presiden Eisenhower yang malu karena usahanya intervensinya ketahuan, meminta warganya itu segera dibebaskan, namun Soekarno menjadikan momen itu sebagai permainan politiknya. Soekarno tidak mau melepaskan Allan Pope secara gratis.

Soekarno memaksa Amerika untuk berhenti memberi dukungan pada pemberontak PRRI/Permesta dan kemudian memberikan bantuan ekonomi dan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> F. Gardner, *Op. Cit.*, hal 321.

militernya kepada pemerintah Indonesia. Kejadian-kejadian yang menunjukkan keterlibatan Amerika dalam menyokong pemberontakan PRRI/Permesta semakin menyudutkan Amerika sehingga kedudukannya serba salah. Jika menolak permintaan pembelian senjata dari Indonesia, Indonesia akan membeli senjata dari pihak lawannya, yaitu Uni Sovyet. Terlebih jika tetap mendukung pemberontak, maka hubungan Amerika dengan Indonesia juga akan semakin renggang bahkan secara pasti Indonesia akan masuk pada blok Sovyet. Maka, jelas tidak ada pilihan lain bagi Amerika kecuali segera menghentikan dukungan pada pemberontak dan memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia seperti yang diminta oleh Soekarno.

Setelah melalui tarik ulur yang sangat panjang akhirnya Soekarno membebaskan Alan Pope<sup>115</sup>, dengan tebusan yakni pemberian bantuan militer senilai 7-22 juta USD, melengkapi 21 Batalyon atau sekitar 16.000 tentara Indonesia dengan senjata lengkap terbaru buatan Amerika Serikat. Selain itu juga Amerika menghentikan embargonya ke Indonesia dengan dibukanya kembali pinjaman-pinjaman Bank Ekspor-Impor yang semula di blokir oleh Amerika, pengiriman beras sebanyak 37.000 ton serta masih banyak lagi. Bahkan Indonesia mendapat hadiah armada pesawat angkut berat terbaru milik Amerika C-130B Hercules sebanyak 10 buah. Saat itu tak ada yang menduga bahwa pesawat-pesawat angkut berat itu 2 tahun kemudian berperan besar dalam melawan Belanda di Irian Barat<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> Allan Pope sendiri akhirnya dibebaskan pada tanggal 2 Juli 1962.

<sup>116</sup> Atmadji Sumarkidjo, *Op.Cit.*, hal xxii

Kemudian dengan maksud memperbaiki kembali hubungan diplomatik dengan Indonesia yang memburuk pasca terungkapnya keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu pemberontakan PRRI/Permesta, -melalui Asisten Atase Militer Amerika yakni Mayor Benson yang berkedudukan di Kedutaan Besar-, Amerika mencoba berdialog dengan beberapa perwira angkatan darat. Hal itu dilakukan dengan mengundang perwira angkatan darat<sup>117</sup> untuk mengunjungi Pusat Komando Amerika di Pasifik (CINPAC), dalam acara kunjungan itu turut pula dihadiri utusan-utusan dari pakta-pakta militer yang merupakan sekutu Amerika, seperti SEATO (South East Asia Treaty) dan ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Maksud lain dari kunjungan itu adalah merayu militer Indonesia sekaligus untuk mendemonstrasikan kekuatan pasukan Amerika dengan tujuan militer Indonesia jangan punya gagasan untuk mencoba kekuatan Amerika dan sekutunya. Selanjutnya sebagai kunjungan balasan untuk menunjukkan sikap bersahabat Amerika Serikat, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Jendral Maxwell Taylor dikirim untuk berkunjung ke Jakarta. Disinilah Soekarno mengirim Kolonel Ahmad Yani untuk melakukan pendekatan baru terhadap Amerika terkait pengadaan senjata untuk membangun kekuatan militer Indonesia<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> Alasan mengapa Amerika mendekati Angkatan darat dikarenakan Amerika menganggap hanya angkatan darat lah yang punya pandangan dan haluan sama dalam menyikapi kelompok komunis di Indonesia (sama-sama anti komunis). Oleh karena itu melalui angkatan darat dapat dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang retak paska terungkap keterlibatan Amerika dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Selajutnya yang dikirim dalam misi itu adalah Kolonel Gatot Subroto yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

<sup>118</sup> Dr. Hidayat Mukmin (1991), *TNI Dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 56.

Para Menteri Luar Negeri Australia dan Belanda di Washington segera mengajukan protes kepada Pentagon terkait pemberian senjata tersebut. Sebab mereka khawatir hal itu akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Namun Amerika menjawab bahwa itu hanya bantuan taktis saja, dan menurut Amerika hanya dapat dipakai untuk keperluan *defensive* saja, itupun tidak diambilkan dari Pentagon tapi dari arsenal CINPAC di Hawaii<sup>119</sup>. Kesemua pemberian itu pemerintah Amerika berikan untuk mengobati kekecewaan Soekarno yang secara jelas telah menelanjangi maksud buruk Amerika terhadap Indonesia. Sehingga Soekarno tidak langsung memutuskan hubungan diplomatik dan bergabung pada blok Sovyet. Pemberian ini terus berlangsung sampai terjadinya pergantian Presiden di Amerika Serikat, yakni ketika John F. Kennedy menggantikan Eisenhower.

Hingga akhirnya pada 5 Juli 1959 dekrit Presiden diumumkan dan semenjak saat itu kekuasaan mutlak ada pada Soekarno. Otomatis seluruh kebijakan Luar negeri Indonesia juga berada ditangan Presiden Soekarno, selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan. Soekarno berniat mempersatukan seluruh elemen Nasional agar mengabaikan pertikaian internal di kalangan mereka dan bersama-sama bersatu untuk mencapai tujuan nasional, yakni menghadapi kelompok neo-kolonialisme seperti Belanda yang masih ingin berkuasa di wilayah Indonesia. Di dalam negeri Indonesia sendiri, Soekarno yang sangat getol menyuarakan anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme memang memerlukan dukungan kaum komunis yang sejalan dengan ide-ide Soekarno. Lebih

---

<sup>119</sup> Dr. Hidayat Mukmin, *Loc Cit.*,hal 56.

lanjut lagi, dukungan PKI sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dalam situasi pasca dekrit Presiden 1959. Khususnya untuk mengimbangi pengaruh militer (Angkatan Darat) di pentas politik Indonesia. Selama kurun waktu itu Presiden Soekarno hanya memiliki kekuatan kecil saja yang terorganisir dengan baik selebihnya hanya mengandalkan kekuatan kharismanya dalam memikat massa yang tentu saja tidak terorganisir, sedangkan tentara memiliki kekuatan yang sangat terorganisir sangat baik. Karena kurangnya kekuatan pendukung yang terorganisir itulah, maka Soekarno dalam menghadapi bahaya lebih bergantung pada tentara daripada sebaliknya. Hal itulah yang mendasari mengapa Soekarno berusaha mengimbangi kekuatan terorganisir milik tentara dengan mencari dukungan kepada partai politik, dan partai yang dipilih oleh Soekarno adalah PKI<sup>120</sup>.

Padahal bagi tentara, khususnya Angkatan Darat kedekatan Soekarno dengan PKI adalah sebuah hal yang meresahkan, sebab tentara masih mencurigai komunis berupaya merebut kekuasaan persis seperti yang dilakukannya dalam insiden Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Meski demikian Pertentangan politik

---

<sup>120</sup> Mengapa Soekarno memilih PKI ? dalam bukunya *Soekarno dan Militer*, Herbert Feith mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemilu yang diadakan di Jawa pada 1957, PKI merupakan partai terbesar. Kedua, PKI mempunyai kelengkapan keorganisasian yang baik, luas dan cermat hingga menjangkau banyak massa. Mulai dari penduduk desa hingga kelas-kelas bawah di perkotaan. Ketiga, yaitu PKI dianggap paling mampu dan tangkas dalam mengerahkan massa pendukungnya kepada rapat-rapat umum dimana Soekarno berbicara. Sebagai timbal baliknya, PKI meminta perlindungan Soekarno terhadap tindakan-tindakan represif tentara dalam hal ini adalah angkatan darat yang ditujukan kepada PKI. Sebab, PKI menganggap Soekarno masih bisa mengendalikan angkatan darat . Baca Feith, Herbert (2001), *Soekarno dan Militer* (Dalam Demokrasi Terpimpin). Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

antara TNI (angkatan darat) dengan PKI, untuk sementara dapat di singkirkan oleh Soekarno, karena memfokuskan diri untuk bersama-sama melawan musuh dari luar dan mewujudkan kepentingan nasional, yakni mengusir Belanda dari wilayah Irian Barat.

Ketika pada tahun 1960, saat menghadiri sidang umum PBB di Amerika, Soekarno sekali lagi membujuk Amerika untuk membantunya memenangkan sengketa wilayah Irian Barat terhadap Belanda. Soekarno mengatakan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap isu ini merupakan pengobatan segala sesuatu yang sakit dalam hubungan diplomatik antar dua negara diwaktu sebelumnya (Intervensi Amerika dalam membantu pemberontak di daerah). Bagi Amerika saat itu figur Soekarno yang lebih condong kepada kaum komunis (PKI) membuat pihak Amerika berhati-hati dalam memberikan bantuan, termasuk bantuan untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia. Figur seorang Soekarno cenderung dianggap sebagai batu sandungan bahkan musuh potensial Amerika dalam usahanya melawan hegemoni ideologi komunis yang berkembang pesat yang saat itu dipimpin oleh Sovyet. Namun Presiden Amerika Eisenhower, sampai akhir masa jabatannya sebelum digantikan oleh John F. Kennedy pada tahun 1961 tetap tidak merubah garis kebijakan luar negerinya, sebab Amerika pada saat yang sama juga terus di tekan oleh Belanda.

## Beralih kepada Uni Sovyet

Ketika permasalahan Irian Barat mulai diangkat kembali oleh Soekarno akibat Belanda yang tidak segera menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia pasca penandatanganan Perjanjian KMB<sup>122</sup>, serta kegagalan mendapatkan pengadaan senjata dari Amerika, Soekarno mulai berpaling kepada Sovyet. Usaha diplomatik yang dilakukan Indonesia selalu saja menemui jalan buntu akibat teguhnya niat Belanda untuk mempertahankan wilayah itu. Hingga akhirnya, melalui Trikora, Soekarno mengultimatum Belanda untuk bersiap-siap menghadapi Indonesia yang akan merebut kembali wilayah Irian Barat dengan memakai cara militer.

Hubungan bilateral resmi Indonesia-Uni Sovyet dimulai ketika masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo di gantikan oleh kabinet Wilopo pada tanggal 1 Agustus 1953. Saat itulah kabinet Wilopo memutuskan untuk mengadakan hubungan bilateral resmi dengan Uni-Sovyet. Keinginan itu terkabul ketika Menteri Luar Negri Sovyet, Molotov setuju terhadap hal tersebut dengan menyetujui penunjukan duta besar Indonesia ke Moskow. Pada tanggal 13 April 1954, duta besar pertama yang ditunjuk dari Indonesia untuk Rusia yakni Subandrio berangkat dengan mandat untuk disampaikan pada Presiden Voroshilov.

Dokumen pertama, yang merupakan suatu hasil periode awal dalam hubungan diantara Uni Soviet dan Indonesia adalah Pernyataan Bersama Uni Soviet - Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 September

---

<sup>122</sup>Dalam Perjanjian KMB tahun 1949 disebutkan masalah Irian Barat akan diselesaikan paling lama 1 tahun sejak penandatanganan. Namun sudah lebih dari 10 tahun Belanda mengulur-ulur waktu tidak berniat menyelesaikannya.

1956 di Moskow. Pernyataan itu dilakukan oleh Wakil Satu Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko dan Menteri Luar Negeri Indonesia R. Abdulgani. Isi dokumen tersebut membuktikan bahwa hubungan didirikan atas dasar lima prinsip yang diketahui oleh seluruh dunia, yaitu saling menghormati keutuhan teritori dan kedaulatan, tidak menyerang, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai<sup>123</sup>.

Sejak awal pemerintah Uni Soviet memang menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia terkait sengketa wilayah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan Uni Indonesia-Belanda, yang merupakan produk kesepakatan KMB. Uni Soviet langsung berkomentar bahwa hal tersebut kemenangan yang baru dan signifikan terhadap perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Selain itu di radio Moskow berita pemutusan Uni Indonesia-Belanda disebut sebagai pukulan lain terhadap kolonialisme yang ada di Asia. Bahkan pada saat dilakukan nasionalisasi besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan Belanda sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap Belanda, seorang pakar Ekonomi Soviet A. *Baturin* menilai bahwa program nasionalisasi itu sebagai usaha menghilangkan semua peninggalan kolonialisme dan pembangunan ekonomi nasional yang mandiri<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup>Kedutaan besar Russia untuk Indonesia, atau bisa dilihat pada: <http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-250-perjanjian-diplomatik-yang-dilupakan.html>

<sup>124</sup>Bilveer Singh (1994), *Bear and Garuda (Soviet-Indonesian Relation: From Lenin to Gorbachev)*. Jogjakarta :Gadjah Mada University Press. Hal 153-154.

Bisa dikatakan sejak awal memang Uni-Sovyet mendukung Indonesia terhadap usahanya merebut kembali wilayah Irian Barat. Soekarno yang sebelumnya gagal membeli senjata dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat demi tujuannya merebut Irian Barat kemudian berpaling ke Uni Sovyet. Soekarno pertama kali mengunjungi Uni Sovyet dari tanggal 23 Agustus sampai 12 September 1956. Dimana juga dalam kunjungan itu merepresentasikan sebuah langkah peningkatan dalam hubungan Indonesia dan Sovyet ke depan. Beralihnya Soekarno ke Sovyet dari Amerika saat itu membuahkan hasil. Pemimpin Uni Sovyet, Nikita Krushev pada saat itu telah mendeklarasikan dukungannya kepada Indonesia dalam usaha perjuangan mengembalikan daerah Irian menjadi milik Indonesia<sup>125</sup>.

Gambar 3.2 : Pertemuan Presiden Soekarno dengan PM Nikita Krushev<sup>126</sup>



---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hal 163.

<sup>126</sup> Lihat di [http://3.bp.blogspot.com/\\_CMpZz5b\\_wLQ/TQtz1xsG\\_I/AAAAAAAAABik/FMMlcQKEyxk/s1600/Khrushchev%2B3.10.1960.jpg](http://3.bp.blogspot.com/_CMpZz5b_wLQ/TQtz1xsG_I/AAAAAAAAABik/FMMlcQKEyxk/s1600/Khrushchev%2B3.10.1960.jpg)

Soekarno sendiri sebenarnya memang lebih condong kepada Uni Sovyet secara pribadi. Selain karena terkuaknya rencana busuk Amerika di Indonesia pada tahun 1958 yang mendukung pemberontakan daerah di Indonesia, juga secara pribadi Amerika (pada saat pemerintahan Presiden Eisenhower, sebelum diganti Oleh Presiden John F. Kennedy) tidak banyak memberikan kesan baik ataupun ikhtikad baik kepada Soekarno ataupun Indonesia. Soekarno mengungkapkannya ketika membandingkan penyambutannya saat di Washington dengan penyambutannya saat di Moscow pada tahun yang sama, tahun 1956 :

*“Di Moscow, 150 orang musisi yang memainkan lagu Indonesia Raya menyambut saya di lapangan udara walaupun saya tiba dengan pesawat Amerika. Saya meneteskan air mata kebanggaan. Bangga bahwa Negara kami sudah sampai mendapat penghormatan yang demikian. Dan sekarang, bangsa Amerika saya bertanya pada kalian, mengapa Eisenhower tidak memberikan saya kehormatan yang sama? Mengapa Presiden kalian mengacuhkan saya, secara sengaja menolak dan menghina saya?...Eisenhower tidak menjemput saya dari pesawat-OK. Ia tidak menyambut saya di depan pintu Gedung Putih-saya kira masih OK. Tetapi ketika ia membiarkan saya tunggu di luar di ruang depan mendinginkan telapak kaki saya, itu benar-benar tidak OK”<sup>127</sup>.*

Sekitar tahun 1956 saat pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo, -melalui Jendral Ahmad Yani-, telah melakukan pendekatan dan berhasil menyetujui nilai kontrak pembelian peralatan militer kepada Negara-

---

<sup>127</sup> Cindy Adams, *Op.Cit.*, hal 295.

negara anggota Blok Timur yakni Polandia dan Cekoslovakia seharga 80 juta dolar. Angkatan udara Indonesia segera mengirimkan pilotnya untuk berlatih ke Cekoslovakia dan kemudian segera mendapatkan 30 pesawat Mig-15 dari Negara itu. Sedangkan atas jasa Polandia sebagai penghubung dengan pihak Rusia, Indonesia mendapatkan 2 kapal selam kelas *Wiskhey*. Pelatihannya awaknya sendiri dilakukan di Polandia, kedua kapal selam itu hadir pada tahun 1959 serta kemudian diberi nama RI Tjakra dan RI Nanggala<sup>128</sup>. Bahkan di tahun 1956 itu pula setelah kunjungan Presiden Soekarno yang pertama kali ke Moscow, Sovyet telah menawarkan kredit senilai 100 juta dolar. Namun tawaran ini tidak segera disetujui oleh parlemen Indonesia. Baru pada tahun 1958 ketika proposal pembelian senjata ke pihak Amerika tidak menampakkan hasil akhirnya parlemen menyetujui bantuan tersebut dan mulailah peralihan kerjasama dilakukan dengan negara-negara blok komunis termasuk Soviet<sup>129</sup>.

Indonesia baru mendapatkan bantuan peralatan militer dari Amerika dan Blok Barat pada tahun 1958. Sebelumnya, karena desakan Belanda yang juga sesama anggota NATO tidak ada satupun bantuan militer baik dari Amerika ataupun Negara-negara anggota Blok Barat.

Bantuan militer yang diberikan Amerika pada tahun 1958 itupun hanya sekedarnya seharga 7 juta dolar sebagai hasil diplomasi cerdas Presiden Soekarno terkait

---

<sup>128</sup> Atmadji Sumarkidjo, *Op.Cit.*, hal xxii

<sup>129</sup> Asian Survey, Vol.1, no.1 (Maret 1961). Dalam tulisan Guy J. Pauker "General Nasution's Mission to Moscow". Hal 13-22. Dapat diunduh dalam jurnal JSTOR dengan alamat <http://links.jstor.org/sici?sici=0004-4687%28196103%291%3A1%3C13%3AGNMTM%3E2.0.CO%3B2-T>

penangkapan Allan Pope atas aksinya mendukung pemberontak di Indonesia.

Pasca terjadi perubahan orientasi kerjasama militer dari Blok Barat ke Blok Timur, arus pengiriman peralatan militer berat terus mengalir ke angkatan perang Indonesia. Ketika Nikita Khrushchev mengunjungi Indonesia pada bulan februari 1960, tawaran kredit lunak senilai 250 juta dolar berhasil disepakati. Ditambah pelimpahan sejumlah bantuan yang berdampak besar termasuk 200 tempat tidur rumah sakit. Pada tahun bulan desember 1960, sebagai tindak lanjut dari dukungan Sovyet kepada perjuangan Indonesia merebut kembali wilayah Irian Barat, Soekarno mengutus Jendral A.H Nasution untuk bertolak ke Moskow.

Hasilnya adalah, pemerintah Indonesia dan Sovyet sepakat mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan nilai kontrak senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Kontrak penjualan senjata senilai 2, 5 miliar dolar itu kemudian terwujud dalam ratusan peralatan tempur canggih dari Sovyet baik berupa pesawat maupun kapal perang. Kemudian hal tersebut diulangi pada tahun 1961, Jendral Nasution kembali dikirim langsung ke Moskow untuk menjajaki pengadaan senjata lebih lanjut dengan Uni Sovyet, dan kemudian menyetujui tambahan kontrak pengadaan senjata senilai perkiraan 450-500 juta dolar. Indonesia telah menjadi penerima bantuan militer non-komunis terbesar dari Blok Sovyet dan penerima bantuan ekonomi terbesar setelah India dan Mesir<sup>130</sup>.

---

<sup>130</sup> Usha Mahajani, "*Soviet and American Aid to Indonesia 1948-1968*", (Athens, Ohio: Ohio University, Center for International Studies, 1970, hal.16) dikutip oleh Dr. Michael Leifer. *Op. Cit.*, Hal. 92.

Hal lain yang patut dicatat dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Sovyet ini, perdana menteri Sovyet saat itu dalam pidatonya di kongres partai ke 21 sekitar januari tahun 1959 mengatakan : *"We do not engage in charity. The Sovyet Union gives help on a fair commercial basis"*. Meski pemberian kredit ini secara terang-terangan dilakukan atas dasar pertimbangan komersil, namun secara politik Sovyet sangat-sangat mendukung dan berpihak pada Indonesia terkait usaha merebut kembali salah satu wilayahnya dari tangan Belanda. Melalui pidato Mikoyan yang termuat pada surat kabar resmi *Sovyet Pravda*, tanggal 7 Januari 1961 dikatakan bahwa<sup>131</sup> :

*"Kita (Uni Sovyet) secara prinsipil adalah musuh dari kolonialisme. Lenin yang Agung mengajarkan pada kita untuk membantu dengan segala cara terhadap perjuangan orang-orang dari sebuah bangsa yang terjajah untuk kebebasan dan kemerdekaan mereka. Dalam kasus inilah kita memenuhi tugas mulia yang diperintahkan oleh Lenin. Kita sangat memahami kegelisahan rakyat Indonesia yang dihadapkan sebuah fakta bahwa kolonialisme masih bercokol disalah satu wilayahnya (Irian Barat) dan kita juga sangat paham kebulatan tekad rakyat Indonesia untuk menghilangkan masalah ini dari tubuh cinta kebebasan serta tubuh kemerdekaan Indonesia..."*

Hal ini membuat Nasution, seorang jendral TNI-AD yang anti-komunis ternyata bersimpati dan sangat menghargai terhadap apa yang dilakukan oleh Uni Sovyet ini. Sebelum meninggalkan Moskow, di airport Nasution sempat mengatakan *"Kita orang Indonesia menemukan teman*

---

<sup>131</sup> Seorang soviet yang memimpin delegasi dalam negosiasi dengan pihak Indonesia.

*sebenarnya di Rusia*".<sup>132</sup> Padahal diawal berpalingnya kerjasama pembangunan kekuatan militer Indonesia dengan berkiblat ke Uni Sovyet terasa ada keengganan, khususnya di kalangan Staf Umum Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jendral Nasution. Di kalangan SUAD belum ada pemikiran yang cukup matang untuk berpaling ke blok Sovyet yang komunis, sebab kecurigaan angkatan darat terhadap paham komunis masih dominan. Saat itu pilihan tetap dipatuhi demi keberhasilan perjuangan merebut Irian Barat<sup>133</sup>.

Selain itu Presiden Soekarno tidak lupa mengingatkan perlunya pemahaman geografi yang luas agar bisa membangun pertahanan secara baik dan tepat :

*"Saya menghendaki agar supaya kita semuanya sadar dan yakin, bahwa geopolitik kita akan menentukan kita sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan bahwa untuk mempertahankan tanah air kita itu, kita harus mengetahui segala seluk beluk daripada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia ini (geografi Indonesia)... Nah, kalau saudara-saudara tidak tahu atau tidak mau mempelajari geopolitik bangsa sendiri, bagaimana saudara bisa membangun satu pertahanan yang baik"*<sup>134</sup>

Kemesraan hubungan antar Indonesia dan Uni Sovyet ini kemudian terwujud dalam ratusan jenis peralatan militer yang langsung menaikkan kekuatan tempur militer Indonesia secara drastis, khususnya bagi angkatan laut dan udaranya. Jika pada tahun 1960

---

<sup>132</sup> Guy J. Pauker. *Op. Cit.*, hal 15-17.

<sup>133</sup> Dr. Hidayat Mukmin, *Loc Cit.*, hal 59.

<sup>134</sup> Iman Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso (2010) *Bung Karno (Masalah Pertahanan-Keamanan)*. Jakarta: Grasindo. Hal 367

kekuatan angkatan laut RI hanya dalam tataran moderat dan tidak cukup kuat untuk operasi lintas laut ke Irian apalagi menghalau kekuatan Belanda disana, maka pada tahun 1961 kekuatan angkatan laut Indonesia telah mencapai tahap “mengerikan” jika diadu dengan kekuatan militer Belanda. Berikut adalah gambaran kekuatan angkatan laut Indonesia yang dimiliki dan dipersiapkan untuk kampanye merebut Irian Barat melalui konfrontasi militer.

Tabel 3.3 Kekuatan TNI-Angkatan Laut dalam konfrontasi merebut Irian Barat<sup>135</sup>

Jenis	Jumlah	Keterangan
<b>Kapal Selam</b>	12 Kapal	Kelas Whiskey
<b>Kapal Penyelajah Berat</b>	1 Kapal	Kelas Sverdlov, diberi nama KRI Irian.
<b>Fregat</b>	8 Kapal	Kelas Riga
<b>Kapal Perusak</b>	8 Kapal	Kelas Skory
<b>Kapal Penyerang Cepat berpeluru kendali</b>	16 Kapal	Kelas Komar
<b>Kapal Cepat Torpedo</b>	14 Kapal	Kelas P-6
<b>Kapal pemburu kapal selam</b>	16 Kapal	Kelas Kronstad
<b>Kapal Penyapu Ranjau</b>	6 Kapal	Kelas T-43
<b>Kapal Meriam</b>	18 Kapal	Kelas BK

---

<sup>135</sup> Majalah Angkasa Edisi Koleksi No.61. *Kapal Perang Indonesia- Sejarah dan Perkembangannya*. Edisi September 2009. Hal 11.

Gambar 3.4 : Kapal Selam ALRI buatan Uni Sovyet  
“Whiskey Class”<sup>136</sup>



Inilah yang ditakuti pihak Belanda dari kekuatan angkatan laut Indonesia, dimana kehadiran kapal selam terancangih pada masa itu dari Sovyet, kapal selam yang dimaksud adalah kapal selam kelas Whiskey. Indonesia memiliki kapal selam tipe ini sekitar 12 buah. Sebagai tambahan, Kapal-kapal selam kelas Wiskhey dari Uni Sovyet Ini telah dilengkapi torpedo paling canggih di zamannya. Tipe SAET-50, torpedo jenis baru yang dapat mencari sasarannya sendiri. Teknologi ini hanya dimiliki oleh Amerika dan Sovyet saat itu, dan Indonesia satu-satunya di luar Amerika dan Uni Sovyet yang memiliki torpedo jenis tersebut<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> Lihat di <http://indomiliter.files.wordpress.com/2012/01/armadapalselamindonesia.png>

<sup>137</sup> Atmadji Sumarkijo, *Op. Cit.*, hal xxix

Selain itu angkatan laut Indonesia juga mendapat satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia saat itu, buatan Sovyet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi. Inilah KRI Irian, sebuah kapal perang yang memiliki bobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira. Bandingkan dengan kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1.600 ton. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada negara lain manapun, kecuali Indonesia<sup>138</sup>.

Gambar 3.5 : KRI Irian (Jenis Kapal Penjelajah Berat)<sup>139</sup>



KRI Irian adalah salah satu kapal kelas *Cruiser* paling berbahaya di dunia saat itu dan nyaris sebanding kekuatannya dengan kapal-kapal tempur terbaik Amerika, USS *Iowa*, USS *Wisconsin*, dan USS *Missouri* dari kelas

---

<sup>138</sup> Tulisan Adi Wicaksono (Pemerhati Sejarah Politik dan Redaktur Global Tangsel ) Artikel berjudul “*Isu Papua dan Korelasinya Dengan Peta Kekuatan Militer di Era 1960*”. Bisa dilihat pada <http://globaltangsel.com/rubrik/opini/baca/9/isu-papua-dan-korelasinya-dengan-peta-kekuatan-militer-di-era-1960/>. Diakses 13 Februari 2012.

<sup>139</sup> Lihat <http://2.bp.blogspot.com/AQ24iUqpJsA/TWSDC93knBI/AAAAAAAAANo/otA06oaKuhc/s1600/kri-irian.jpg>

*Battleship* yang lebih besar. Pertahanan anti serangan udaranya pun sangat kuat, Ada 4 buah turet (2 depan, 2 belakang), masing-masing memiliki 3 laras meriam kaliber 5,9 inci dengan pergerakan independen. Untuk membantu membombardir kapal musuh, terdapat pula 12 meriam kanon kaliber 3,9 inci. KRI Irian diperlengkapi persenjataan anti serangan udara (AA Guns) dengan 4 pucuk kaliber 30 mm dan kanon serbaguna (V-11M) kaliber 37 mm. Sedangkan untuk menghajar kapal selam musuh disediakan peluncur torpedo diameter 533 mm sebanyak 10 buah. Sedianya, KRI Irian hendak digunakan untuk (sekedar) mengusir armada Hr Ms Karel Dorman di perairan Irian Barat, sekaligus untuk mengamankan keseluruhan Operasi Trikora. Kedatangan kapal ini segera membuat Belanda mengurangi secara drastis kekuatannya di Irian<sup>140</sup>.

Untuk angkatan udara, angkatan perang Indonesia menjadi armada udara paling ditakuti di seluruh dunia saat itu. Indonesia memiliki ratusan pesawat yang dipersiapkan untuk berperang dengan Belanda. Selain persenjataan yang baru dibeli dari Uni Sovyet Indonesia juga menyiagakan pesawat perangnya yang berasal dari Negara Blok Barat. Dimana peralatan itu didapat Presiden Soekarno yang memanfaatkan terungkapnya keterlibatan CIA dalam mendukung pemberontakan di daerah-daerah sebelumnya. Gambaran kekuatan angkatan perang udara Indonesia sebagai berikut :

---

<sup>140</sup> Tulisan Leo Kusuma dengan judul “Kemanakah KRI Irian” dapat dilihat di <http://umum.kompasiana.com/2009/01/14/kemanakah-kri-irian/>

Tabel 3.6 : Kekuatan TNI-Angkatan Udara dalam konfrontasi merebut Irian Barat<sup>141</sup>

Jenis	Jumlah	Keterangan
<b>MiG-21 Fishbed.</b>	20 pesawat	Pesawat pemburu supersonic
<b>MiG-15</b>	30 pesawat	Pesawat pemburu
<b>MiG-17</b>	49 pesawat	Pesawat tempur high-subsonic
<b>MiG-19</b>	10 pesawat	Pesawat tempur supersonic
<b>Tu-16 Tupolev</b>	24 pesawat ( jenis Tu-16 Badger A dan B)	Pembom jarak jauh strategis <sup>142</sup>
<b>Il-28 Ilyusin</b>	18 pesawat	Pembom sedang
<b>B-25 Mitchell</b>	4 Pesawat	Pembom taktis
<b>B-26 Invader</b>	2 Pesawat	Pembom taktis
<b>MI-6</b>	9 helikopter	Helikopter angkut
<b>MI-4</b>	41 helikopter	Helikopter serang darat
<b>An-12B Antonov</b>	Beberapa	Pesawat angkut berat
<b>C-47 Dakota</b>	24 Pesawat	Pesawat angkut medium
<b>C-130 Hercules</b>	9 Pesawat	Pesawat angkut medium

Gambar 3.8 : Mig 19 AURI (Pesawat Tempur Supersonic)<sup>143</sup>



<sup>141</sup> Majalah Angkasa Edisi Koleksi No.73. *Operasi Udara Trikora*. Tahun 2011. Hal 37.

<sup>142</sup> Negara yang mengoperasikan pesawat pembom jarak jauh strategis saat itu hanya 4. Yakni Amerika, Soviet, Inggris dan Indonesia.

<sup>143</sup> Lihat <http://irwan.net/wp-content/uploads/2009/09/Mig-19-480x267.jpg>

Gambar 3.9 : Mig 21 AURI (Pesawat Pemburu Supersonic)<sup>144</sup>



Salah satu senjata yang menambah *deterrent effect* terhadap kekuatan militer Indonesia adalah kehadiran pesawat pembom canggih asal Sovyet yakni pesawat pembom strategis jarak jauh Tu (Tupolev) -16. Jumlah pesawat pembom yang di bawa pulang dari Sovyet sendiri itupun sampai berjumlah 24 buah. Indonesia mengakuisisi persenjataan ini sebagai jawaban untuk menghancurkan target yang paling dicari yakni kapal induk milik Belanda, *Karel Doorman*. Ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di asia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Madiun. Bahkan China dan Australia pun belum memiliki pesawat pembom strategis seperti ini. Pembom ini juga dilengkapi berbagai peralatan elektronik canggih dan rudal khusus anti kapal perang AS-1 Kennel, yang daya ledaknya bisa dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tempur Barat. Bahkan saat periode konfrontasi dengan Malaysia, armada TU-16 berani bertandang ke *air space* Malaysia Utara dan Australia tanpa ada intersepsi<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup> Lihat <http://img124.imageshack.us/img124/9976/mig21of7.jpg>

<sup>145</sup> Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 72 tahun 2011. *Pesawat Kombat TNI-AU* (Dari Legenda Churen Hingga Kedigdayaan Flanker). Hal 24-31

Gambar 3.10: Kiri (Armada Pembom Tu-16 dan Awaknya)<sup>146</sup>,  
Kanan (Pembom Tu-16 yang kini sudah dimusiumkan)<sup>147</sup>



Kesemua alutsista asal Uni Sovyet tersebut telah menjadikan angkatan bersenjata Indonesia menjadi sebuah kekuatan terbesar di Asia tenggara, khususnya di angkatan laut dan udaranya. Kehadiran 12 kapal selam kelas Whiskey, kapal penjelajah RI Irian, puluhan kapal Frigate, ratusan pesawat tempur canggih dan skuadron pesawat pembom yang dimiliki menjadikan kekuatan ALRI dan AURI begitu disegani dan ditakuti, sampai dikatakan kekuatan militer Indonesia saat itu sebagai salah satu yang terbesar dan terkuat, khususnya di belahan bumi bagian selatan.

Hal itu juga sesuai dengan amanat Presiden Soekarno saat itu yang hendak melakukan pembangunan military power sebagai *national building* bangsa Indonesia yang berpijak pada karakter geopolitik maritim.

*“Pada waktu saya mengamanatkan pembangunan kompartemen maritime, saya telah jelaskan bahwa geopolitisch bezien (dari pandangan geopolitik), tidak bisa lain bangsa Indonesia harus jadi bangsa*

---

<sup>146</sup> Lihat [http://i401.photobucket.com/albums/pp97/r\\_adrie/100\\_8022.jpg](http://i401.photobucket.com/albums/pp97/r_adrie/100_8022.jpg)

<sup>147</sup> <http://adiewicaksono.files.wordpress.com/2009/02/tupolevtu163ft1.jpg>

*maritim. Oleh karena geo-nya, serta pulau-pulau sampai beribu-ribu, laut, laut, laut, pendek kata geografi kita, itu sebagian dari geopolitik, menunjukkan tanah air kita adalah satu kepulauan, archipelago...Manakala kita menjadi satu Negara maritim, bahkan saya berkata, tidak hanya bisa menjadi satu Negara maritim yang kuat, bangsa maritim yang kuat, jikalau jiwa kita adalah jiwa pelaut kembali, jiwa bahari, jikalau kita memiliki peraltan bahari, tetapi juga jikalau kita mempunyai angkatan laut sebagai military power yang kuat. Angkatan laut sebagai military power adalah salah satu unsur mutlak bagi pembangunan, nation building bahari ini...<sup>148</sup>"*

Kesemua persenjataan itu kemudian menambah keberanian Soekarno untuk menyatakan perang dengan Kerajaan Belanda jika tidak segera angkat kaki dan menyerahkan wilayah Irian Barat Kepada Indonesia.

---

<sup>148</sup> Salah satu isi amanat Presiden Soekarno pada Rapat Para Panglima ALRI di Kartika Bahari Tanjung Priok, Jakarta 17 Juni 1965 dengan judul "*Untuk Menjadi Bangsa Bahari Yang Kuat, Angkatan Laut Harus Kuat*". Bisa dilihat dalam buku Iman Toto K.Rahardjo dan Suko Sudarso. *Op. Cit.*, Hal 189.



## BAGIAN EMPAT: ANCAMAN PERANG SEBAGAI JAWABAN

---

*"Dengan kekuatan Militer yang cukup, suatu Negara mungkin tidak perlu berunding..."(Schelling)<sup>149</sup>*

### Pembangunan Kekuatan Militer Sebagai Kekuatan Politik Negara

Pada tahun 1960, tensi di wilayah Irian Barat semakin meningkat. Indonesia siap menyusupkan gerilyawan-gerilyawannya ke pedalaman Irian dan semakin giat pula membangun, menggelar dan mempertunjukkan kekuatan militernya yang besar. Upaya Indonesia yang terus gencar membangun persenjataan militernya dianggap sebagai persiapan untuk melakukan agresi terhadap kedudukan Belanda di Irian Barat. Belanda kemudian membalasnya dengan mengirimkan kapal induknya "Karel Doorman" ke perairan di sekitar pulau Irian untuk bersiap-siap mempertahankan wilayah yang diklaimnya itu.

---

<sup>149</sup> Thomas C. Schelling (1980), *The Strategy of Conflict*. Bolton: Harvard University Press. Hal.168.

Kemudian sekitar april 1961 juga secara tiba-tiba Belanda membentuk Dewan Irian yang akan menyelenggarakan suatu referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Belanda juga mengajukan usul tentang hal ini kepada majelis umum PBB September 1961. Dalam usul itu pula pihak Belanda mengajukan resolusi tentang Irian Barat sebagai masalah “dekolonisasi” dan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) dalam sidang umum PBB, yang bertujuan memisahkan Irian Barat secara permanen dari Republik Indonesia. Belanda bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat pada PBB, selanjutnya PBB meminta Belanda untuk memerdekakan daerah itu dalam jangka waktu 16 tahun, dan selama itu pula Belanda bersedia memberi bantuan biaya sebesar 30 juta Dolar setiap tahunnya. Namun, tanpa menunggu persetujuan PBB, tiba-tiba Belanda mendirikan Negara Boneka Irian lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaannya. Tindakan inilah yang seperti menantang Indonesia untuk bertindak lebih tegas dan keras<sup>150</sup>.

Maka Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno segera mengeluarkan maklumat “Trikorla” di Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Isi Trikorla itu sangat-sangat tegas bahwa Indonesia siap melakukan apapun untuk mendapatkan haknya kembali. Peristiwa ini menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Ini juga merupakan sebuah bentuk peringatan kepada pihak Belanda bahwa Indonesia akan melakukan apapun untuk merebut kembali wilayah Irian

---

<sup>150</sup> Drs. Suwanto, dkk. (2002), *Sejarah Nasional dan Umum 3* (kelas 3 SMP). Semarang : Aneka Ilmu.Hal. 59.

sekalipun itu dengan cara berperang. Isi Trikora adalah sebagai berikut :

- 1) Gagalakan Pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda
- 2) Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Komando untuk mengorganisasi penyerbuan ke wilayah Irian Barat dalam rangka konfrontasi militer dengan Belanda juga dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962. Disebut dengan Komando Mandala dengan Mayjen Soeharto sebagai pimpinannya. Nama operasi perebutan wilayah Irian Barat sudah pula di umumkan, yakni Operasi Jayawijaya. Untuk melaksanakan tugas itu, Komando Mandala melakukan langkah-langkah penting, diantaranya: merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer serta mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat. Operasi Jayawijaya merupakan rencana operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Para ahli sejarah militer juga mengatakan bahwa operasi militer ini, -yang menggabungkan unsur-unsur kekuatan darat, air dan udara-, akan menjadi operasi perang terbesar yang akan dilaksanakan pasca Perang Dunia ke-2 di wilayah pasifik<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Artikel berjudul : *Presiden Soeharto Tentang Operasi Jayawijaya*. Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer) Nomor 1 Tahun 1. Edisi April 1987. Hal 15.

Sementara itu pada tahun 1961 terjadi pergantian Presiden di Amerika. Presiden Eisenhower habis masa jabatannya dan digantikan oleh Presiden John F. Kennedy. Pergantian pucuk pemerintahan ini sedikit mengubah karakter diplomasi Amerika, saat itu Presiden Kennedy berusaha mendekati lagi Presiden Soekarno. Jika sebelumnya Presiden Soekarno sangat kecewa terhadap perlakuan Presiden Eisenhower kepadanya, kini Presiden penggantinya menunjukkan hal yang berbeda. Kennedy ternyata lebih bisa merangkul dan berteman dengan Soekarno.

Kebijakan luar negeri Amerika terhadap masalah Irian Barat yang sebelumnya jelas-jelas berpihak pada Belanda kini cenderung menjadi netral. Amerika tidak lagi memihak kepada Belanda ataupun Indonesia secara eksplisit. Pertimbangan yang dipakai adalah disatu sisi Amerika tetap merasa sebagai sekutu dengan Belanda. Oleh karena itu Amerika Serikat tidak serta merta mendukung total Indonesia terkait sengketa ini. Sementara disisi lain, Amerika menyadari jika mendukung Belanda secara total maka otomatis Indonesia semakin dekat dengan Uni Sovyet. Apalagi situasi politik di Indonesia, PKI semakin kuat dan ini sangat membahayakan kepentingan Amerika yang juga mengincar Indonesia.

Bagaimanapun Irian Barat yang terancam terjadinya perang dengan satu sekutu kuat di Eropa, dan Indonesia lah yang secara langsung menjadi tempat perebutan pengaruh antara Amerika dan Uni Sovyet. Washington secara umum jelas bersimpati kepada Belanda, untuk itulah agar Belanda tidak kehilangan muka, sekaligus Amerika Serikat dimata Indonesia terlihat netral kemudian diusulkan untuk dibentuknya sebuah perwalian PBB. Hal

lain yang cukup mengejutkan Belanda adalah kenyataan bahwa Amerika menyatakan tidak akan mendukung Belanda secara militer saat Indonesia menyerang nanti<sup>152</sup>.

Pasca diumumkannya Trikora, Presiden Kennedy semakin khawatir dan cemas terkait sengketa ini. Menurutnya sengketa ini dapat mengganggu stabilitas Internasional, sebab seperti yang dikhawatirkan Kennedy konflik ini akan secara otomatis mendekatkan Indonesia kepada Uni Soyet. Hal ini diungkapkan salah satu staf penasehat Presiden Kennedy, Robert Korner yang menyampaikan bahwa tidak dapat dielakkan lagi cepat atau lambat Irian Barat akan beralih ke Indonesia. Satu-satunya pertanyaan yang muncul adalah akankah Amerika terlibat dalam proses tersebut dan oleh karenanya mendapat keuntungan, atau akankah kita biarkan isu tersebut dimanfaatkan oleh blok lawan. Semua dukungan ekonomi dan militer yang dapat Amerika berikan pada Soekarno akan lebih menguntungkan obsesinya yang menggebu. Jadi dengan kegagalan strategi Amerika Serikat di PBB, maka Amerika harus melepaskan cara itu dan mengubah secara terang-terangan memihak Indonesia selagi masih ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan politis dari kasus ini<sup>153</sup>.

Kemudian sesuai dengan perkembangan situasi Trikora, yang selanjutnya diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut<sup>154</sup>.

---

<sup>152</sup> Bradley R. Simpson, *Op. Cit.*, Hal.73-77.

<sup>153</sup> Robin Osborne, *Op. Cit.*, hal 59.

<sup>154</sup> Marwati Djoened Poesnegoro dan Nugroho Notokusanto (1992), *Sejarah Nasional Indonesia VI : Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. Hal 443.

- Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
- Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara *de facto* diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.

Sedangkan strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.

- a. Tahap *Infiltrasi* (penyusupan) (sampai akhir 1962),  
yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas *de facto* yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
- b. Tahap *Eksplorasi* (awal 1963),  
yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
- c. Tahap *Konsolidasi* (awal 1964),  
yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pada tanggal 15 Januari 1962 sebagai tindakan dari fase infiltrasi telah dilakukan operasi penyusupan yang dilakukan oleh beberapa kapal MTB (Motor Torpedo Boat) disekitar perairan Laut Aru milik angkatan Laut Indonesia. Namun, operasi ini diketahui oleh pesawat mata-mata Belanda, hingga pecahlah pertempuran pertama yang dikenal dengan Pertempuran Laut Aru. Insiden ini meminta korban jiwa dari pihak angkatan laut Indonesia akibat persenjataan yang tidak seimbang dalam pertempuran itu. Korban tewas adalah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno yang turut tenggelam beserta kapalnya KRI Macan Tutul.

Kemudian berdasarkan laporan dari pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat yang mengintai langsung secara rahasia dari udara terlihat telah dilakukan persiapan besar-besaran dalam pengerahan dan pengelaran kekuatan militer Indonesia dalam kampanye merebut Irian Barat. Pesawat mata-mata ini diterbangkan dari Filipina ke Darwin untuk misi pengintaian. Dari ketinggian 7000 kaki, pesawat mata-mata ini berhasil mengidentifikasi kekuatan militer yang tengah dipersiapkan oleh Indonesia. Saat itu melalui pengamatannya terbukti sudah bagi pihak Amerika bahwa Indonesia sudah dilengkapi ratusan pesawat tempur canggih dan juga beberapa puluh pesawat pembom. Data intelijen inilah yang dijadikan dasar pertimbangan Amerika Serikat untuk mendesak Belanda mengakhiri ke-*ngototan*-nya untuk tetap mempertahankan Irian Barat<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> Baca Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 72 tahun 2011. *Pesawat Kombat TNI-AU* (Dari Legenda Churen Hingga Kedigdayaan Flangker). Hal 37

Presiden Kennedy berkesimpulan Belanda tidak akan menang bagaimanapun juga melawan kekuatan militer Indonesia yang dipersiapkan itu. Sejak itu Amerika mulai menekan Belanda agar mau berunding. Amerika menunjuk seorang diplomatnya yang bernama Ellswort Bunker, yang selanjutnya mengusulkan beberapa perundingan untuk penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Poin penting usulan Bunker itu antara lain berisi sebagai berikut :

- Belanda akan menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB
- Rakyat Irian Barat akan diberi hak untuk menentukan pendapatnya melalui referendum.

Mengenai poin yang disampaikan ini Indonesia menyetujui namun Belanda bersikukuh untuk menolak. Namun setelah mendengar informasi yang berhasil diperoleh oleh pesawat mata-mata Amerika mengenai besarnya kekuatan militer yang dipersiapkan Indonesia dalam merebut Irian Barat, ditambah kenyataan bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya yang lain tidak akan membantunya dalam perang jika benar-benar terjadi, membuat Belanda khawatir dan merasa tidak ada pilihan lain. Akhirnya Belanda mau menerima kenyataan bahwa ia harus angkat kaki dari bumi Irian.

Melalui diplomatnya Ellswort Bunker, Amerika mulai memediasi perundingan antara Belanda dengan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Subandrio serta Van Royen dan Schuurman yang mewakili Belanda<sup>156</sup>. Isi persetujuan itu adalah :

---

<sup>156</sup> Drs. Suwanto, dkk. *Op. Cit.*, Hal. 63.

1. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) selambat-selambatnya 1 Oktober 1962. Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB
2. Pasukan Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan di bawah kekuasaan UNTEA
3. Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.
4. Bendera Indonesia mulai berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962
5. Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963

Inti dari persetujuan itu adalah Belanda sepakat menyerahkan wilayah Irian Barat kepada kedaulatan Indonesia. Dan sekaligus mengakhiri sengketa Indonesia-Belanda terkait masalah Irian Barat. Tujuan akhir dari sebuah nilai strategis kekuatan militer sebagai penggentar dan penangkal pun tercapai, bahkan tanpa harus melalui perang.

## Arti Strategis Hadirnya Kekuatan Militer Dalam Usaha Merebut Kembali Irian Barat

Pasca disepakatinya perjanjian KMB, yang kemudian menjadi kepentingan nasional Indonesia, adalah bagaimana mengembalikan wilayah Irian Barat kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Belanda masih berkuasa di wilayah itu dan diindikasikan hendak membentuk Negara Boneka yang menjadi bagian dari kerajaan Belanda, maka agenda inilah yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Keamanan Nasional. Melihat pelaksanaan diplomasi yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun sejak masa penyerahan kedaulatan kepada Indonesia tidak pernah membuahkan hasil, bahkan Belanda cenderung tidak mau menyelesaikan sengketa ini dan justru bertujuan untuk menguasai kembali sebagian wilayah itu. Maka kemudian Presiden Soekarno memakai politik konfrontasi bersenjata sebagai jawaban atas berlarut-larutnya sengketa itu.

### Diplomasi Yang (tidak) Selalu Berhasil

Sejak permulaan sengketa wilayah Irian Barat, Indonesia sudah mengedepankan jalan-jalan diplomasi. Jalur diplomasi dimulai ketika masa penyerahan kedaulatan yang dilakukan pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Namun dalam konferensi itu masalah Irian Barat sejak awal memang sengaja ditunda-tunda oleh Belanda sebab mereka masih menginginkan wilayah Irian Barat masuk menjadi wilayahnya. Awalnya perundingan tentang Irian Barat diselesaikan secara bilateral diantara Indonesia dan Belanda, sebab saat itu pasca KMB Indonesia dan Belanda terikat sebagai sebuah Uni

Indonesia-Belanda. KMB memang menjadi jalan bagi Indonesia untuk segera mendapatkan pengakuan kedaulatan<sup>157</sup>, namun Belanda masih berusaha menginginkan wilayah Irian Barat sebagai salah satu bagian dari wilayahnya. Disinilah letak permasalahannya sebab bagi Presiden Soekarno kedaulatan wilayah Indonesia yakni dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Wilayah Irian Barat) seperti yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah harga mati dan pertaruhan bagi sebuah bangsa yang baru saja berdiri. Ketidakmauan Belanda menyerahkan wilayah itu sama artinya dengan pelecehan terhadap kedaulatan serta eksistensi keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara.

Negosiasi antar Indonesia dengan Belanda yang buntu ini kemudian membuat Indonesia mencari dukungan keluar bagi tercapainya kepentingan nasional lewat forum-forum Internasional seperti dengan membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB. Sekali lagi meski mendapat dukungan dari berbagai Negara yang bersimpati serta berpihak pada perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kembali haknya, namun masalah ini tidak bisa diselesaikan pula lewat jalur atau forum internasional sekelas PBB.

Presiden Soekarno lebih jauh menilai PBB adalah sebuah forum Internasional yang hanya menjadi alat bagi negara-negara Barat pemenang Perang Dunia ke-2 untuk kepentingannya sendiri beserta sekutu-sekutunya. PBB dianggap oleh Indonesia tidak sanggup merumuskan dan memberi jalan keluar yang baik terkait masalah Irian Barat. Padahal bagi Indonesia masalah Irian Barat ini adalah sebuah gambaran ancaman terhadap perdamaian dunia,

---

<sup>157</sup> Bagi pihak Belanda meyebutnya sebagai pemberian kedaulatan.

yakni dengan ditempatkannya kekuatan militer bangsa asing di sebuah wilayah dari suatu Negara yang berdaulat, yang termasuk kelanjutan dari usaha-usaha imperialisme dan kolonialisme. Soekarno menamakan Irian Barat sebagai sebuah pedang kolonial yang diarahkan ke jantung Indonesia dan ia berbicara tentang sebuah usaha untuk segera memecahkan permasalahan ini dengan caranya sendiri karena Belanda dan juga PBB gagal dalam jalan sejarah mengangkat nilai<sup>158</sup>.

Dalam pidatonya yang berjudul *To Build The Word a New* (Membangun dunia kembali) dihadapan sidang Umum PBB tahun 1960 Soekarno mengatakan<sup>159</sup> :

*“Dimana terdapat imperialisme dan dimana terdapat penyusunan kekuatan bersenjata yang serentak, maka keadaan memang berbahaya. Sekali lagi saya berbicara berdasarkan pengalaman. Begitulah keadaanya di Irian Barat. Begitulah keadaan di seperlima wilayah nasional kami yang pada dewasa ini masih teta membungkuk di bawah belunggu imperialisme...”*

*“Disanalah kami menghadapi imperialisme dan kekuatan bersenjata dari imperialisme. Di perbatasan daerah itu tentara kami berjaga didarat maupun dilautan. Kedua kekuatan bersenjata itu saling berhadapan, dan dapat saya katakan bahwa hal itu merupakan suatu keadaan yang eksplosif...”*

---

<sup>158</sup> Dr. P.B.R de Geus. *Op. Cit.*, Hal. 130.

<sup>159</sup> Soekarno (Pidato Sidang Umum PBB 1960). *Op. Cit.*,

## Kekuatan Muncul Dari Ujung laras Senapan

*“Orang tak akan berunding dengan maling dirumahnyanya.....” (Tan Malaka<sup>160</sup>)*

Ketika cara-cara diplomasi dan negoisasi tidak menghasilkan kebijakan ataupun jalan keluar. Indonesia mulai beralih untuk memakai cara-cara yang lebih keras. Presiden Soekarno kemudian mencanangkan kebijakan politik Konfrontasi terhadap Belanda sebagai jawaban atas kengototan Belanda untuk mempertahankan wilayah Irian Barat. Sebelum memulai konfrontasi secara fisik atau militer Indonesia memulainya dengan tekanan-tekanan yang bersifat ekonomi ataupun sosial. Namun apa yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak serta merta membuat Belanda menyetujui keinginan Indonesia untuk segera menyerahkan wilayah Irian Barat. Belanda malah semakin berniat untuk mempertahankan wilayah Irian Barat.

Mendekati akhir tahun 1961 Belanda melalui Menteri Luar Negeri-nya Dr. Joseph Luns melakukan lobi terhadap PBB agar mau segera melakukan *“Luns Plan”*. Luns Plan adalah sebuah proposal yang diajukan Belanda dengan tujuan administrasi sementara wilayah Irian Barat berada di bawah pengawasan Internasional dan nantinya akan mempercepat transfer kekuasaan kepada Negara boneka bentukannya yakni Papua Barat. Dengan jaminan Belanda bersedia melanjutkan dukungan finansial kepada Negara bonekanya itu. Namun hal itu ditolak oleh PBB, bersamaan dengan itu secara tiba-tiba beberapa kelompok elit pro-kemerdekaan bertindak sendiri membentuk Komite

---

<sup>160</sup> Seri Buku TEMPO : Bapak Bangsa (2010). *“TAN MALAKA (Bapak Republik Yang Dilupakan)”*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Hal. 40.

Nasional Dewan Papua. Komite itu yang terdiri dari 70 orang menyepakati nama Papua Barat sebagai nama Negara, Bintang Kejora sebagai Bendera dan lagu “*Tanahku Papua*” sebagai lagu kebangsaan. Belanda tanpa menunggu ijin PBB atau menyelesaikan masalah ini terlebih dulu dengan Indonesia dengan segera merestui Dewan Papua ini. Tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda. Namun apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini ternyata tidak mendapat dukungan dari warga Irian kebanyakan. Hal ini disebabkan ada *gap* yang besar antara kelompok elit pro-kemerdekaan ini (yang memiliki basis pendidikan Belanda) dengan mayoritas masyarakat Papua yang berada di pedalaman<sup>161</sup>.

Selain merestui Dewan Papua itu, usaha Belanda untuk mempertahankan wilayah Irian Barat ditunjukkan dengan pengiriman pasukan Marinir tentara kerajaan Belanda ke wilayah Irian Barat. Hal yang lebih keras lagi ditunjukkan dengan pengiriman kapal Induk Karel Doorman oleh Belanda sebagai persiapan untuk mempertahankan wilayah Irian Barat. Hal inilah yang kemudian memicu Presiden Soekarno untuk mengumandangkan Trikora yang menjadi puncak dari politik konfrontasi yang sebelumnya sudah dilakukan di bidang sosial dan juga ekonomi. Trikora ini menandai bahwa Indonesia mulai melakukan konfrontasi fisik atau memakai kekuatan bersenjata untuk mengusir Belanda dari wilayah Irian Barat.

---

<sup>161</sup> Robin Osborne, *Op. Cit.*, hal 54-56.

Tujuan Presiden Soekarno dengan unjuk kekuatan tadi adalah sebuah bentuk usaha menciptakan *sense of crisis* yang mengarah pada konflik yang tak dapat dielakkan jika tidak segera diselesaikan secara damai. Ancaman serbuan militer yang akan dilakukan oleh Indonesia juga menjadi senjata psikologis yang amat kuat terhadap niat Belanda untuk kembali menguasai kembali salah satu wilayah Indonesia. Negara eropa yang kecil ini tak akan punya keberanian untuk berperang jauh dari negaranya sendiri<sup>162</sup>. Keberanian Presiden Soekarno untuk menghadapi Belanda memakai kekuatan militer ditunjang oleh kemampuan Indonesia membangun dan memodernisasi kekuatan militernya sebelum dikumandangkannya Trikora.

Sikap politik Indonesia yang anti-imperialisme dan anti kolonialisme ini diterapkan sebagai bagian integral pertahanan Negara, yang selanjutnya menjadi acuan dalam doktrin militer TNI saat itu. Doktrin pertahanan negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari enam muatan doktrin pertahanan, yaitu (1) perspektif bangsa tentang perang; (2) komponen Negara yang terlibat perang; (3) pemegang kendali perang; (4) mekanisme pertanggung-jawaban; (5) strategi perang; dan (6) terminasi perang. Keenam muatan doktrin itu disusun dalam beberapa strata yang konsisten dari tingkatan politik, militer, hingga profesional. Di tingkatan politik, prinsip politik dari doktrin berisi beberapa hal yang berkaitan dengan tugas angkatan bersenjata untuk

---

<sup>162</sup> Majalah Angkasa-Operasi Udara Trikora. *Op. Cit.*, Hal 11.

menghadapi ancaman militer bersenjata. Di tingkatan militer, doktrin lebih banyak menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuatan militer akan digunakan untuk menghadapi ancaman. Untuk membangun kekuatan militer besar-besaran sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi ancaman Belanda serta mendukung politik anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, Indonesia mengalokasikan 60-70% anggaran belanja Negara untuk sektor pertahanan serta pembelian senjata besar-besaran ke Uni Sovyet.<sup>163</sup>

Alokasi anggaran pertahanan yang besar itu kemudian menjadikan meningkatnya kekuatan militer Indonesia, khususnya di angkatan laut maupun angkatan udara. Karena selain mengandalkan operasi militer darat untuk menguasai kembali wilayah Irian Barat, operasi militer harus didukung oleh angkatan udara dan angkatan laut. Peningkatan struktur kekuatan militer Indonesia saat itu disebabkan adanya modernisasi persenjataan yang diakuisisi oleh angkatan laut dan angkatan udara. Modernisasi kekuatan militer khususnya dalam angkatan laut dan udara ini ternyata juga menambah daya penggetar dan determinan Indonesia dalam menghadapi Belanda.

Di angkatan udara Indonesia berhasil membawa beberapa pesawat pembom strategis canggih dari Tupolev-16 Uni Sovyet . Pada masa itu di Asia hanya Indonesia yang memakainya untuk memperkuat angkatan udaranya. Pembom ini dipersiapkan sengaja untuk menenggelamkan kapal induk Karel Doorman milik Belanda yang saat itu

---

<sup>163</sup> Tulisan Andi Wijayanto dengan judul “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia”. Atau lihat pada <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Evolusi%20Doktrin%20Pertahanan%20Indonesia%20-%20Andi%20Widajanto.pdf>

dikirim untuk membantu pertahanan Belanda di Irian Barat. Selain itu ratusan pesawat tempur canggih juga dipersiapkan untuk payung operasi dalam rangka mengusir Belanda dari tanah Irian Barat. Angkatan udara Indonesia saat itu memiliki ratusan pesawat tempu MIG dari Uni Sovyet yang terkenal canggih zamannya. Di angkatan laut modernisasi dilakukan dengan membeli berbagai kapal dari Uni Sovyet. Antara lain pembelian kapal selam kelas Wiskey, Frigat, kapal destroyer dan kapal jenis korvet. Modernisasi yang dilakukan ini kemudian menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat di belahan bumi bagian selatan pada waktu itu.

Pilihan untuk membeli berbagai persenjataan ke Uni Sovyet sendiri dilakukan ketika sebelumnya Indonesia gagal melakukan rencana pembelian ke pihak Amerika Serikat. Sebagai sekutu Belanda di NATO, Amerika enggan untuk memberikan persenjataan yang diminta oleh Indonesia sebab takut akan digunakan untuk menghantam kedudukan Belanda di Irian Barat. Tapi pada akhirnya ketika perang sudah didepan mata, Amerika menyadari bahwa kekuatan militer Indonesia yang dipersiapkan dalam mengusir Belanda dari Irian Barat tidak bisa lagi diremehkan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pesawat mata-mata Amerika, *Show of Force* yang diperlihatkan dan dipersiapkan Indonesia sudah mencapai tahap mengerikan jika nantinya diadu dengan kekuatan militer Belanda. Bagaimanapun Belanda hanya akan kalah, baik dari segi kekuatan militer ataupun tekad untuk mempertahankan wilayah Irian Barat itu. Selain itu Jika sampai terjadi perang Indonesia akan jatuh ke pihak Blok Uni Sovyet, dan ini akan membahayakan kepentingan

politik Amerika dan juga sekutu-sekutu Amerika lainnya di sekitar wilayah Indonesia (termasuk Australia).

Dalam bahasa politik tingkat tinggi, Amerika mengibaratkan wilayah Negara-negara di Asia tenggara seperti kartu domino yang berjejer. Jika salah satu kartu jatuh maka jatuh pula seluruh kartu domino itu (*domino effect*)<sup>164</sup>. Soekarno yang sedang condong kepada pihak komunis dengan slogan anti neokolonialisme dan anti neo-imperialismenya akan “benar-benar” berpihak pada blok soviet jika perang merebut wilayah Irian Barat tetap dilaksanakan. Soviet akan mendukung Indonesia habis-habisan baik secara militer ataupun secara politik. Kedepan satu persatu Negara-negara lain di Asia tenggara akan mengikuti jejak Indonesia, karena saat itu demam nasionalisme sedang melanda negara-negara yang baru saja merdeka pasca Perang Dunia ke-2.

Amerika tentu tak ingin Belanda menambah masalah terhadap usahanya membangun hegemoni politik yang bertujuan membendung pengaruh paham komunis di Asia Tenggara. Seperti yang dikatakan salah satu pejabat CIA, Richard Helms, bahwa jika sampai komunis memenangkan pengaruh di Indonesia yakni dengan mengambil simpati rakyat Indonesia terhadap perjuangan melawan Belanda yang juga termasuk blok Amerika, maka kemenangan yang tengah dikejar Amerika di Vietnam saat itu tidak akan berarti apa-apa. Atas pertimbangan strategis itulah betapapun sekelompok politisi Amerika Serikat ingin membantu Belanda melawan Indonesia, Presiden

---

<sup>164</sup> *Domino Effect* ini pertama kali diutarakan oleh John Foster Dulles, mantan Menlu AS tahun 1953 - 1959, yang menggambarkan pada saat itu (era perang dingin paska berakhirnya perang dunia 2) negara-negara di asia tenggara akan satu persatu jatuh ke blok komunis begitu mudah seperti permainan domino yang tersusun.

Amerika tetap menempatkan permintaan Jakarta pada prioritas pertama<sup>165</sup>.

Hal itulah yang mendasari Amerika untuk ikut berbalik memaksa Belanda segera meyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia daripada menghadapi kehancuran. Politik konfrontasi bersenjata-pun diakhiri walau belum sempat terjadi perang besar untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dua hal yang menjadikan kepentingan atau cita-cita nasional Indonesia terkait pengembalian wilayah Irian Barat dapat tercapai, yakni tekad serta ancaman persiapan perang yang nyata untuk memaksa Belanda mengikuti apa yang menjadi kehendak Indonesia. Sama seperti yang diungkapkan von Clausewitz<sup>166</sup> dalam merumuskan definisi perang. Dimana ia mengatakan “Perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa musuh tunduk pada kehendak kita”.

Secara jelas sekali perang bukan hanya masalah *clash* atau tabrakan kekerasan, tetapi lebih-lebih adalah tabrakan kemauan atau kehendak masing-masing pihak untuk menundukkan lawan. Oleh sebab itu, suatu Negara tidak cukup hanya cakap membangun kemampuan menghasilkan kekerasan bersenjata tetapi juga harus membangun kehendak seuruh bangsa yang dilandasi semangat dan moral perjuangan yang kuat<sup>167</sup>. Seperti semangat dan perjuangan Indonesia demi melindungi kedaulatan serta keutuhan wilayahnya dalam kasus merebut Irian Barat.

---

<sup>165</sup> Majalah Angkasa-Operasi Udara Trikora. *Op. Cit.*, Hal 5.

<sup>166</sup> Baca Carl Von Clausewitz. (1976), *On War* (diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari Judul asli “*Vom Kriege*” oleh Michael Howard dan Peter Paret). Princeton University Press .

<sup>167</sup> Sayidiman Suryohadiprojo. *Op.Cit.*, Hal.36

## Kekuatan Militer Sebagai Instrumen Mewujudkan Kepentingan Nasional

Tak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara Negara dengan penggunaan kekuatan bersenjata ibarat dua sisi mata uang. Sebab Negara membutuhkan legitimasi untuk memakai kekerasan terutama untuk mewujudkan tujuan awal dari penyelenggaraan sebuah Negara, yakni mewujudkan tujuan keamanan nasional. Aman dari berbagai serangan dari luar yang mengancam kedaulatan sebuah Negara. Salah satu aktifitas yang dilakukan oleh Indonesia terkait legitimasi atas pemakaian kekerasan (kekuatan militer) oleh negara pada fase perjuangan kembali merebut Irian Barat adalah *state making*. Konsep *state making* seperti yang diungkapkan oleh Charles Tilly diartikan sebagai usaha Negara untuk menghancurkan atau mengeliminasi musuh-musuh dari luar yang masih menduduki teritorialnya. Usaha ini sekaligus bertujuan untuk meneguhkan eksistensi keberadaan Negara itu di hadapan Negara-negara lain yang menjadi lawannya<sup>168</sup>.

Seperti halnya *war making*, *state making* menjadikan konsep kedaulatan (*sovereignty*), khususnya kedaulatan atas sebuah wilayah menjadi sebagai tujuan ideal. Sehingga bertujuan agar didapatkannya pengakuan akan klaim wilayah sebuah Negara atas suatu teritori dari Negara-negara lainnya<sup>169</sup>. Dan hal ini dilakukan dengan cara mendemonstrasikan penggunaan kekuatan bersenjata. Ketika Proklamasi 1945 dikumandangkan

---

<sup>168</sup> Lihat Charles Tilly (1975), "Reflections on the History of European State-Making,"

<sup>169</sup> Skripsi, Tapiheru Joash E.S. (2006), *Proto-Citizenship dan Proses Pembentukan Identitas Kolektif di Imperium Roma* (Dari Negara Kota ke Negara Dunia). Jurusan Ilmu Pemerintahan-UGM. Hal. 21

rakyat Indonesia dan klaim wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, maka ketika salah satu wilayah tersebut masih diduduki oleh pihak asing yang berniat mengambil sebagian wilayah itu berarti merupakan sebuah bentuk ancaman nyata dan langsung terhadap keamanan nasional, identitas negara, eksistensi serta kedaulatan Indonesia.

Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia saat wilayah Irian Barat hendak dikuasai kembali oleh Belanda pada masa itu oleh Yahya Muhaimin dikategorikan sebagai ancaman tipe A, yakni merupakan tipe ancaman yang paling berat dihadapi oleh sebuah negara. Sebab mengancam langsung terhadap eksistensi hidup serta keutuhan dan kedaulatan bangsa serta Negara. Padahal eksistensi dan kedaulatan bangsa merupakan kepentingan nasional yang paling asasi. Contoh ancaman dalam kategori ini dapat berupa invasi militer, penguasaan terhadap wilayah, sumber ekonomi, politik dan budaya oleh Negara lain<sup>170</sup>.

Situasi seperti itulah yang dapat menggambarkan proses perjuangan Indonesia untuk merebut kembali wilayah yang bernama Irian Barat dari tangan Belanda melalui pemakaian kekuatan militer. Proses *state making* inilah yang diusahakan oleh Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945, yakni menjaga eksistensinya sebagai sebuah Negara yang baru merdeka. Sebab Belanda sebagai mantan penjajah masih berkeinginan untuk menguasai salah satu bagian dari wilayah territorial Indonesia. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima. Keinginan Belanda sama

---

<sup>170</sup> Yahya A. Muhaimin (2008), *Bambu Runcing dan Mesiu (Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia)*. Jogjakarta: Penerbit Tiara Wacana. Hal 26.

saja dengan memecah belah Indonesia serta hendak menggagalkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ahli geografi politik Theodore Ratzel sejak awal mengatakan bahwa sengketa perebutan wilayah, teritorial atau perbatasan merupakan barometer bagi keselamatan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain. Dalam isu “tapal batas itu” terletak berbagai persoalan tentang, identitas, sumberdaya, dan kedaulatan serta tentu saja silang selisih antar entitas politik. Karena faktor-faktor itu tidak mengherankan jika pemikiran-pemikiran geostrategik klasik pada umumnya sampai pada kesimpulan tentang perlunya kekuatan militer untuk mengamankan, melindungi, atau bahkan perlu untuk memperluas jangkauan tapalbatas<sup>171</sup>. Disinilah kemudian kekuatan militer hadir menjadi sebuah bentuk konkrit bagi negara untuk melaksanakan perwujudan keamanan nasional terhadap ancaman dari luar. Militer ditujukan pada pada seluruh entitas yang ada di dalam negara melalui penggunaan kekerasan fisik (*coercion*), ketika jalur-jalur diplomasi yang ditempuh berulang kali tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan. Apalagi bagi pihak negara yang terancam secara langsung kedaulatan maupun eksistensinya.

Melalui pemakaian kekuatan militer ini kemudian diaplikasikan sebagai sarana “*preventive defense*” atau pertahanan yang bersifat mencegah ancaman yang berasal dari luar. Yang dimaksud dengan *preventive defense* ini adalah strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi

---

<sup>171</sup> Tulisan Kusnanto Anggoro (2005), *Op. Cit.* Hal 63.

ancaman. Betapapun kecilnya itu atau betapapun kelihatan remeh, yang apabila tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang akan benar-benar konkrit mengancam secara langsung, terhadap eksistensi identitas dan juga kelangsungan hidup bangsa dan Negara<sup>172</sup>.

Disinilah militer atau kekuatan bersenjata menjadi inti dari kekuatan pertahanan Negara. Pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari ancaman. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Lebih dari itu juga sangat eratnya kaitan pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, maka dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan yang kuat) akan membuat negara lain tidak memandang sebelah mata terhadap suatu negara<sup>173</sup>.

Pertahanan Negara merupakan masalah pada tingkat penyelenggaraan negara. Pada tataran ini menyangkut segenap kekuatan nasional, *the full range of national power*. Mulai dari kekuatan ideologi, politik, sosial, budaya, watak bangsa, ilmu pengetahuan-teknologi, kapasitas industri, diplomasi, militer, dan kepemimpinan. Segenap kekuatan nasional inilah yang harus terpadu dan digunakan untuk membentuk pertahanan Negara<sup>174</sup>. Hal

---

<sup>172</sup> Yahya A. Muhaimin, *Op. Cit.*

<sup>173</sup> Mayor Laut (P) Salim, *Loc. Cit.*

<sup>174</sup> Supardi Yogi (1999) *Kembali Ke Rakyat (Kepedulian Seorang Prajurit)*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius. Hal.26.

ini pula yang sejalan dengan pemikiran Carl Von Clausewitz bahwa penggunaan kekuatan bersenjata adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Ancaman perang yang dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan memaksa kehendaknya pada Negara lain adalah merupakan sebuah bentuk penggunaan alat politik dan kelanjutan dari pergulatan politik.

Pada akhirnya setiap Negara menegakkan kepentingan nasionalnya terhadap negara-negara lain dengan menggunakan kekuasaan (*power*) melalui kekuatan militernya. Yakni bisa dengan cara mempertahankan kekuasaan, atau meningkatkan kekuasaan bahkan hanya untuk sekedar mendemonstrasikan kekuasaan yang dimiliki Negara itu<sup>175</sup>.

Negara dapat dianggap kuat jika ia punya kemampuan untuk menghalau segala musuh-musuhnya dari luar serta menjaga keamanan nasional dari pihak asing yang mengancam berbagai entitas yang ada di dalamnya (representasi ide, fisik atau institusional sebuah negara). Akan dianggap lemah jika negara tidak mampu menghalau atau minimal mempertahankan eksistensinya dihadapan Negara-Negara lain. Kuncinya ada pada sejauh mana kekuatan militer Negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keamanan nasional dan kepentingan nasional berhadapan dengan Negara lain yang menjadi ancaman bagi terwujudnya semua itu.

---

<sup>175</sup> Wahyono S.K. *Op.Cit.*, Hal.52

## BAGIAN LIMA: PENUTUP

---

*Dalam konstelasi dunia sekarang tanpa Angkatan bersenjata tidak ada satupun negara selamat*  
(Soekarno)<sup>176</sup>

### **Pentingnya Kekuatan Militer Dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional**

Melihat peristiwa pengembalian wilayah Papua Barat kepada Indonesia ditahun 1960-an, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penentu keberhasilan terbesar Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat dipengaruhi oleh keberadaan kekuatan militer Indonesia yang besar dan tangguh. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kekuatan militer Indonesia pada masa itu adalah kekuatan militer terbesar khususnya di belahan bumi bagian selatan. Kekuatan militer yang besar dan tangguh itu sengaja diadakan oleh pemimpin

---

<sup>176</sup> Judul pidato Presiden Soekarno dalam amanat kepada para siswa Seskoad di Istana Bogor, 15 Desember 1962. Lihat pada buku Iman Toto K.Rahardjo dan Suko Sudarso. *Op. Cit.*, Hal. 123.

Indonesia saat itu. Tujuannya jelas agar dapat dijadikan sebagai kekuatan politik Indonesia di dalam pentas politik Internasional yang digunakan mensukseskan usaha pemenuhan kepentingan nasional Indonesia saat itu, yakni mengembalikan wilayah Irian Barat yang selama ini masih dikuasai oleh pendudukan kolonial Belanda.

Dalam usaha pencapaian kepentingan nasional di pentas perpolitikan internasional itu keberadaan kekuatan militer Indonesia yang besar dan tangguh membawa implikasi politik yang nyata. Sebab sebelumnya ketika hanya mengandalkan diplomasi masalah sengketa kepemilikan wilayah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda tidak pernah menemui titik terang. Perjuangan politik yang dilakukan Indonesia melalui jalur diplomasi baik di forum bilateral antara Indonesia-Belanda maupun di forum internasional seperti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti gagal. Hasil yang paling terlihat adalah berlarut-larut dengan tidak adanya kejelasan arah. Bahkan kecenderungan yang ada malah hanya menguntungkan pihak Belanda. Sebab dengan terus bertahannya *status quo* yang tidak pernah terselesaikan, Belanda semakin dapat memperkuat kedudukannya di Irian Barat secara politis. Hal ini disebabkan Belanda didukung oleh sekutu-sekutunya dipentas politik Internasional (Negara-negara NATO).

Presiden Soekarno saat itu yang kemudian dengan lantang menyuarakan untuk memakai kekuatan militer dalam usaha merebut kembali Irian Barat sebab diplomasi tidak menghasilkan apa-apa kecuali keuntungan bagi pihak Belanda. Tanpa adanya “gertakan dan ancaman nyata”

memakai kekuatan militer, sangat mungkin sengketa kepemilikan wilayah Irian Barat akan terus berlarut-larut. Serta hasilnya akan sangat jauh berbeda seperti yang diharapkan. Lima atau mungkin sepuluh tahun ke depan Belanda akan terus menguasai sekaligus memperkuat pengaruhnya di Irian Barat. Akibatnya ide besar tentang Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke seperti yang diikrarkan dalam roklamsi 1945 tidak akan pernah terwujud.

## **Memfaatkan Situasi Politik Internasional Untuk Membangun Kekuatan Militer**

*Politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi...Politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh politik Negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan Negara tersebut...(Mohammad Hatta)<sup>177</sup>*

Presiden Soekarno saat itu memakai cara cerdas dalam pentas perpolitikan Internasional yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan kepentingan Nasional Indonesia pada masa itu. Dalam situasi politik internasional yang terpecah dalam 2 kutub besar yang saling bermusuhan, Presiden Soekarno tidak larut dan terjebak dalam permainan politik Negara adidaya, tapi justru memanfaatkannya. Hal itu terbukti dengan caranya ketika memperkuat dan membangun kekuatan militer Indonesia yang nantinya akan dipakai mewujudkan kepentingan

---

<sup>177</sup> Dikutip dalam buku M. Wibowo. *Op. Cit.*, Hal. 21.

nasional Indonesia saat itu, yakni mengembalikan wilayah Irian Barat kedalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mendapat bantuan senjata dari blok Amerika dari kemahirannya berdiplomasi dan memanfaatkan keadaan, Soekarno juga mendapat bantuan persenjataan dari Blok Sovyet. Padahal Soekarno sendiri tidak pernah menyatakan berpihak pada salah satu Blok Yang kemudian memberi bantuan persenjataan. Sekedar catatan di masa itu (era perang dingin) tidak pernah ada satu Negara pun yang mendapat bantuan persenjataan dari salah satu blok tanpa ikut menjadi bagian dari blok tersebut. Namun, Soekarno dapat mewujudkannya, dan ini adalah salah satu prestasi terbesar yang pernah dicapai oleh Indonesia dalam berpolitik di pentas Internasional.

Banyak pengamat menganggap tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu terkait penggalangan kekuatan massa secara besar-besaran dan peningkatan persenjataan secara besar-besaran untuk merebut kembali wilayah Irian Barat, dianggap sebagai bentuk romantisme dalam politik. Nampaknya Soekarno sendiri tidak keberatan atas persepsi itu. Padahal kenyataannya tindakan membangun kekuatan militer dengan mengadakan kerjasama baik dengan Blok Barat maupun Blok Timur ditentukan bukan oleh emosinya, melainkan pragmatismenya, yaitu kemampuannya melihat kepentingan nasional Indonesia dan mempertimbangkan apakah politik negara lain sesuai dengan kepentingan nasionalisme Indonesia. Misalnya, seperti diketahui, pada akhir tahun 1950-an waktu Pemerintah Indonesia menyepakati perlunya modernisasi kekuatan militer Indonesia, awalnya rencana mengenai pembelian persenjataan dilakukan di Barat. Setelah ditolak negara-

---

negara Barat secara nyata baru Soekarno mengarah ke Moskwa dan negara-negara Eropa Timur<sup>178</sup>.

## Renungan Akhir

Ketika populasi dunia merangkak menuju angka 6 milyar sementara sumber daya semakin terbatas, tampaknya ada kemungkinan bahwa perang antar Negara dimasa depan untuk mewujudkan kepentingan nasional tidak dapat dipungkiri bisa terjadi sewaktu-waktu. Suatu saat kita dipaksa untuk terus merenungkan kemungkinan bahwa setiap generasi harus berhadapan dengan kejahatan yang dilakukannya sendiri<sup>179</sup>. Ketika jalan diplomasi sudah tertutup, kompromi tidak tercapai dan masing-masing pihak tetap teguh pada pendiriannya, maka perang adalah satu-satunya jalan untuk memecah kebuntuan itu.

Makna yang tersirat dan inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival), maka Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki kewajiban untuk membuat strategi pertahanan dan keamanan yang memfokuskan diri dalam pengadaan alutsista yang tangguh dan masif dalam rangka mempertahankan integritasnya terhadap tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan baik yang datang dari dalam ataupun luar negeri. Jadi, kepentingan utama nasional Indonesia adalah keamanan dan integrasi wilayah

---

<sup>178</sup> Tulisan Alexei Drugov (*pakar ilmu politik Rusia, pemerhati masalah Indonesia*). Dalam tulisannya berjudul: "Presiden Soekarno dan Uni Sovyet". Bisa dilihat pada <http://etno06.wordpress.com/2010/01/13/presiden-soekarno-dan-uni-soviet/>

<sup>179</sup> Samuel Willard Crompton (2007), *100 Peperangan yang Berpengaruh di Dalam Sejarah Dunia (judul asli: 100 Wars That Shaped World History*, California : Bluewood Books) . Jakarta: Karisma Publishing Group. Hal 7-8.

(kelanjutan pembangunan nasional dan keutuhan kedaulatan). Lebih dari itu, strategi pertahanan dan keamanan ini mengandung persiapan sebagai wujud nyata dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Setiap Negara, termasuk Indonesia mempunyai caranya sendiri untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan sekaligus bersikap antisipatif terhadap apa yang akan terjadi pada waktu mendatang<sup>180</sup>.

Negara-negara lain pun melakukan hal yang serupa. Negara yang memiliki kepentingan nasional melakukan politik internasional yang dinamis. Untuk mencapai kepentingannya, Negara tersebut tidak hanya melakukan tindakan politik damai seperti diplomasi, tetapi diwaktu yang sama juga memperkuat diplomasi itu dengan peningkatan kemampuan persenjataan militernya. Tindakan-tindakan itu dapat mengeruhkan suasana hingga situasi menjadi tegang, bahkan hampir menyerupai perang<sup>181</sup>.

Prediksi bahwa perang serta berbagai persiapannya dimasa depan nanti tidak akan lagi diperlukan, adalah suatu pikiran sesat dan kebodohan paling mendasar dalam rencana membangun hubungan dengan Negara lain. Bagaimanapun kemajuan umat manusia dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi beserta peradaban materiilnya, tidak akan mampu mengendalikan insting untuk menguasai pihak lain pada seorang manusia atau sebuah Negara. Gambaran seperti itulah yang akan dihadapi setiap Negara, termasuk Indonesia.

---

<sup>180</sup> Bantarto Bandoro. *Op. Cit.*, Hal 128-129.

<sup>181</sup> Sayidiman Suryohadiprojo. *Loc.Cit.*, Hal.10

Hal itu disebabkan setiap Negara menegakkan kepentingan nasionalnya terhadap Negara-negara lain dengan menggunakan kekuasaan (*power*) melalui kekuatan militernya, yakni bisa dengan cara mempertahankan kekuasaan, atau meningkatkan kekuasaan bahkan hanya untuk sekedar mendemonstrasikan kekuasaan yang dimiliki Negara itu<sup>182</sup>.

Oleh sebab itu seperti yang disampaikan LetJend TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya *Si Vis Pacem Parabellum*<sup>183</sup> :

*“Indonesia harus mengembangkan satu sistem keamanan nasional (siskamnas), yaitu sistem yang mewujudkan situasi dan kondisi kemampuan bangsa dalam melindungi semua sistem kehidupan dan kepentingan nasionalnya, yang didasarkan pada sistem nilai internalnya sendiri, terhadap setiap ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negri.”*

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan *lebensraum* yang besar pula, dan pasti akan bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain, yang mungkin lebih inferior atau mungkin juga lebih superior. Dalam konteks ini negosiasi hanya dapat dikembangkan secara maksimal dan menguntungkan apabila ada posisi tawar yang kuat, yang didukung oleh kekuatan nyata di bidang politik, ekonomi dan kekuatan militer. Sulit bagi Indonesia untuk mengembangkan posisi tawarnya apabila bersandar pada kekuatan militer dengan postur yang kecil dan *low profile* seperti sekarang.

---

<sup>182</sup> Wahyono S.K., *Op.Cit.*, Hal.52

<sup>183</sup> Baca Suryohadiprojo, Sayidiman (2005), *Si Vis Pacem Parabellum (Membangun Pertahanan Negara yang Efektif dan Modern)*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.

Terjadinya kemungkinan intervensi (petualangan) dari pihak asing terhadap wilayah Indonesia juga tidak akan terjadi apabila Indonesia memiliki kekuatan dengan *deterrence power* yang memadai, minimal di lingkungan terkecil kawasan Asia Tenggara. Pilihan paling rasional bagi Indonesia saat ini sebagai persiapan menghadapi interaksinya dengan Negara lain khususnya dengan Negara-negara yang lebih maju dan kuat adalah mempersiapkan kekuatan militernya sebaik mungkin sampai pada tahapan kekuatan militer yang besar dan massif serta memiliki *deterrence effect* yang tinggi. Dimana pada akhirnya Indonesia, diwakili kekuatan militer itu mempunyai *bargaining position* dihadapan Negara-negara lain yang mengadakan interaksi dengannya. Sehingga kita tidak perlu lagi takut jika kebijakan yang diambil pemerintah berseberangan dan berbeda dengan keinginan Negara lain tersebut jika memang dirasa tidak memihak pada kepentingan nasional.

Apa yang dilakukan Presiden Soekarno dengan caranya untuk merebut kembali Irian Barat memakai kekuatan militer secara besar-besaran memang meninggalkan hutang sebesar 2.5 miliar USD. Sebagian besar utang itu memang dialokasikan untuk membeli persenjataan dalam membangun kekuatan militer nasional sedangkan sisanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur vital sebagai landasan pembangunan ekonomi berdikari<sup>184</sup>. Namun hasilnya yang tak dapat ternilai adalah kembalinya wilayah Papua Barat ke pangkuan NKRI dan tetap terjaganya kehormatan serta kedaulatan Negara.

---

<sup>184</sup> Bendungan Jatiluhur, Krakatau Steel, Semen Gresik,dll

Bandingkan dengan Orde Baru pimpinan Soeharto yang meninggalkan hutang lebih dari 100 miliar USD. Hasilnya adalah dwifungsi ABRI yang mendominasi segala bidang, korupsi merajalela, NKRI hampir pecah, belum lagi hal-hal negatif dibidang pertahanan dan keamanan. Puluhan prajurit TNI tewas karena pesawat dan kapalnya adalah barang-barang bekas dan tua yang masih dipaksakan untuk dipakai serta ditambah ketidakmampuan untuk mengatasi pencurian dan penyelundupan kekayaan Negara seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, penjualan pasir ilegal ke pihak asing. Paling parah lagi adalah berulang kali kedaulatan NKRI dilanggar di depan hidung bahkan oleh Negara tetangga sendiri<sup>185</sup>.

Seperti yang diajarkan oleh Presiden Soekarno bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta perdamaian tapi lebih cinta pada kemerdekaan. Maka perang hanya dilakukan bila ada suatu kekuatan asing yang memaksakan kepentingan politik, ekonomi, ataupun ideologinya yang bisa menghancurkan kepentingan dan keamanan nasional Indonesia itu sendiri. Ke depan, tidak bisa dihindari lagi, pasti akan ada banyak negara-negara besar yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran pemaksaan itu. Tidak adanya lagi kekuatan militer yang memiliki faktor *deterrence* dan *bargaining position* membuat Indonesia tidak lagi akan berdiri sebagai Negara yang berdaulat dalam hubungan politiknya dengan Negara-negara lain.

Kekuatan militer yang tangguh sebagai instrumen politik nasional dalam bidang pertahanan Negara adalah jawaban serta asuransi terhadap ketidakpastian tersebut.

---

<sup>185</sup> Iman Toto K.Rahardjo dan Suko Sudarso . *Op. Cit.*, Hal LII-LIII

Pertahanan Negara, pertama-tama harus mampu menangkal perang. Perang tidak dapat dicegah sekalipun diplomasi akan mengusahakannya, namun tetap tidak ada jaminan. Menangkal perang harus dengan kekuatan nyata dan kemauan untuk menggunakannya, dan juga kekuatan serta kemauan itu harus dapat sampai dan di yakini oleh musuh-musuh potensial sebagai bentuk peringatan kepada mereka untuk tidak mencoba mengusik, menekan atau mengintimidasi Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaulat<sup>186</sup>.

Tidak ada yang mubazir bahkan jika pada akhirnya Indonesia atau Negara manapun sampai mengalami defisit keuangan hanya untuk untuk membelanjakan uang di jalan pembangunan kekuatan militer. Sebab, baik dimasa damai ketika berhubungan dengan negara-negara lain dan terlebih-lebih nanti dimasa perang kekuatan militer itu mutlak diperlukan bagi sebuah Negara.

Bandingkan dengan Korea Utara hari ini dalam hal kekuatan militer, negeri kecil ini tidak pernah bisa mempan didikte apalagi digertak Negara-negara besar, karena memiliki kekuatan militer yang begitu kuat *deterrence* dan *determinant*-nya. Memiliki pesawat pembom sekitar 80 buah, Jet tempur 440, pesawat transportasi 215, Helikopter sebanyak 302. Angkatan Lautnya memiliki 63 kapal selam, fregat 3, dan kapal Amphibi sejumlah 261<sup>187</sup> serta yang paling fenomenal adalah kepemilikan senjata nuklir plus rudal balistiknya.

---

<sup>186</sup> Supardi Yogi. *Op. Cit.*, Hal.28.

<sup>187</sup>Tulisan Rudi Hartono dengan judul “Kejayaan Angkatan Perang Indonesia Pada Masa Bung Karno”. Dapat diakses di <http://berdikarionline.com/bedah-eko-pol/20100906/kejayaan-angkatan-perang-indonesia-pada-masa-bung-karno.html> , diakses tanggal 29 Mei 2010.

Memang menjaga kedaulatan itu mahal, tetapi hal tersebut harus dilakukan jika bangsa ini tidak mau menjadi cemoohan dan hinaan bangsa bangsa lain di dunia. Jika dibandingkan dengan kekayaan alam kita yang hilang setiap tahunnya mencapai triliyunan rupiah akibat kelemahan penjagaan militer kita maka menghadirkan kekuatan militer seharga ratusan miliar tidaklah seberapa. Ketegangan dengan Negara tetangga belakangan ini serta pengalaman bangsa ini dimasa lampau dalam fase sejarah heroik konfrontasi melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Papua Barat harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia, bahwa sudah waktunya masalah pertahanan menjadi salah satu prioritas yang tidak bisa diabaikan lagi<sup>188</sup>.

Berkaca kembali pada tujuan serta implementasi pembangunan kekuatan militer Indonesia pada masa pembebasan Irian Barat, pada saat itu Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip yang dikatakan Sun Tzu dalam bukunya yang terkenal *The Art of War*, yakni "*in peace prepare for war, in war prepare for peace*" (dalam damai bersiaplah untuk berperang, dalam perang bersiaplah untuk berdamai)<sup>189</sup>.

Dimana dalam buku itu juga Sun Tzu mengatakan bahwa *the true object of war is peace* (tujuan perang yang sebenarnya adalah damai). Makna yang dapat disimpulkan adalah bahwa tidak akan tercapai suatu

---

<sup>188</sup> Tulisan Djoko Susilo (*Anggota DPR Komisi 1*). Dalam tulisannya berjudul: "Apa Yang Perlu Dilakukan Ketika Malaysia Lecehkan RI ?" Tulisan bisa dilihat pada <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg00446.html>

<sup>189</sup> Catatan Ron Kernahan tentang Sun Tzu "*The Art of War*" (*a commentary on the book, plus excerpt*). Bisa dilakses pada [http://www.30-days.net/shop/download/rk\\_suntzu\\_excerpts.pdf](http://www.30-days.net/shop/download/rk_suntzu_excerpts.pdf).

perdamaian tanpa membangun kekuatan militer yang kuat, karena bila suatu pihak masih merasa dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatannya yang dianggap melebihi kekuatan lawannya, maka intimidasi dan provokasi menuju suatu perang tidak akan dapat terhindarkan<sup>190</sup>.

Indonesia, sekarang juga harus mulai menentukan keberpihakan terhadap negara-negara yang bisa dijadikan sekutu dan bisa diajak kerjasama dalam proses pembangunan kembali kekuatan militernya. Kehadiran kekuatan-kekuatan baru di pentas politik dunia menjadikan pilihan akan hal itu juga semakin banyak dan terbuka lebar tanpa harus bergantung pada satu negara saja. Artinya pembangunan kekuatan militer Indonesia bisa dibangun asalkan pemerintah mau mencari jalan keluarnya. Pilihan jalan keluar itu banyak, tinggal masalah keberanian. Apakah mau melangkah atau tidak. *Si Vis Pacem Para Bellum*, "BARANG SIAPA MENINGINKAN PERDAMAIAN, MAKA WAJIB BAGINYA UNTUK MEMPERSIAPKAN DIRI BERPERANG".

---

<sup>190</sup> Tulisan Marsda TNI Koesnadi Kardi (Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Dephan, Alumni Seskoal, Royal College Defence Studies, London). Dalam tulisannya yang berjudul: "Kekuatan Militer Sebagai Pengimbang dan Penggentar". Dilihat pada : <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01641.html> . Diakses pada 23 Januari 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adams, Cindy 1966, *BUNG KARNO-Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (judul asli : *Sukarno, An Auto Biography as Told to Cindy Adam*), terj. Mayor Abdul Bar Salim, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Bandoro, Bantarto (ed) 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Archer, Jules 2006, *Kisah Para Diktator* (Judul Asli : *The Dictators, Fascist, Communists, Despots and Tyrans-The Biographies of "The Great Dictator" of Modern World. 1967* ), Penerbit Narasi, Yogyakarta.
- Bahar, Saafroedin. dkk 1989, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara*, Penerbit Intermedia, Jakarta.
- Bandoro, Bantarto 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Jakarta.
- Buzan, Barry 1990 , *People state and Fear*, Lynee Rienner Publisher, Boulder Colorado.

Clausewitz, Carl Von 1954, *Tentang Perang* (Penerjemah Mayor inf. R. Soesatyo), Bagian Penerbit Buku Ketentaraan "PEMBIMBING", Jakarta.

----- . 1976, *On War* (diedit dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari Judul asli "*Vom Kriege*" oleh Michael Howard dan Peter Paret), Princeton University Press, Princenton-New Jersey .

Craig, Gordon A. et.al (Edited by William W. Kaufman) 1956, *Military Policy and National Security*, Princeton University Press, Princenton-New Jersey.

Crompton, Samuel Willard 2007, *100 Peperangan yang Berpengaruh di Dalam Sejarah Dunia* (judul asli: *100 Wars That Shaped World History*, California : Bluewood Books), KARISMA PUBLISHING Group, Jakarta.

Crouch, Harold 1999, *Militer dan Politik Di Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

Departemen Pertahanan RI 2007, *Buku Strategi Pertahanan Negara*, Dephan RI, Jakarta.

Djiwandono, J.Soedjati 1996, *Konfrontasi Revisited* (*Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno*), CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Jakarta.

- Duffy, Crishtoper 1988, *Frederick The Great : A Military Life* (Biografi Frederick William I), Routledge, London.
- Endaryanta, Erwin 2008, "*POLA PERTAHANAN MARITIM INDONESIA, Studi Implementasi Doktrin Militer TNI AL dalam kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia di Selat Malaka*". Thesis untuk gelar master bidang studi manajemen pertahanan (Thesis tidak dipublikasikan). Cranfield - UK - ITB.
- Feith, Herbert 2001, *Soekarno dan Militer* (Dalam Demokrasi Terpimpin), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Feith, Herbert dan Castles, Lance 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 - 1965*, LP3ES, Jakarta.
- Gardner, F. 1999, *50 Tahun Hubungan Amerika Serikat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Geus, Dr. P.B.R de 1984, *Masalah Irian Barat (Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Militer)*, Yayasan Jayawijaya, Jakarta.
- Hirst, Paul 2004, *War and Power in the 21<sup>st</sup> Century*, Murai Kencana, Jakarta.
- Holsti, K.J 1988, *Politik Internasional (Kerangka untuk analisis)* Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Joash E.S., Tapiheru 2006, (SKRIPSI) *Proto-Citizenship dan Proses Pembentukan Identitas Kolektif di Imperium Roma (Dari Negara Kota ke Negara Dunia)*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (Skripsi tidak dipublikasikan), UGM, Yogyakarta

Kahin, Audrey R. & Kahin, George McT. 1997, *SUBVERSI SEBAGAI POLITIK LUAR NEGERI-Menyingskap Keterlibatan CIA di Indonesia (Judul Asli : Subversion as Foreign Policy-The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia)*, terj. Dr.R.Z. Leirissa, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Krause, Keith 1999, "*Rationality and Deterrence in Theory and Practice*" dalam Craig A. Snyder (ed), *Contemporary Security and Strategy*, MacMillan Press, London.

Lay, Cornelis 2005, "Menjaring Bayang-Bayang: Dilema Pengawasan Intelijen Dalam Masyarakat Demokratis", dalam Andi Wijayanto (ed), *Reformasi Intelijen Negara*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.

Leifer, Dr. Michael 1986, *Politik Luar Negeri Indonesia*. (judul asli : *Indonesia's Foreign Policy*), terj. Drs. A. Ramlan Surbakti, MA, PT Gramedia, Jakarta.

Liebknecht, Karl 2004, *Militerisme dan Anti Militerisme*, IRE Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Mackie, J.A.C 1974, *Konfrontasi (The Indonesia-Malaysia Dispute)*, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

- Morgenthau, Hans J. 2010, *Politik Antar Bangsa* (judul asli: *Politic Among Nations*), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Muhaimin, Yahya A. 2008, *Bambu Runcing dan Mesiu* (*Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*), Penerbit Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Mukmin, Dr. Hidayat 1991, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Murray, Douglas J. & Viotti, Paul R. (ed) 1989, *The Defense Policies of Nations (A Comparative Study 3<sup>rd</sup> edition)*, The Jhons Hopkins Press Ltd., London
- Gray, Colin S. dan Sloan, Geoffrey (ed) 1999, *Geopolitics* (Geography and Strategi), Frank Cass Publishers, London.
- Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional (17 Maret 2011).
- Nasution, A.H 1955, *Catatan-Catatan Sekitar Politik Militer Indonesia*, C.V Pembimbing, Jakarta.
- Osborne, Robin 2001, *Kibaran Sampari* (Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat), Penerbit ELSAM, Jakarta.
- Perlmutter, Amos 1984, *Militer dan Politik*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Poesnegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho 1992, *Sejarah Nasional Indonesia VI : Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Prihartono, T. Hari, dkk 2006, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta.

Prihatono, T.Hari, dkk. 2007, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan kebijakan*, Propartia Institute, Jakarta.

Rahardjo, Iman Toto K. dan Sudarso, Suko 2010, *Bung Karno (Masalah Pertahanan-Keamanan)*, Grasindo, Jakarta.

Seri Buku TEMPO : Bapak Bangsa 2010, "*TAN MALAKA (Bapak Republik Yang Dilupakan)*", Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta.

S.K., Wahyono 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Penerbit Teraju, Jakarta.

Schelling, Thomas C 1980, *The Strategy of Conflict*, Harvard University Pres, Bolton.

Schelling, Thomas C. 2008, "*Arms and Influence*". Dalam Thomas G. Mahken & Joseph A. Maiolo (ed) *Strategic Studies*, Routledge, New York.

Schuman, Frederick L 1958, *International Politics (International Studen Edition: Sixth Edition)*,

McGraw-Hill Book Company, Inc & Kogakusha Co., Ltd., New York & Tokyo.

Simpson, Bradley R. 2009, *Economic With Guns (Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Singh, Bilveer 1994, *Bear and Garuda (Sovyet-Indonesian Relation: From Lenin to Gorbachev)*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Soebadio, Hadi 2005, *Hubungan Indonesia-Amerika Dasawarsa Ke II Tahun 1955-1965*, Pramita Press, Tangerang.

Soekarno 2000, *Membangun Dunia Yang Baru (Pidato Presiden RI di Muka Sidang Umum PBB ke XV tanggal 30 September 1960)*, Media Presindo, Yogyakarta.

Sumarkidjo, Atmadji 2010, *Mission Accomplished*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

Suryohadiprojo, Sayidiman 2005, *Si Vis Pacem Parabellum (Membangun Pertahanan Negara yang Efektif dan Modern)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suwanto, Drs. dkk 2002, *Sejarah Nasional dan Umum 3 (kelas 3 SMP)*, Aneka Ilmu, Semarang.

Suwarno, Drs. Basuki 1999, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950.*, Pan Percetakan Upakara, Jakarta.

Syamsudin, Nazaruddin 1988, *Soekarno-Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Tanuwidjaja, William 2008, *101 Intisari Seni Perang Sun Tzu*, MedPress, Yogyakarta.

Tilly, Charles 1975, "Reflections on the History of European State-Making," dalam Charles Tilly (ed)., *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton University Press, Princeton.

Tilly, Charles 1985, "War Making and State Making as Organized Crime," dalam Peter Evans, Dietrich Reuschmeyer and Theda Skocpol (ed), *Bringing the State Back In*, Cambridge University Press, Cambridge.

Tilly, Charles 1999, *Coercion, Capital and European States (AD 990-1992)*, Blackwell Publishing, Malden.

Tim CSIS 1995, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Penerbit CSIS, Jakarta.

Tim KontraS 2005, *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia (Catatan KontraS Pasca Perubahan Rezim 1998)*, Penerbit KontraS, Jakarta.

Tim Penerbit Narasi 2006, *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia* (Tokoh : A.H Nasution), Penerbit NARASI, Jakarta.

Tim Propartia Institute 2006, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta.

Weiner, Tim 2008, *Membongkar Kegagalan CIA*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wibowo, M. 2009, *Malaysia Membungkam Indonesia*, Pustaka Solomon, Yogyakarta .

Yamin, Muhammad & Matengkar, Sebastian 2006, *Intelijen Indonesia (Towards Professional Intelligen)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yogi, Supardi 1999, *Kembali Ke Rakyat (Kepedulian Seorang Prajurit)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

### **Artikel Internet**

Andi Wijayanto : *"Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia"*.  
Dapat dilihat pada [http://www.propatria.or.id/load\\_down/Paper%20Diskusi/Evolusi%20Doktrin%20Pertahanan%20Indonesia%20-%20Andi%20Widjajanto.pdf](http://www.propatria.or.id/load_down/Paper%20Diskusi/Evolusi%20Doktrin%20Pertahanan%20Indonesia%20-%20Andi%20Widjajanto.pdf)

Adi Wicaksono (Pemerhati Sejarah Politik dan Redaktur Global Tangsel ) Artikel berjudul *"Isu Papua dan Korelasinya Dengan Peta Kekuatan Militer di Era 1960"*.  
Bisa dilihat pada <http://globaltangsel.com/>

rubrik/opini/baca/9/isu-papua-dan-korelasinya-dengan-peta-kekuatan-militer-di-era-1960/.

**Alexei Drugov** : “Presiden Soekarno dan Uni Sovyet”. Dapat dilihat pada <http://etno06.wordpress.com/2010/01/13/presiden-soekarno-dan-uni-soviet/>

Rudi Hartono: “*Kejayaan Angkatan Perang Indonesia Pada Masa Bung Karno*”. Dapat dilihat pada <http://berdikarionline.com/bedah-eko-pol/20100906/kejayaan-angkatan-perang-indonesia-pada-masa-bung-karno.html>

Ron Kernahan tentang Sun Tzu “*The Art of War*” (a commentary on the book, plus excerpt). Bisa dilakses pada : [http://www.30days.net/shop/download/rk\\_suntzu\\_excerpts.pdf](http://www.30days.net/shop/download/rk_suntzu_excerpts.pdf).

Guy J. Pauker : “*General Nasution’s Mission to Moscow*”. Dapat dilihat pada Jurnal JSTOR. <http://links.jstor.org/sici?sici=0004-4687%28196103%291%3A1%3C13%3AGNMTM%3E2.0.CO%3B2-T>

Peter Kasenda : “*Soekarno, Diplomasi dan Konfrontasi*” Dapat dilihat pada <http://www.scribd.com/doc/45659582/Irian-Barat-Diplomasi-Dan-Konfrontasi>

Sutoro Eko : “Meletakkan Militer Pada Posisi Yang Sebenarnya”. Dapat dilihat pada [http://www.ireyogya.org/sutoro/reformasi\\_militer.pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/reformasi_militer.pdf)

Tulisan Leo Kusuma dengan judul “*Kemanakah KRI Irian*”. Dapat dilihat di <http://umum.kompasiana.com/2009/01/14/kemanakah-kri-irian/>

Mayor Laut (P) Salim, Komandan KRI Untung Suropati):  
*"Pertahanan Negara adalah cermin dari Martabat Bangsa dan Negara"*. Dapat dilihat pada <http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara>

Edi Prasetyono : *"Strategi Pertahanan: Dimensi Militer dan Doktrin"*. Dapat dilihat pada <http://www.propatria.or.id/load-down/Paper%20Diskusi/Strategi%20Pertahanan:%20Dimensi%20Militer%20dan%20Doktrin%20%20Edy%20Prasetyono.pdf>

Djoko Susilo : *"Apa Yang Perlu Dilakukan Ketika Malaysia Lecehkan RI ? "*. Dapat dilihat pada <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg00446.html>

Edy Prasetyono : *"Kekuatan Udara dan Pertahanan Nasional"*. Dapat dilihat pada <http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Kekuatan%20Udara%20dan%20Pertahanan%20Nasional%20-%20Edy%20Prasetyono.pdf>

Marsda TNI Koesnadi Kardi : *"Kekuatan Militer Sebagai Pengimbang dan Penggentar"*. Dapat dilihat pada <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01641.html>

### **Majalah**

Majalah Angkasa Edisi Koleksi XXIV. Dirty War (Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius). Edisi April 2005.

Majalah Angkasa Edisi Koleksi No.61. Kapal Perang Indonesia- Sejarah dan Perkembangannya. Edisi September 2009.

Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 72 tahun 2011. Pesawat Kombatan TNI-AU1946-2011 (Dari Legenda Churen Hingga Kedigdayaan Flanker).

Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 73 tahun 2011. Operasi Udara Trikora.

Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer) Nomor 1 Tahun 1. Edisi April 1987

### **Dokumentasi Digital**

Pidato Presiden Soekarno Mengenai “Klaim Irian Barat”. Pada peringatan Nuzulul Quran 1962. Sumber: Arsip Nasional RI.

Pidato Presiden Soekarno Mengenai Irian Barat di Istana Negara pada Upacara Pelantikan Oemardhani sebagai KSAU tanggal 20 Januari 1962. Sumber: Arsip Nasional RI.

Pidato Presiden Soekarno tentang “*Penemuan Kembali Revolusi Indonesia*” tanggal 17 Agustus 1959. Sumber: Arsip Nasional RI.

Pidato Presiden Soekarno pada sambutan Sidang Pengurus Besar Front Nasional. Sumber: Arsip Nasional RI. “OPERATION TRIKORA\_ *Indonesia Giant Military in 1960s and Liberation of W. Papua*”. Sumber: youtube.com

## TENTANG PENULIS

---

Ferry Valdano Akbar, lahir di Semarang tanggal 6 Mei 1989. Dari orang tuanya yang memiliki darah asli minang bernama Baharuddin dan Hilda Yetti, S.H. Pendidikan dasar ditamatkan semuanya di Kota Semarang, yakni dimulai dari SD Islam Supriyadi, berlanjut ke SMP N 2 Semarang dan terakhir di SMA N 3 Semarang pula. Yang kemudian memutuskan untuk mengikuti tradisi leluhurnya yakni “merantau” ke kota lain yakni Jogjakarta untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jurusan Ilmu Pemerintahan (Sekarang JPP, Jurusan Politik Pemerintahan).

Berbeda dengan kebanyakan keluarga dan kerabatnya yang memiliki bakat dan berorientasi berdagang seperti kebanyakan orang minang, penulis sejak masuk SMP dan berlanjut ke SMA sudah sangat tertarik membaca dan mencari tahu segala hal yang berhubungan dengan sejarah, perang, politik dan pernak-pernik lainnya. Tokoh idolanya bahkan seorang diktator Jerman Adolf Hitler sang pemimpin partai Nazi. Kesukaannya membaca buku-buku seperti itu bahkan pernah membuat orang tuanya kahawatir terhadap penulis yang ditakutkan akan menjadi seorang teroris. Ketika memasuki masa SMA, penulis tetap sangat tidak bisa paham pelajaran matematika, akuntansi, apalagi fisika sehingga penulis terdampar di jurusan IPS (Ikatan Pelajar Santai) yang memberinya banyak waktu luang untuk melanjutkan hobbinya membaca buku-buku perang, politik dan sejarah tanpa harus terbebani pelajaran-pelajaran eksak.

Masuk di Jurusan Ilmu Pemerintahan sedikit membuat kecewa penulis sebab ternyata di dalamnya tidak ada mata kuliah khusus yang membahas tentang studi pertahanan negara. Kebanyakan hanya membahas tentang politik lokal, otonomi daerah, demokrasi, pemilu, dsb. Kekecewaan itu kemudian penulis tumpahkan untuk membuat skripsi yang berisi tentang arti penting kekuatan militer bagi sebuah negara yang ditunjukkan dalam peristiwa bersejarah pembebasan Irian Barat. Dukungan yang diberikan oleh Drs. Cornelis Lay, M.A selaku dosen pembimbing skripsi dari penulis sangat begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Dimulai dari persetujuan yang diberikan tentang tema yang akan diangkat hingga sumbangsih pikiran yang membantu penulis bersemangat untuk mewujudkan itu semua.

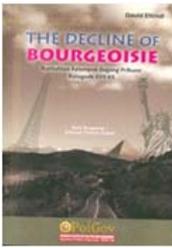
Semasa kuliah penulis aktif menjadi kader Gmnl Komisariat Sospol UGM dan pernah maju mencalonkan diri untuk menjadi presiden HMJ KOMAP (Korps Mahasiswa Pemerintahan) walaupun akhirnya gagal dan hanya menjadi menteri pemberdayaan anggota KOMAP. Setelah menamatkan pendidikan S1 nya dan berhasil menjadi seorang sarjana bergelar S.IP kini penulis bekerja sebagai staf ahli anggota DPR-RI dari PDI-Perjuangan yang ditempatkan di Komisi 1 (Bidang Militer, Intelijen, Luar Negeri, dan Telekomunikasi). Sembari menunggu apa yang Tuhan persiapkan untuk episode kehidupan penulis selanjutnya, penulis memilih untuk terus belajar, mengamati, dan melihat realitas kehidupan politik di Gedung Wakil Rakyat yang katanya berisi orang-orang terhormat. Suatu kesempatan yang tidak semua orang bisa meraihnya.



## PUBLIKASI YANG DITERBITKAN

Jurusan Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

---



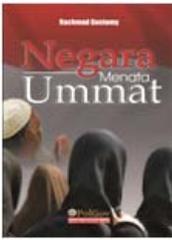
**David Efendi, *The decline of bourgeoisie: Runtuhnya kelompok dagang pribumi Kotagede XVII-XX*), 276 hlm, 14,5x21 cm, 2010.**

Perjalanan dan dinamika pedagang di Nusantara menjadi penting untuk melacak keberadaan borjuasi yang muncul di abad ke-19 dan ke-20. Kelompok borjuis ini lahir dan bermunculan di beberapa daerah (borjuasi etnis) yang kemudian bertemu dalam perdagangan Nusantara sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan pelayaran. Pelacakan kelas borjuasi ini juga dapat diawali dengan pembacaan terhadap kategori Clifford Geertz yang memilah tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu golongan Abangan sebagai penduduk desa, kaum Santri sebagai kaum pedagang, dan Priyayi sebagai keturunan bangsawan atau birokrat.



**Titik Widayanti, *Politik Subaltern (Pergulatan Identitas Waria)*, 148 hlm, 14,5x20,5 cm, 2010.**

Masih minimnya kajian subaltern di Indonesia menginspirasi penulis untuk menghadirkan studi tentang Pergulatan Identitas Waria yang dibingkai dalam politik subaltern. Keberadaannya sebagai komunitas subaltern sebenarnya memiliki berbagai dimensi yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Buku ini mencoba mengawali kajian tentang waria dari perspektif politik, khususnya berkaitan dengan pembentukan dan pergulatan identitasnya sebagai komunitas subaltern.



**Rachmad Gustomy; Negara Menata Umat, 242 hlm, 14x21 cm, 2010.**

Pemikiran di balik buku ini berangkat dari olokan sambil lalu bahwa selama ini membaca ‘masyarakat Islam’ adalah sekedar mendefinisikan wacana tokoh besar yang diwawancarai. Baik ilmuwan, cendekia, ulama atau tokoh Islam yang dijadikan sampling analisis penelitian yang selama ini seakan mewakili “Rakyat Islam Indonesia”: Siapa (?), bagaimana (?), seperti apa (?) mereka. Olokan itu menjadi refleksi serius bagi penulis, sehingga memunculkan sebuah ambisi untuk melihat konstruksi masyarakat Islam dalam relasi kekuasaan dengan negara. Penulis menemukan celah kecil, meminjam psikoanalisa pada identifikasi proses bawah sadar (sub-consciousness) yang ternyata masih membentuk pola tertentu.



**Rizza Kamajaya; Transformasi Strategi Gerakan Petani, 192 hlm, 14x21 cm, 2010.**

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Order Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani. Partisipasi politik yang macet selama kurang waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini kehadiran organisasi rakyat yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang hidup secara sembunyi-sembunyi sewaktu rezim Orde Baru berkuasa.

Gerakan petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambilalih kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi sebuah titik tolak petani untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.

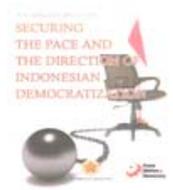


**Wigke Capri Arti; Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Gay, 192 hlm, 14x21 cm, 2010.**

Lebih dari dua puluh tiga tahun yang lalu, organisasi gay pertama di Indonesia didirikan di Yogyakarta. Organisasi tersebut memberi warna berbeda bagi dunia gerakan di Yogyakarta yang telah diisi dengan berbagai organisasi. Organisasi tersebut bernama PGY, Persaudaraan Gay Yogyakarta.

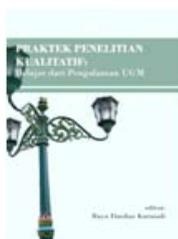
Buku ini melacak tentang gerakan gay di Yogyakarta dari kuntum terciptanya gerakan hingga sekarang ini. Buku ini juga memotret pertarungan wacana gay dengan wacana kuasa agama dan negara yang telah berlangsung selama ratusan abad.

**Purwo Santoso, Hasrul Hanif, AE Priyono; Securing the pace and the direction of Indonesian Democratization, 90 hlm, 13x21 cm, 2010**



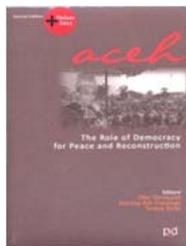
Buku ini berisi tentang desain asesmen demokrasi yang ditawarkan oleh Tim Fisipol UGM terkait dengan relasi *power, wealth* dan *democracy*. Model tersebut terkait dengan relasi *power* antara proses produksi kemakmuran dan distribusi kemakmuran yang seimbang. Buku ini berisi empat (4) buah chapter, pertama *“In search for alternative models of democracy for Indonesi”*. Chapter kedua *“Power, wealth, and democracy: Reconstructing welfare-based power relations”*. Chapter yang ketiga *“Action-reflection”* dan keempat berisi kesimpulan .

**Bayu Dardias Kurniadi (ed.); Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM, 310 hlm, 14,5 x 20,7 cm, 2011**

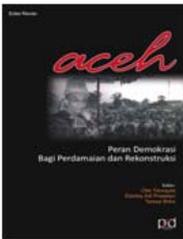


Buku yang ada dihadapan anda ini adalah kumpulan tugas mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM pada semester lima (5) proses kuliah mereka. Tugas-tugas tersebut dipakai sebagai salah sat penilaian akhir dalam mata kuliah Metode Analisa Kualitatif yang diampu oleh Bayu Dardias Kurniadi, MA, M.Pub.Pol bersama Arie Ruhyanto, M.Sc. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan dua hal, pertama memahami prinsip dan konsep dasar metode penelitian kualitatif dan kedua mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam penelitian yang sebenarnya.

**Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Maràs Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, 2010.**



Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



**Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Marås Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, Versi Indonesia, 2011**

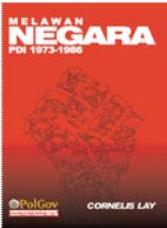
Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



**Purwo Santoso dibantu Joash Tapiheru, Analisis Kebijakan Publik, 194 hlm, 15x22 cm, 2010**

Selama ini ada kecenderungan dominasi perpektif modernis rasional-komprehensif dalam kajian analisis kebijakan. Sayangnya, dominasi perpektif ini telah mencapai level mendekati hegemonik sehingga menutup mata sebagian besar publik awam tentang keberadaan berbagai perspektif alternatif lain. Analisis kebijakan selama ini identik dengan kerumitan dan kompleksitas yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang “ahli”. Mitos inilah yang ingin digugat oleh buku Analisa

Kebijakan Publik ini. Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa analisis kebijakan bukanlah hal yang sedemikian rumit dan kompleks sehingga secara eksklusif diperuntukkan bagi para ahli. Meskipun penulisan modul ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan mahasiswa strata 1, namun melalui modul ini kami ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa melakukan analisis kebijakan.



**Cornelis Lay, Melawan Negara: PDI 1973 – 1986, 15x22 cm, 2010**

Perkembangan politik Indonesia selalu mencerminkan kondisi yang tampak diarahkan secara gamblang akan segera tunduk di hadapan kuasa negara. Mencitrakan negara sebagai magnet yang menarik setiap elemen apapun yang kuat berwatak besi, bahkan “mereka” yang berkarat untuk bersanding dengannya, dan lalu mengokohkan hegemoni negara. Namun, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di satu episode silam; 1973-1986, yang secara terperinci dikisahkan dalam buku ini, berkembang menjadi sebuah kutub yang tidak saja melawan kecenderungan, tetapi juga menguras lebih banyak energi penguasa lebih dari satu dasawarsa. Kajian spesifik tentang PDI ini mengungkapkan secara terang-terangan karakter sesungguhnya negara. Tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi juga melawan limitasi teori dan perdebatan-perdebatan politik jaman Orde Baru yang terlanjur “mahfum” dipahami dari sudut pandang sentralitas yang mengandaikan negara kohesif dan solid.



**Riswandha Imawan, Quo Vadis Demokrasi Indonesia, 15x22 cm, 2010**

“...Dalam politik, konflik hanya sebatas perbedaan visi, bukan pribadi. Boleh saja kita berbeda pendapat, pandangan. Namun tidak berarti menghapus sama sekali persamaan yang ada di antara kita. Apalagi kita menganut konsep kekeluargaan dalam bernegara. Kita dibentuk oleh penderitaan yang sama, menghadapi tantangan yang sama, menghirup udara dan meminum air yang sama. Maka seharusnya tingkat toleransi manusia Indonesia menempati rangk8ing tertinggi di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bagi ilmuwan politik, ketidakmampuan ini bisa dimaklumi. Mayoritas aktor politik kita adalah politisi karbitan. Mereka hadir dan dibesarkan di bawah payung popularitas orang lain..”

